



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah.

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- A. Pendapatan asli daerah, yang meliputi hasil :
 - 1. pajak daerah,
 - 2. hasil retribusi daerah,
 - 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
 - 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- B. Dana perimbangan; dan
- C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Di sisi lain, Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, yang semula diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam UU No. 28 Tahun 2009 ini mengutamakan efektifitas pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah dengan :

- A. Close-List System Sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap DPRD

- B. Pembatasan jenis pungutan berdasarkan kriteria pajak daerah
- C. Pembatasan jenis pungutan berdasarkan kriteria retribusi daerah
- D. Pengawasan terhadap Perda PDRD

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat membatasi pemerintah daerah provinsi untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Padahal tanggungjawab yang diberikan kepada pemerintah provinsi sangat luas dan banyak. Bagi daerah yang memiliki sumberdaya alam yang memadai pasti persoalan pajak dan retribusi tidak menjadi kendala sedangkan bagi daerah yang memiliki keterbatasan sumberdaya dalam undang-undang tersebut menjadi kendala.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan semangat mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja. Maka untuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beberapa perubahan penataan pajak daerah dan retribusi daerah dengan berprinsip kepada :

Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu equity, certainty, convenience, dan economy;. Asas yang perlu diperhatikan dalam memungut pajak yaitu revenue productivity, equity/equality, dan ease of administration. Sebagai dasar berpijak, sudah seharusnya ketiga asas perpajakan itu dipegang teguh dan dijaga keseimbangannya agar tercapai sistem perpajakan yang baik. The Revenue Adequacy Principle adalah kepentingan pemerintah, The Equity Principle adalah kepentingan masyarakat, dan The Certainty Principle adalah untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Sedangkan didalam pemungutan retribusi daerah mengutamakan penyederhanaan bahkan penghapusan pungutan retribusi daerah yang

dianggap tidak efektif serta bertentangan dengan prinsip pelayanan dan menimbulkan beban bagi masyarakat.

Sedangkan hal baru didalam UU No.1 Tahun 2022 ini, dengan mendasari pemisahan cara pemungutan pajak daerah secara official assessment dan self assessment ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi Wajib Pajak/Retribusi dan Fiskus dalam menjalankan kewajiban dan haknya. Terdapat juga kebijakan restrukturisasi dan integrasi pajak daerah ditujukan untuk mengurangi administrative dan compliance cost serta optimalisasi pemungutan Pada bagian KUP Pajak Daerah yang bersifat self assessment, akan diatur pula pengaturan pemungutan pajak-pajak yang dipungut dengan mekanisme opsen. Pengaturan ini sangat diperlukan karena mengingat mekanisme opsen memiliki karakteristik yang berbeda dengan mekanisme pemungutan pajak daerah lainnya. Melalui mekanisme opsen, pajak daerah akan dipungut oleh Pemerintah Pusat untuk kemudian ditransfer ke Pemerintah Daerah. Sehingga diamanatkan jenis pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut diatas, perlu dilakukan pengaturan mengenai pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 19 ayat a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka disusun Naskah Akademik.

Naskah Akademik ini terdiri dari Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, identifikasi masalah dan kegunaan serta metode penelitian; Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris; Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait; Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis; Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah; dan Bab VI Penutup, yang memuat Kesimpulan dan Saran, serta Lampiran, yang memuat Naskah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Naskah Akademik ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

TIM PENYUSUN

STIE BINA KARYA

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| • Latar Belakang..... | 1 |
| • Identifikasi Masalah..... | 6 |
| • Tujuan dan Kegunaan..... | 6 |
| • Metode..... | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS | 9 |
| A. Kajian Teoretik | 9 |
| 1. Desentralisasi | 11 |
| 2. Otonomi Daerah | 13 |
| 3. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah | 13 |
| 4. Hukum Keuangan Negara..... | 16 |
| •Pengertian..... | 16 |
| •Ruang Lingkup | 18 |
| 5. Hubungan antara Pusat dan Daerah..... | 19 |
| 6. Manajemen Pendapatan Daerah | 22 |
| 7. Pendapatan Asli Daerah | 24 |
| 8. Pajak Daerah..... | 25 |
| 9. Retribusi Daerah..... | 26 |
| 10. Asas-asas dalam Penyusunan Peraturan Daerah | 30 |
| B. Praktik Empiris | 32 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT | 41 |
| A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah | 41 |
| B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait | 48 |
| 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Besar dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme | 48 |

| | |
|--|------------|
| 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara | 49 |
| 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | 49 |
| 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah | 49 |
| 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | 51 |
| 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 52 |
| 7. Evaluasi Rancangan Perda dan Pajak Daerah | 53 |
| | |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS | 55 |
| A. Landasan Filosofis..... | 55 |
| B. Landasan Sosiologis..... | 56 |
| C. Landasan Yuridis | 56 |
| | |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA59 | |
| - Jangkauan | 59 |
| - Arah Pengaturan | 59 |
| - Ruang Lingkup Materi Muatan | 59 |
| • Judul..... | 59 |
| • Konsiderans | 60 |
| • Dasar Hukum..... | 60 |
| • Ketentuan Umum..... | 62 |
| • Batang Tubuh | 66 |
| | |
| BAB VI PENUTUP | 84 |
| (1) Kesimpulan | 84 |
| (2) Saran | 92 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 155 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah ketatanegaraan Indonesia sudah sejak semula meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bukan hanya untuk sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan atau menampung dan mengakomodasikan kenyataan bahwa negara Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan penduduk yang demikian banyak. Namun hal yang terpenting bahwa otonomi daerah merupakan dasar untuk memperlancar pelaksanaan demokrasi dan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping untuk menjaga keutuhan negara kesatuan.

Desentralisasi dilihat dari dimensi kepentingan Pemerintah merupakan wahana pendidikan politik, latihan kepemimpinan dan menciptakan stabilitas politik. Sedangkan dari sisi Pemerintah Daerah, desentralisasi dimaksudkan untuk mewujudkan kesempatan bagi masyarakat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal (political equality), meningkatkan kemampuan hak-hak dari komunitasnya (local accountability) serta meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah (local responsiveness).¹ Desentralisasi merupakan konsep yang dianggap mampu mengatasi masalah pelayanan publik di berbagai sektor. Dengan konsep desentralisasi, diharapkan akan terjadi efisiensi, efektivitas dan pemerataan, yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan rakyat.

Amandemen kedua UUD 1945 memberikan landasan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perubahan mendasar Pasal 18 UUD 1945. Perubahan tersebut memberikan paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru.

¹ Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi di Era Ekonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda tentang Penanaman Modal*, UII Pres, Yogyakarta, 2005, hlm. 39-40

Hal tersebut terlihat dari prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Prinsip Daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 ayat (2)]. Ketentuan itu menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip baru dalam Pasal 18 UUD 1945, lebih sesuai dengan gagasan Daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di Daerah yang demokratis.
- Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya [Pasal 18 ayat (5)]. Prinsip ini sesuai dengan pendapat para founding fathers, namun karena tidak dirumuskan dalam UUD 1945, maka terjadi penyempitan implementasi otonomi daerah menuju pemerintahan sentralisasi. Hal itu tercantum dalam teks Pasal 18 ayat (5) sebagai berikut : “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang- undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.
- Prinsip kekhususan dan keragaman Daerah [Pasal 18A ayat (1)] dengan teks selengkapnya : “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah”. Rumusan prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi Daerah tidak harus seragam, tetapi disesuaikan dengan keadaan khusus dan keragaman tiap Daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya maksimum untuk mewujudkan cita-cita otonomi, yaitu masyarakat Daerah yang demokratis dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara enumeratif merinci satu per satu apa yang menjadi kewenangan Daerah, karena rincian urusan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, jelas terlihat bahwa kewenangan (atau urusan) Daerah sangat luas, mencakup hampir seluruh kewenangan, di luar urusan yang secara tegas dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintahan yang merupakan wewenang Pemerintah.

² Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Cet. Ketiga, 2004, hlm. 7-17

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan, yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan Daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan Daerah yang bersangkutan, tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumberdaya dan sumber dana yang dimiliki oleh Daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, potensi dan kekhasan Daerah yang bersangkutan. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, setiap tingkatan pemerintahan melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan, menjadi kewenangan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

Dengan demikian, wewenang Daerah untuk mengurus urusan pemerintahan sangat luas. Luasnya urusan pemerintahan yang diurus oleh Daerah, disamping merupakan berkah, sekaligus pula merupakan beban bagi Daerah, terutama dalam hal menafsirkan urusan pemerintahan yang demikian luasnya itu ke dalam bentuk kebijakan dan langkah-langkah konkret.

Luasnya wewenang Pemerintah Daerah tersebut tentunya harus ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai tiga misi utama dalam penyelenggaraan otonomi Daerah, yaitu : (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya Daerah (*local resources*); dan (3)

Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (public sphere) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Namun demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lebih merupakan komitmen, sedangkan tingkatan implementasinya belum optimal. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah.

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas : (1) Pendapatan asli daerah, yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana perimbangan; dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Namun demikian, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD masih sangat kecil. Pendapatan asli daerah sebagai indikator utama sumber pembiayaan penyelenggaraan otonomi Daerah, masih belum menunjukkan peranan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pembiayaan pengeluaran Daerah kepada Pemerintah masih relatif besar, yang terutama bersumber dari dana alokasi. Namun demikian, dalam banyak hal dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

Selama ini, pungutan retribusi Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut hanya mengatur prinsip- prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut Daerah. Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang terbit tahun 2017

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 29 (13 retribusi jasa umum, 11 retribusi jasa usaha dan 5 retribusi perijinan tertentu) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah

Namun demikian, pemberian peluang untuk menetapkan pungutan baru yang semula dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran daerah. Dengan kriteria yang ditetapkan undang-undang, nyaris tidak

ada jenis pungutan retribusi baru yang dapat dipungut oleh daerah. Oleh karena itu, hampir seluruh pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang tidak signifikan terhadap iklim investasi, bahkan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan Pusat, serta merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, yang semula diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk bidang Pajak Daerah adanya Restrukturisasi Jenis Pajak Daerah, atau perubahan menjadi kluster Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi :

- A.** pajak atas jasa usaha Hotel/Akomodasi,
- B.** pajak Restoran,
- C.** pajak Reklame,
- D.** pajak Hiburan, dan
- E.** pajak Tenaga Listrik.

Perubahan yang lain adalah adanya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Khusus di bidang retribusi daerah, perubahan yang dilakukan sangat mendasar berupa rasionalisasi Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun dengan tetap menjaga penerimaan PAD daerah, antara lain :

- (a) Rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan termasuk sebagai semangat keberlanjutan UU Cipta Kerja,
- (b) Mengutamakan efektifitas pemungutan retribusi daerah yang tidak menimbulkan beban di masyarakat,
- (c) Rasionalisasi jenis retribusi lainnya didasari pertimbangan bahwa layanan dimaksud wajib disediakan Pemerintah Daerah tanpa pungutan.

Hal ini juga menimbang beberapa permasalahan yang timbul atas pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 antara lain dengan adanya :

- Putusan MK Terkait Alat Berat/Alat Besar untuk Pajak Alat Berat
- Putusan MK Terkait PPJ untuk PBJT Tenaga Listrik

- UU 23/2014 dan UU 3/2020 terkait sinkronisasi kewenangan
- UU Cipta Kerja untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, maka akan menurunkan administration dan compliance cost, memperluas basis pajak , harmonisasi dengan peraturan perundangan lain.

Highlight pengaturan **Pajak Daerah** pengaturan **Opsen** dimaksudkan untuk tidak menambah beban WP melainkan percepatan penerimaan bagian PKB dan BBNKB bagi kab/kota dan sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kab/kota dalam rangka penguatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hightlight rasionalisasi **Retribusi Daerah** dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun dengan tetap menjaga penerimaan PAD daerah.

Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut diatas, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang perlu diidentifikasi adalah :

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah, dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam pengaturan penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas,

tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah :

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan retribusi Daerah serta cara-cara mengatasi permasalahan.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraan retribusi Daerah.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik ini merupakan acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai penguatan dari aspek hukum yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. Metode

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian difokuskan pada pengkajian bahan-bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama mengenai kewenangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan pada kebenaran koheren dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Disamping itu, dilakukan pula penelitian sosiologis dan historis agar penelitian bernilai komprehensif, karena penelitian yang dilakukan memerlukan dukungan data, sehingga harus dilakukan pendekatan kemasyarakatan.

Dipilihnya metode penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah menggambarkan objek yang diteliti. Sebagai

pendukung, digunakan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Digunakannya pendekatan ini, mengingat ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah. Disamping itu, penelitian ini tidak bisa terlepas dari sudut pandang analisis hukum, artinya dielaborasi apa yang seharusnya diatur dalam produk hukum daerah serta ruang lingkup kebebasan bertindak secara mandiri oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Dengan dilakukannya analisis hukum, akan dapat diperoleh kepastian terkandungnya elemen positivitas, koherensi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga tetap berada dalam koridor kewenangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Sedangkan sejarah hukum penting dalam penelitian ini karena dalam sejarah hukum dapat diketahui perkembangan sistem hukum sebagai keseluruhan serta perkembangan institusi hukum dan kaidah hukum individual tertentu dalam sistem hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku pada masa sekarang dan yang dibutuhkan di masa depan.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis sehingga dapat ditemukan alasan yang rasional mengenai implikasi hukum dari kurang transparan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa :

- a. Sumber hukum formal, yaitu : peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, yurisprudensi dan doktrin.
- b. Sumber hukum materiil, yaitu : sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis.

BAB II

KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

- Kajian Teoretik

1. Desentralisasi

The founding father sejak awal menyatakan bahwa Indonesia yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau dan serta penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa, tidak mungkin dikelola secara sentralistik. Dengan perkataan lain, otonomi bagi kesatuan masyarakat hukum yang sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk merupakan *conditio sine qua non*. Prinsip dasar tersebut kemudian dituangkan ke dalam konstitusi yang menjadi pedoman dasar dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan.³

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi, meliputi antara lain penyerahan kewenangan Pemerintah ke Pemerintah Daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, agama, fiskal dan moneter, dan agama) dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan Daerah.

Bhenyamin Hoessein menyebutkan secara teoretik, negara selalu menganut asas sentralisasi sejak kelahiran sampai akhir hayatnya. Namun, negara sebagai organisasi yang besar dan sangat rumit tidak mungkin hanya diselenggarakan dengan asas sentralisasi. Oleh karena itu diperlukan juga asas desentralisasi. Kedua asas tersebut tidak dikotomis, tetapi berupa kontinum. Tidak ada negara yang menganut desentralisasi seratus persen.

³ Sadu Wasistiono, 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media. hlm 1

Sebaliknya, kecuali bagi negara yang menyerupai negara kota raya, hampir tidak ada negara yang menyelenggarakan sentralisasi seratus persen. Pada negara kesatuan, pendulum sentralisasi - desentralisasi idealnya berada pada titik keseimbangan. Negara tidak mungkin memilih salah satu alternatif sentralisasi atau desentralisasi karena akan memunculkan anarki.

Daerah yang menganut asas desentralisasi merupakan wujud otonomi daerah. Menurut Moh. Yamin, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagian dari negara yang menganut paham demokrasi. Jadi, otonomi harus menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis. Artinya, di negara demokrasi dituntut adanya pemerintahan daerah yang mempunyai hak otonomi.

Pemerintahan daerah yang demikian dalam konteks hubungan antara demokrasi dengan desentralisasi menurut Bagir Manan, yaitu sebagai berikut:⁴ (a) Untuk mewujudkan prinsip kebebasan (liberty); (b) Untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka; dan (c) Untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah hubungan antara negara hukum dengan desentralisasi?. Karakteristik negara hukum tradisional adalah : (a) Adanya Undang-Undang Dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan warganya; (b) Adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan (c) Adanya pemencaran kekuasaan negara/ Pemerintah.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, secara prinsipil desentralisasi dapat dilihat sebagai bagian perwujudan negara hukum, sebab di dalam prinsip negara hukum terkandung maksud pembatasan kekuasaan terhadap Pemerintah.

⁴ Bagir Manan, 1990, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta; Sinar Harapan., hlm 39

⁵ Ibid, hlm 39

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas desentralisasi merupakan salah satu cara pembatasan kekuasaan, dan hal itu mengandung makna sebagai salah cara menegakkan negara hukum.

2. Otonomi Daerah

Terminologi “otonomi” mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan dalam arti kemerdekaan. Daerah otonom diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.⁶ Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah. Artinya, Daerah harus dipandang dalam 2 (dua) kedudukan, yaitu:

- (a) Sebagai organ Daerah untuk melaksanakan tugas- tugas otonomi; dan
- (b) Sebagai agen Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan Pusat di Daerah.

Secara teoritis, otonomi yang diberikan dan ruang lingkupnya, diidentifikasi oleh para ahli ke dalam 3 (tiga) ajaran, yaitu formil, materiil, dan nyata (riil). Keseluruhan ajaran itu menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pertama, dalam sistem otonomi formil, pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab antara Pusat dan Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak dirinci di dalam undang-undang. Basis ajaran ini adalah tidak ada perbedaan sifat urusan yang diselenggarakan oleh Pusat dan Daerah. Sistem ini memberi keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri. Jadi, titik berat sistem otonomi formil adalah pertimbangan daya guna dan hasil guna pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab.

Kedua, sistem otonomi materiil memuat secara rinci pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab antara Pusat dan Daerah.

6 Ateng Syafruddin, 1984, Pasang Surut Otonomi Daerah, Jakarta: Binacipta, hlm24

Basis ajaran ini adalah adanya perbedaan mendasar antara urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jadi, urusan-urusan pemerintahan dianggap dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan.⁷

Ketiga, sistem otonomi riil dianggap sebagai kompromi antara kedua sistem terdahulu. Dalam sistem ini, penyerahan urusan kepada Daerah otonom didasarkan pada faktor-faktor riil. Di samping itu, sifat kompromistis nampak karena sistem ini mengutamakan sistem otonomi formil yang mengandung gagasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian bagi Daerah; sedangkan sistem otonomi materiil nampak dengan adanya urusan pangkal yang diserahkan dan dikembangkan kepada Daerah.⁸

Bidang-bidang kewenangan yang dimiliki baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada prinsipnya meliputi 4 (empat) bidang, yaitu (a) Pengaturan; (b) Pengurusan; (c) Pembinaan; dan (d) Pengawasan. Bidang kewenangan pengaturan mencakup kewenangan untuk membuat aturan, pedoman, norma, maupun standar. Pemerintah membuat pengaturan hal-hal yang bersifat nasional maupun internasional. Provinsi memiliki kewenangan pengaturan yang bersifat regional, sedangkan Kabupaten/Kota memiliki pengaturan yang bersifat lokal.

Bidang pengurusan dapat dilakukan baik oleh Pemerintah, Propinsi, maupun Kabupaten/Kota. Bidang kewenangan pembinaan mencakup upaya-upaya pemberdayaan institusi Pemerintah, nonpemerintah maupun masyarakat agar menjadi makin mandiri. Sedangkan kewenangan pengawasan mencakup tindakan untuk menegakkan aturan, norma, dan standar yang telah disepakati.

Dalam perspektif lain, Asep Warlan Yusuf⁹ memvisualisasikan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana tabel di bawah ini :

7 Moh. Mahfud M.D., 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, hlm 97

⁸ Ibid, hlm 33

⁹ Asep Warlan.2004. Wewenang Daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bandung

Tabel I
Penyelenggaraan Asas-asas
Pemerintahan

| No | Asas | Sifat Pemberian Kewenangan | Pusat | Wilayah | Daerah |
|----|------------------|----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | Desentralisasi | Penyerahan | - Pengawasan - Pengendalian - Pertanggung-jawaban umum | - Koordinasi - Pengawasan | - Kebijakan - Perencanaan - Pelaksanaan - Pembiayaan (di luar gaji PNS) |
| 2 | Dekonsentrasi | Pelimpahan | - Kebijakan - Perencanaan - Pembiayaan - Pengawasan | Koordinasi | - Menunjang - Melengkapi |
| 3 | Tugas Pembantuan | Pengikutsertaan | - Kebijakan - Perencanaan - Pelaksanaan - Pembiayaan - Pengawasan | Koordinasi | Membantu Pelaksanaan |

3. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Pengertian “*kewenangan*” menurut bahasa Indonesia, mengandung arti: (a) Hal wewenang, dan (b) Hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata “*wewenang*” mengandung arti: (a) Hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, dan (2) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014, meliputi : politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Dengan melihat ruang lingkup kewenangan Daerah di atas, dapat dipastikan, urusan membuat Peraturan Daerah termasuk dalam urusan otonomi daerah.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu *mandat* dan *delegasi*¹⁰. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat, yang beralih hanya sebagian wewenang. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban tetap pada *pemberi mandat*.

Dalam pelimpahan wewenang secara *delegasi*, yang beralih adalah seluruh wewenang dari *delegans*. Sehingga apabila ada penuntutan, maka yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah *delegataris*.

Menurut Muchsan, kewenangan diperoleh melalui 2 (dua) cara, yaitu; *kewenangan atributif* dan *kewenangan non atributif*. Kewenangan yang bersifat *atributif (orisinal)* yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan. *Kewenangan atributif* bersifat permanen atau tetap ada selama undang-undang mengaturnya. Misalnya Presiden berhak membuat Rancangan Undang-Undang. Kewenangan ini secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Gubernur berhak membuat Peraturan Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Keabsahan dari kewenangan ini tidak perlu dipertanyakan atau diperdebatkan, karena sumbernya dari peraturan perundang-undangan.

Terdapat 4 (empat) sistem pembagian kewenangan menurut Muhammad Abud Musa'ad¹¹, Pertama, sistem residu, secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas-tugas yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga Daerah. Sistem ini umumnya dianut oleh negara-negara di daratan Eropa seperti Perancis, Belgia, Belanda dan sebagainya. Kebaikan sistem ini terutama terletak pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, Pemerintah Daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari Pusat.

¹⁰ Istilah dalam mandate (mandans = yang melimpahkan mandat, mandataris = yang mendapat mandat) istilah dalam delegasi (delegans = yang melimpahkan delegasi, delegataris = yang mendapat delegasi)

¹¹ Muhammad Abud Musa'ad, Penguatan Otonomi Daerah di Balik Bayang-Bayang Ancaman Disintegrasi, Penerbit ITB, 2002, hlm.28

Sebaliknya, sistem ini dapat pula menimbulkan kesulitan mengingat kemampuan Daerah yang satu berbeda dengan yang lainnya tidak sama dalam pelbagai lapangan atau bidang. Akibatnya bidang atau tugas yang dirumuskan secara umum ini dapat menjadi terlalu sempit bagi Daerah yang kapasitasnya besar, atau sebaliknya terlalu luas bagi Daerah yang kemampuannya terbatas.

Kedua, sistem material. Dalam sistem ini, tugas Pemerintah Daerah ditetapkan satu persatu secara limitatif atau terinci. Selain dari tugas yang telah ditentukan, merupakan urusan Pemerintah Pusat. Sistem ini lebih banyak dianut oleh negara-negara Anglo Saxon, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Cara ini kurang begitu fleksibel, karena setiap perubahan tugas dan wewenang Daerah baik yang bersifat pengurangan maupun penambahan, harus dilakukan melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit. Hal ini tentunya akan menghambat kemajuan bagi Daerah yang mempunyai inisiatif/prakarsa, karena mereka harus menunggu penyerahan yang nyata bagi setiap urusan. Kadang-kadang suatu urusan menjadi terbengkalai, tidak diurus oleh Pemerintah Pusat dan tidak pula oleh Pemerintah Daerah. Sistem ini pernah diatur oleh Negara Republik Indonesia pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Staatblad Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950.

Ketiga, sistem formal. Dalam sistem ini urusan yang termasuk dalam urusan rumah tangga Daerah tidak secara apriori ditetapkan dalam atau dengan undang-undang. Daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi, urusan yang telah diatur dan diurus oleh Pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya, tidak boleh diatur dan diurus lagi oleh Daerah. Dengan perkataan lain, urusan rumah tangga Daerah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (*hierarchische taakafbakening*).

Keempat, sistem riil. Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada Daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil,

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari Daerah maupun Pemerintah Pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada keadaan yang riil di dalam masyarakat, maka kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan melihat kepada kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri, sebaliknya bilamana dipandang perlu, suatu urusan dapat diserahkan kembali kepada Pemerintah Pusat atau ditarik kembali dari Daerah. Sistem ini dianut oleh Negara Republik Indonesia pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1956 (disempurnakan) dan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan), dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.

4. Hukum Keuangan Negara

1) Pengertian

Pemahaman terhadap Hukum Keuangan Negara harus dimulai dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian keuangan negara. Terdapat cukup banyak variasi pengertian keuangan negara, tergantung dari aksentuasi terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberian definisi dari para ahli di bidang keuangan negara. Berikut ini akan ditunjukkan beberapa pengertian dari keuangan negara.

- 1) Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah *rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka, di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.*
- 2) Menurut Geodhart, keuangan negara adalah *keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan Pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.*

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi :

- a) periodik,

- b) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran,
 - c) pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan
 - d) bentuk anggaran negara berupa undang-undang.
- 3) Menurut van der Kemp, keuangan negara adalah *semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.*
- 4) Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah *semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*

Pendekatan yang dipergunakan untuk merumuskan definisi stipulatif keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

- 5) Dari sisi objek. Keuangan negara meliputi *semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*
- 6) Dari sisi subjek. Keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas, yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- 7) Dari sisi proses. Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

- 8) Dari sisi tujuan. Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Definisi yang dianut oleh Undang-Undang Keuangan Negara menggunakan pendekatan luas, dengan tujuan : (1) terdapat perumusan definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multiinterpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran, (2) agar tidak terjadi kerugian negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan undang- undang, dan (3) memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi mal administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.

2) Ruang Lingkup

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara meliputi :

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum;
- 3) Kewajiban negara membayar tagihan pihak ketiga;
- 4) Penerimaan negara;
- 5) Pengeluaran negara;
- 6) Penerimaan Daerah;
- 7) Pengeluaran Daerah;
- 8) Kekayaan Negara/Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/Daerah;
- 9) Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
- 10) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.

Kesepuluh kelompok pengertian kekayaan negara tersebut menyebabkan pengertian kekayaan negara yang harus diperiksa oleh BPK berkembang menjadi sangat luas, termasuk juga kekayaan pihak lain yang diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah. Bahkan, kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum dikategorikan pula sebagai kekayaan Pemerintah yang harus diperiksa BPK (Asshiddiqie, 2004:157).

5. Hubungan antara Pusat dan Daerah

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat Pemerintah, serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan Daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya (Devas, 1989: 179). Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Sebagaimana diatur didalam pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Termasuk sebagaimana diatur didalam pasal 189 Pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berlaku maka Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instrumen yang dipergunakan dalam perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah Perimbangan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah :

- 1) Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 2) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah;
- 3) Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah;
- 4) Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah dan
- 5) Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu:

- 1) mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien,
- 2) mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah,
- 3) mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta
- 4) harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Pembagian keuangan antara Pusat dan Daerah merupakan konsekuensi dari otonomi Daerah, yang secara tegas diakui dalam Pasal 18, 18 A, dan 18 B Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah ditujukan agar Daerah dapat melaksanakan kewenangan otonominya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Daerah. Di sisi lain, Pemerintah Pusat juga bertumpu pada masyarakat di Daerah dalam memperoleh sumber-sumber keuangan melalui pajak, retribusi dan sebagainya. Dengan demikian, alokasi anggaran oleh Pusat kepada Daerah sebenarnya merupakan wujud tanggungjawab Pemerintah kepada masyarakat di Daerah yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Ada empat kriteria yang perlu dipergunakan sebagai acuan untuk menjamin sistem hubungan antara Pusat dan Daerah (Davey, 1980: 14).

- 1) Sistem tersebut seharusnya memberikan kontribusi kekuasaan yang rasional di antara tingkat pemerintahan mengenai penggalan sumber-sumber dana Pemerintah dan kewenangannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi;
- 2) Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- 3) Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran

Pemerintah secara adil di antara daerah-daerah atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu; dan

- 4) Pajak atau retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran Pemerintah dalam masyarakat.

6. Manajemen Pendapatan Daerah

Sistem pemerintahan yang sentralistik yang dialami bangsa Indonesia selama masa Orde Lama dan Orde Baru memberikan pelajaran kepada kita bahwa pendekatan sentralistik dalam pembangunan telah menimbulkan efek yang negatif. Efek negatif tersebut misalnya sentralisasi telah memasung kreativitas Daerah untuk mengembangkan potensi Daerah sesuai dengan keinginan masyarakat Daerah. Selain itu, sentralisasi telah menyebabkan Pemerintah Daerah semakin kuat tingkat ketergantungannya terhadap Pemerintah Pusat. Kedua hal tersebut cukup membuat Pemerintah dan masyarakat Daerah tidak berdaya membangun daerahnya.

Besarnya intervensi Pemerintah Pusat yang dilakukan pada masa lalu telah menimbulkan distorsi. Hal tersebut diperparah dengan masih kuatnya perilaku rent seeking dan korupsi yang akibatnya mengganggu mekanisme pasar. Efek tersebut masih terasa sampai saat ini. Secara umum Pemerintah Daerah masih mengalami banyak masalah di antaranya:

- 1) Ketidakcukupan sumberdaya finansial;
- 2) Minimnya jumlah pegawai yang memiliki ketrampilan dan keahlian;
- 3) Prosedur dan sistem pengendalian manajemen yang tidak memadai;
- 4) Rendahnya produktivitas pegawai;
- 5) Political will yang rendah;
- 6) Adanya benturan budaya (SARA) yang destruktif;
- 7) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan
- 8) Lemahnya akuntabilitas publik.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan Daerah, antara lain:

- 1) Inefisiensi;
- 2) Infrastruktur yang kurang mendukung;
- 3) Lemahnya perangkat hukum aparat penegak hukum dan peraturanhukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum;
- 4) Tingginya tingkat kebutuhan Daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki Daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*;
- 5) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah;
- 6) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum;
- 7) Berkurangnya dana bantuan dari Pusat (DAU dari Pusat yang tidak mencukupi); dan
- 8) Belum diketahui potensi pendapatan asli daerah yang mendekati kondisi riil.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari Pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan Daerah (*local discretion*). Langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah yang riil dimiliki Daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi pendapatan asli daerah yang sistematis dan rasional.

Upaya peningkatan kapasitas fiskal Daerah (*fiscal capacity*) sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan pendapatan asli daerah. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan Daerah. Oleh karena itu tidak perlu dibuat dikotomi antara pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan. Namun juga perlu dipahami bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya.

Anggaran yang dibuat besar jumlahnya namun tidak dikelola dengan baik (tidak memenuhi prinsip *value for money*) justru akan menimbulkan masalah, misalnya kebocoran anggaran. Yang terpenting adalah optimalisasi anggaran, karena peran Pemerintah Daerah nantinya lebih bersifat sebagai fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di Daerah.

Masyarakat Daerah sendiri (termasuk swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dan sebagainya) yang akan banyak berperan membangun daerahnya sesuai dengan kepentingan dan prioritas mereka.

Pemerintah Daerah seringkali dihadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal Daerah (fiscal need) sementara kapasitas fiskal Daerah tidak mencukupi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal- (fiscal gap). Manajemen pendapatan asli daerah terkait dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal Daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal Daerah perlu dilakukan manajemen pengeluaran Daerah secara komprehensif, salah satu caranya adalah dengan membuat standar biaya (misalnya Standar Analisa Belanja).

7. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan asli daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- 1) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua objek pajak, seperti orang badan, benda bergerak/tidak bergerak;
- 2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata;
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain laba deviden, penjualan saham milik Daerah; dan
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro.

Menurut Mahi (2000:58-59), pendapatan asli daerah belum bisa diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama otonomi Daerah Kabupaten/Kota, disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- (1) Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah. Pajak/retribusi yang ditetapkan untuk Daerah Kabupaten/Kota memiliki basis pungutan yang relatif kecil dan sifatnya

bervariasi antar daerah. Daerah pariwisata dan daerah yang memiliki aktivitas yang luas akan menikmati penerimaan pendapatan asli daerah yang besar.

Sementara daerah terpencil dan daerah pertanian akan menikmati penerimaan pendapatan asli daerah yang relatif kecil;

- (2) Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan Daerah. Sebagian besar penerimaan Daerah masih berasal dari bantuan Pusat dalam bentuk dana bagi hasil, bantuan dan subsidi. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha Daerah dalam pemungutan pendapatan asli daerahnya, dan Daerah lebih mengandalkan kemampuan negosiasinya terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan;
- (3) Kemampuan administrasi pemungutan di Daerah masih rendah Pemungutan pajak di Daerah cenderung dibebani dengan biaya pungut yang besar dan pengelolaan pendapatan asli daerah ditetapkan berdasarkan target. Akibatnya beberapa Daerah lebih condong memenuhi target, walaupun dari segi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dapat melampaui target yang telah ditetapkan; dan
- (4) Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah serta belum adanya keseragaman penatausahaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat mengakibatkan belum optimalnya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Bahkan bagi daerah yang masih menatausahakan secara manual, besar kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar.

8. Pajak Daerah.

Terminologi “Pajak daerah” menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri retribusi daerah adalah :

- 1) Pungutan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;

- 2) Pembayaran pajak daerah harus masuk Kas Daerah;
- 3) Pihak yang membayar pajak daerah mendapatkan tidak memperoleh imbalan jasa secara langsung dari Daerah;
- 4) Pajak daerah sifatnya memaksa; dan
- 5) Sanksi yang dikenakan pada pajak daerah adalah sanksi administrasi sampai dengan sanksi pidana.

Prinsip dasar retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah, yang pada hakekatnya merupakan iuran masyarakat kepada Daerah, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dalam hal ini, wajib pajak tidak mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat dinikmati. Hal ini menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat secara sewenang-wenang menetapkan tarif pajak. Pajak daerah diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

9. Retribusi Daerah

Terminologi “Retribusi daerah” menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ciri-ciri retribusi daerah adalah :

- 1) Pungutan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
- 2) Pembayaran retribusi daerah harus masuk Kas Daerah;
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi atau imbal jasa secara langsung dari Daerah;
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh pribadi atau Badan; dan
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu apabila tidak membayar retribusi, maka yang bersangkutan tidak akan memperoleh jasa dari Pemerintah Daerah.

Prinsip dasar retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah, yang pada hakekatnya merupakan iuran masyarakat kepada Daerah, dimana pemerintah harus memberikan pelayanan. Dalam hal ini, wajib retribusi mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat dinikmati. Hal ini menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum, sehingga Pemerintah Daerah didalam menetapkan tarif retribusi untuk menutup sebagian atau seluruhnya atas layanan yang diberikan. Retribusi daerah diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Perbedaan antara retribusi daerah dengan pajak daerah dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Perbedaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah

| No. | Subjek | Retribusi Daerah | Pajak Daerah |
|-----|--------------------|---|---|
| 1. | Kontra prestasi | Langsung | Tidak langsung |
| 2. | Balas jasa Pemda | Berlaku secara khusus, dinikmati oleh si pembayar | Berlaku secara umum |
| 3. | Sifat pemungutan | Hanya berlaku untuk pihak tertentu | Bersifat umum terhadap yang memenuhi syarat |
| 4. | Sifat pelaksanaan | Paksaan bersifat ekonomis | Paksaan bersifat yuridis |
| 5. | Lembaga pemungutan | Pemerintah Daerah | Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menggolongkan pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam :

a) Pajak Daerah Propinsi :

- PKB,
- BBNKB,
- PAB,
- PBBKB,
- PAP,

- Pajak Rokok dan
- Opsen Pajak MBLB.

b) Pajak Daerah KOTA / Kota :

- PBB-P2,
- BPHTB,
- PBJT,
- Pajak Reklame,
- PAT,
- Pajak MBLB,
- Pajak Sarang Burung Walet,
- Opsen PKB dan
- Opsen BBNKB.

c) Retribusi Daerah

- Jasa Umum
 - pelayanan kesehatan,
 - pelayanan kebersihan,
 - pelayanan parkir di tepi jalan umum,
 - pelayanan pasar dan
 - pengendalian lalu lintas
- Retribusi Jasa Usaha
 - penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya,
 - penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan

menggunakan kendaraan di air,

- penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

- Retribusi Perizinan Tertentu.

- Persetujuan bangunan gedung
- penggunaan tenaga kerja asing; dan
- pengelolaan pertambangan rakyat.

Kriteria penetapan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1) Retribusi jasa umum :

- a) Objek pelayanan adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- b) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
- c) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- d) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- e) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- f) Penyelenggaraan retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional;
- g) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
- h) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Retribusi jasa usaha :

- a. Objek pelayanan adalah pelayanan yang menganut prinsip komersial,

yang meliputi (1) pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (2) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;

- b. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan
- c. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial, yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

3) Retribusi perizinan tertentu :

- a. Objek retribusi adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- b. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- c. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- d. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar, sehingga layak dibiayai dari retribusi.

10. Asas-asas dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam rangka penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi serta berbagai teori dan hukum positif yang mengatur tentang pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan retribusi daerah, maka asas- asas yang melandasinya meliputi :

- a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, perlu adanya kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tebing Tinggi.

b. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

d. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

e. Asas efisiensi berkeadilan

Yaitu asas yang mendasari penyelenggaraan retribusi daerah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan.

f. Asas efektivitas

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dalam hal ini, penyelenggaraan retribusi daerah harus dilakukan secara efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat.

g. Asas keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara distribusi kewenangan dan pendanaannya.

h. Asas desentralisasi

Adalah penyelenggaraan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah, serta mempertimbangkan potensi daerah yang dimiliki.

B.Praktik Empirik

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Pentingnya posisi keuangan Daerah disadari oleh Pemerintah Pusat, sehingga kepada Daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang memadai agar Daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - a) hasil pajak Daerah;
 - b) hasil retribusi Daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan seperti bagian laba Badan Usaha Milik Daerah baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah serta hasil kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; dan
 - d) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah yang meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;
- e) Transfer Ke Daerah, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.
- f) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, antara lain hibah atau dana darurat dari Pemerintah Pusat.

Fakta hukum menunjukkan bahwa dari sumber-sumber pendapatan Daerah tersebut, terutama retribusi daerah, pada umumnya sumbangan pendapatan asli Daerah terhadap APBD rendah¹². Kondisi ini mendorong Pemerintah Daerah menetapkan berbagai jenis pungutan retribusi baru, yang kontra produktif terhadap iklim investasi Daerah sehingga dibatalkan oleh Pemerintah. Alasan pembatalan Peraturan Daerah bidang retribusi adalah : (1) Bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu : tumpang tindih dengan pajak Pusat, pengaturannya bias karena ditetapkan sebagai retribusi, padahal dasar pungutannya bersifat pajak, pungutan retribusi namun tidak berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan, dan substansi yang diatur bukan kewenangan Daerah; dan (2) Bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu : menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat keluar-masuknya barang antar daerah, dan menghambat ekspor termasuk menghambat iklim investasi.

Responsibilitas (*responsibility*) adalah standar profesional dan kompetensi yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menjalankan pelayanan publik. Berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan adanya tolok ukur terhadap kinerja birokrasi berupa standar pelayanan minimum (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) untuk pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mengacu pada pendapat **William Mitchel** sebagaimana dikutip oleh Josef Riwu Kaho, maka pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah meliputi ¹³:

- a. Mobilization of resources;*
- b. Allocation of resources;*
- c. Distribution of benefits;*
- d. Distribution of burdens or costs;*
- e. Rules and regulations; and*
- f. Division and stabilizations.*

¹² M. Kuncoro dalam Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan, Prisma, No. 4, hlm. 3- 17 telah mengamati masalah rendahnya pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah di 27 provinsi di Indonesia selama tahun 1984/1985-1990/1991, sehingga menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat.

¹³ Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1988, hlm. 80.

Responsivitas (responsiveness) adalah pertanggungjawaban dari sisi penerima pelayanan atau masyarakat, sejauhmana masyarakat melihat bahwa Pemerintah Daerah bersikap tanggap (responsive) terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka dalam kerangka desentralisasi dan demokratisasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Daerah lebih bersifat aspiratif dan partisipatif.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka masyarakat sebagai bagian dari lokalitas berhak untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah berupa tindakan melaporkan, mengajukan keberatan dan mengajukan gugatan baik secara individu maupun melalui perwakilan kelompok (classaction) serta melakukan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Adanya fungsi pengawasan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah menyebabkan timbulnya masyarakat yang berdaya, mandiri secara politik, ekonomi dan sosial, terbuka dan egaliter.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi Daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat Daerah, baik sebagai satu kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga tanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya merupakan tanggungjawab Pemerintah semata, melainkan juga tanggungjawab masyarakat.

Salah satu bentuk perwujudan rasa tanggungjawab masyarakat adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui partisipasi aktif masyarakat baik dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, maupun evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Investasi merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. Besarnya sumberdaya alam suatu Daerah tidak akan berarti banyak, apabila tidak terdapat cukup investasi atau penanaman modal untuk mengembangkan potensi sumberdaya alam tersebut. Investasi yang ditanamkan di Daerah terdiri

dari investasi domestik dan investasi asing, yang meliputi investasi portofolio (portofolio investment) dan investasi langsung (foreign direct investment) oleh perusahaan multinasional.

Investasi portofolio (portofolio investment) adalah penanaman modal asing yang berlangsung melalui bursa saham (stock exchange), dimana para investor membeli saham-saham yang menurut mereka prospektif dan menguntungkan.

Dalam praktik, modal asing yang masuk dalam bentuk portofolio sangat rentan terhadap perubahan, karena para investor dapat memindahkan modal dengan melepas saham-saham yang dimiliki. Investasi langsung (foreign direct investment) adalah penanaman modal asing yang berlangsung melalui pembangunan unit-unit produksi langsung di Daerah dimana investasi ditanamkan. Adanya investasi langsung dapat menguntungkan Daerah dalam mengelola potensi sumberdaya alam (natural resource endowments) yang dimiliki, bersifat jangka panjang, dan secara langsung menimbulkan multiplier effect berupa sumber devisa, peningkatan ekspor nasional, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, alih teknologi (transfer of technology) dan optimalisasi potensi sumberdaya alam di Daerah.

Berkaitan dengan investasi langsung (foreign direct investment), maka perusahaan asing yang berinvestasi di suatu negara harus tunduk pada hukum negara tempat penanaman modal dilakukan, sebagaimana dinyatakan oleh **George Ball** ¹⁴ sebagai berikut :

“Corporation citizen does business outside the country of its nationality by sufferance of the local state, the host government. If a corporate citizen affronts the host it can, like human guest, be expelled and like an innkeeper who impounds the guest laundry, the host government may confiscate whatever immovable property the guest company leaves behind the process euphemistically described as nationalization, expropriation or more recently, a gradually increasing participation. There is no doubt that the host government has the power to tax, regulate, expropriate, and expell any company that does business within its borders. It is because the host government has control power”.

Kewajiban perusahaan asing dalam rangka foreign direct investment untuk tunduk pada hukum negara tempat penanaman modal dilakukan, terdapat dalam Kode Etik (Code of Conduct) Perusahaan Multinasional yang

¹⁴ Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional dan Integrasi dan Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 130.

tercantum dalam *Declaration on the Establishment of a New International Economic Order paragraph 4 (g)* ¹⁵, yang berbunyi:

“The right to control transnational corporations is one of the fundamental principles of the new order : The New international economic order should be founded on full respect for the following principles :

(g) regulation and supervision of the activities of transnational corporations by taking measures in the interest of the national economies of the countries where such transnational corporations operate on the basis of the full sovereignty of those countries”.

Tujuan pengelolaan investasi Daerah adalah ¹⁶:

- a) untuk menggairahkan dan meningkatkan investasi Daerah;
- b) mendorong efek berantai (multiplier effect) dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c) mengurangi birokrasi dan biaya perizinan investasi;
- d) mengoptimalkan pemanfaatan asset atau potensi ekonomi Daerah; dan
- e) meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan Daerah.

Dalam rangka mendorong investasi serta menciptakan iklim kondusif bagi investasi di Daerah, baik investasi baru maupun investasi berkelanjutan serta kegiatan usaha ekonomi lainnya di Daerah, maka Daerah harus meningkatkan daya saing yang dimilikinya melalui perubahan kebijakan-kebijakan antara lain:

- a. Regulasi perizinan. Perizinan hendaknya tidak dijadikan hanya untuk tujuan dan motivasi untuk memperoleh pendapatan asli Daerah semata yang berakibat kontraproduktif dan mendistorsi iklim investasi yang kondusif, tapi harus ditujukan sebagai sarana untuk menarik investasi asing agar bersama-sama swasta nasional dan lokal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas.

¹⁵ Ibid, hlm. 195-196.

¹⁶ Doli D. Siregar, *Manajemen Aset : Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2004, hlm. 524.

Regulasi perizinan harus menghasilkan penanganan perizinan dengan mekanisme yang tidak birokratis, cepat dan sederhana, melalui sistem pelayanan satu atap.

Dalam kaitan itu, berbagai kebijakan lokal yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan produk hukum Daerah lainnya baik yang berbentuk ketetapan (*beschikking*), peraturan kebijakan (*beleidregels, pseudowetgeving*) atau peraturan delegasi (*delegated legislation*) harus mendukung terciptanya iklim investasi dan perekonomian Daerah yang kondusif. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian perangsang investasi (insentif), kemudahan berinvestasi, pembebasan hambatan tarif atau non tarif perdagangan, menghindari pungutan ganda, pajak berganda, bebas diskriminasi, jelas objek pungutannya, punya tolok ukur yang jelas serta menjamin kepastian hukum¹⁷.

- b. Regulasi legislasi Daerah mengenai pemanfaatan sumberdaya alam dan tata ruang. Legislasi Daerah harus ditetapkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan tidak hanya untuk pertimbangan sesaat.

Rencana tata ruang hendaknya tidak hanya dilihat sebagai aspek prosedural dalam penyelenggaraan pembangunan, tetapi juga sebagai kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran pembangunan, dengan mewujudkan mekanisme prosedur yang tepat dan efektif, terutama dalam penggunaan lahan, baik bagi kepentingan Pemerintah, masyarakat maupun swasta. Beberapa hal yang harus digaris-bawahi adalah¹⁸:

¹⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, Harian Kompas yang terbit pada tanggal 24 Nopember 2001 dan 26 Nopember 2002 memberitakan adanya sejumlah peraturan daerah yang keberadaannya dinilai bermasalah, antara lain karena tidak mendukung iklim usaha dan perekonomian daerah. Selanjutnya Harian Kompas yang terbit pada tanggal 15 Januari 2003 memberitakan tentang peraturan daerah yang tidak probisnis, karena mengharuskan pelaku bisnis membayar berbagai jenis pungutan pajak dan retribusi, sehingga menekan proses keberlangsungan dan berkembangnya penanaman modal di daerah. Berbagai persyaratan investasi yang diatur dalam peraturan daerah bahkan menjadi penghambat dan mahalny suatu investasi.

¹⁸ Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Cides, Jakarta, 1996, hlm. 433-434.

- 1) Perlunya pemahaman secara penuh dan utuh tentang kebijaksanaan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi di Daerah dalam penataan ruang serta penerapannya secara arif, agar pemerintah, swasta dan masyarakat paham akan hak dan tanggungjawabnya untuk meningkatkan manfaat penataan ruang;
 - 2) Diperlukan kerangka hukum yang jelas, konsisten dan komprehensif. Sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pembangunan dan penataan ruang di kawasan pedesaan dan perkotaan harus terpadu dan transparan, sehingga memungkinkan seluruh masyarakat termasuk dunia usaha ikut serta mengembangkannya dalam pelaksanaan;
 - 3) Perlu mengantisipasi masa yang akan datang, dimana pembangunan yang berkualitas dapat mengatasi masalah keterbatasan sumberdaya alam, modal dan teknologi;
 - 4) Karena kota akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang utama, maka penataan ruang kota perlu diarahkan pada pola pembangunan per kotaan yang mempunyai kesesuaian tinggi dengan sistem sosial budaya, sistem sosial ekonomi dan sistem ekologis, sehingga mampu meningkatkan manfaat nyata dan mengurangi beban sosial bagi masyarakat;
 - 5) Sebagai pusat pelayanan, KOTA harus mampu memberikan pelayanan kebutuhan ruang bagi masyarakat;
 - 6) Penataan ruang harus mengacu kepada pemberdayaan ekonomi rakyat dan kemitraan dalam pembangunan, sehingga dapat menjamin kemakmuran bagi masyarakat; dan
 - 7) Pemanfaatan ruang harus berwawasan lingkungan, artinya menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan;
- c. Fasilitasi dalam pengurusan hak di bidang pertanahan. Walaupun kewenangan Daerah di bidang pertanahan terbatas, namun untuk meningkatkan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lain, maka Pemerintah Daerah harus memberikan fasilitasi kepada investor dalam

pengurusan hak di bidang pertanahan, sebagai satu komponen investasi terpenting;

- d. Membangun infrastruktur Daerah seperti bandara, pelabuhan, jalan, listrik, air, dan sarana telekomunikasi, dalam rangka memperluas akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan keunggulan komparatif Daerah dalam persaingan pasar serta perdagangan domestik dan global;
- e. Meningkatkan pemantapan kapasitas (*capacity building*) dan pengembangan sumberdaya manusia (*human resource development*) bagi para pejabat di Daerah baik dari segi integritas, intelektual maupun kemampuan teknis dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya agar dapat menggali sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan daerah, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, termasuk investasi. Para pejabat di daerah harus mampu bertindak sebagai entrepreneur, katalis, koordinator, fasilitator dan stimulator bagi lahirnya inisiatif pembangunan ekonomi Daerah.

Dengan sumberdaya manusia aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, **Kenichi Ohmae** meramalkan bahwa di masa depan yang berperan dalam kehidupan masyarakat bukan Pemerintah Pusat, tapi Pemerintah Daerah (*local government*);

- f. Melakukan promosi secara aktif ke negara-negara yang potensial investasinya dengan menunjukkan keunggulan Daerah dalam sistem perpajakan, perburuhan serta jaminan keamanan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, perlu perubahan paradigma para pejabat di Daerah dari birokrat yang pasif menjadi entrepreneur yang aktif menjual potensi daerahnya dengan semangat wirausaha kepada investor global, regional, nasional dan lokal. Dengan adanya investor, maka ekonomi Daerah akan meningkat, terdapat penyerapan tenaga kerja, nilai tambah, profit, pajak dan multiplier effect untuk Daerah;
- g. Membangun jejaring kerja (*networking*) dengan asosiasi pengusaha, lembaga swadaya masyarakat (*non government organization*), Perguruan Tinggi, perbankan dan shareholders lainnya dalam upaya meningkatkan investasi di Daerah;

- h. Meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral dengan Pemerintah Daerah setingkat di luar negeri yang prospektif di bidang investasi, baik dalam bentuk provinsi kembar (*sister province*) maupun KOTA/KOTA kembar (*sister city*). Kerjasama antar Pemerintah Daerah (government to government) tersebut selanjutny ditindaklanjuti dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta (*government to privat*) dan/atau antara swasta dengan swasta negara-negara tersebut (*privat to privat*); dan
- i. Optimalisasi aset Daerah dalam pengembangan investasi di Daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

**A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis pajak, yaitu 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak KOTA/kota. Selain itu, KOTA/Kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. undang-undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut.

Terkait dengan retribusi, undang-undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut Daerah secara close list.

Baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan hanya untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah mengatur lebih rinci tata cara pemungutan pajak daerah dan bersifat close list.

Hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi Daerah Kabupaten dan Kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari Pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan Pusat dan merintangai arus barang dan jasa antardaerah.

Untuk Daerah Provinsi, jenis pajak yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun, karena tidak adanya kewenangan Provinsi dalam penetapan tarif Pajak, Provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian, ketergantungan Provinsi terhadap dana alokasi dari Pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong Provinsi untuk mengenakan pungutan retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan undang-undang dan kepentingan umum.

Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat

membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah.

Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena undang-undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi.

Basis pajak Kabupaten dan Kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan Provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari Pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak dan retribusi. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan

kegiatan ekspor-impor.

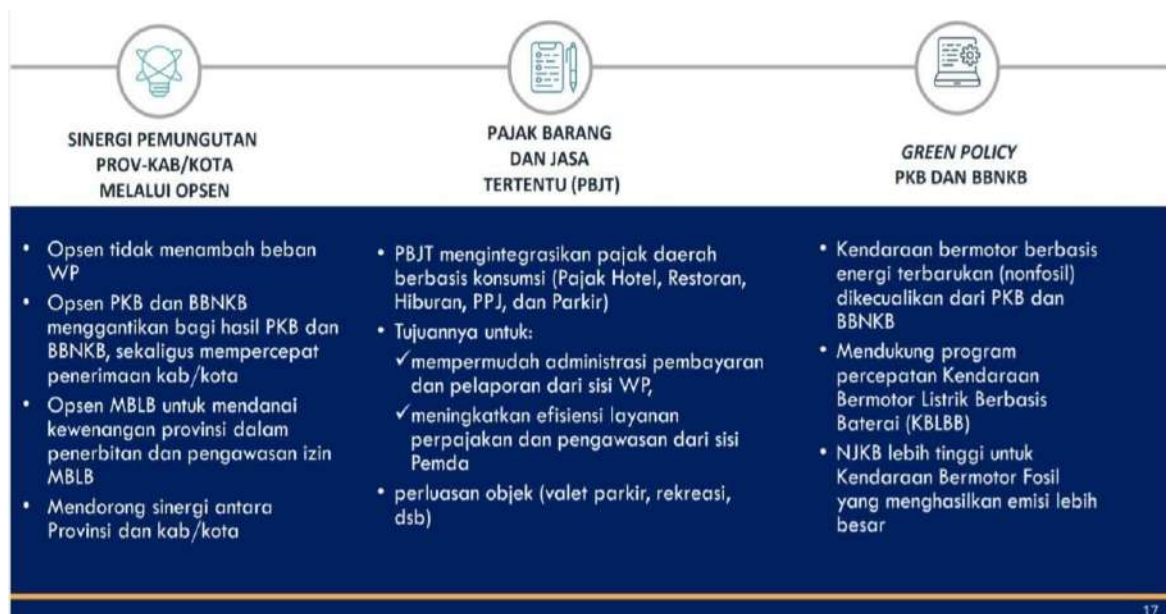
Pungutan seperti retribusi atas izin masuk Kota, retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek pajak atau retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak Pusat dan menambah jenis pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah; Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel dan rumah kos serta jasa akomodasi ; Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan catering.

PAJAK DAERAH

Ada 5 (lima) jenis pajak baru bagi Daerah, yaitu :

- Pajak Propinsi :
 - Pajak Alat Berat
 - Opsen Pajak MBLB
- Pajak KOTA / Kota :
 - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

KETENTUAN PENGATURAN PAJAK DAERAH



Perubahan atau restrukturisasi dan integrasi pajak daerah ditujukan untuk mengurangi administrative dan compliance cost serta optimalisasi pemungutan. Sedangkan skema opsen ditujukan untuk penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan, dengan rincian sebagai berikut :



KETENTUAN PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH

Rasionalisasi jenis retribusi daerah ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif. Adapun rasionalisasi tersebut didalam beberapa substansi harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan rincian sebagai berikut :

Rasionalisasi Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka **efisiensi pelayanan publik** di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun dengan tetap menjaga penerimaan PAD daerah



Dihapuskannya beberapa jenis retribusi bukan berarti Pemda tidak melakukan layanan dimaksud. Layanan publik tersebut tetap dilakukan Pemda namun tanpa pungutan kepada masyarakat.

19

Sedangkan mendasarkan kepada alasan efisiensi pelayanan publik di daerahserta mempertimbangkan kemudahan iklim investasi dan kemudahan berusaha namun tetap menjaga penerimaan PAD dengan dengan rincian penjelasan sebagai berikut :



Dihapusnya beberapa jenis retribusi bukan berarti pemerintah daerah tidak melakukan layanan dimaksud, namun demikian layanan public tersebut tetap dilakukan tanpa pungutan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam perkembangannya jika memungkinkan terdapat penambahan jenis retribusi, maka akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah dimaksud akan mengatur minimal objek, subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif, dan tata cara penghitungan retribusi. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam undang-undang ini sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak Tenaga Listrik sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan;

Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang. Untuk Retribusi, dengan Peraturan Pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sepanjang ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kemampuan Daerah akan terjadi peningkatan PAD karena proses pemungutan Pajak Daerah menjadi telah ditujukan untuk mengurangi administrative dan compliance cost serta optimalisasi pemungutan dan untuk retribusi mendasarkan kepada alasan efisiensi pelayanan publik didaerah serta mempertimbangkan kemudahan iklim investasi dan kemudahan berusaha namun tetap menjaga penerimaan PAD.

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Keterkaitan dengan Raperda yaitu ketentuan Pasal 3 mengenai asas-asas umum penyelenggaraan negara, yang meliputi :

- Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan; dan
- Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 2 menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan negara meliputi :

- Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum;
- Kewajiban negara membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan negara;
- Pengeluaran negara;
- Penerimaan Daerah;
- Pengeluaran Daerah;
- Kekayaan Negara/Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/Daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Pasal 285 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas : Pendapatan asli daerah, yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana perimbangan; dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pasal 286 ayat (1) menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang, yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Pasal 4 menyebutkan bahwa jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah KOTA / Kota adalah :

- PBB-P2,
 - BPHTB,
 - PBJT; (Makanan dan/ atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan)
 - Pajak Reklame,
 - PAT,
 - Pajak MBLB,
 - Pajak Sarang Burung Walet,
 - Opsen PKB, dan
 - Opsen BBNKB.
- Pasal 87 menyebutkan bahwa objek retribusi adalah : (1) jasa umum, yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum; (2) jasa usaha, yang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, dan (3) perizinan tertentu, yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
 - Pasal 87 menyebutkan bahwa jenis digolongkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Jasa Umum meliputi :
 - pelayanan kesehatan;
 - pelayanan kebersihan;
 - pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - pelayanan pasar; dan
 - pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/ atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
 - b. Retribusi Jasa Usaha meliputi :
 - penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- pelayanan jasa kepelabuhanan;
- pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air,
- penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perijinan Tertentu meliputi :

- persetujuan bangunan gedung;
Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.
- penggunaan tenaga kerja asing; dan
Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- pengelolaan pertambangan rakyat.
Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 2 menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan Daerah meliputi:
 1. Hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
 2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

3. Penerimaan Daerah;
 4. Pengeluaran Daerah;
 5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah; dan
 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
- Pasal 31 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri atas:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Daerah ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Pasal 20 menyatakan bahwa :
 1. Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan.
 2. Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, DPRD mempunyai hak:
 - mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada

Badan Pemeriksa Keuangan; dan

- meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pembahasan dan klarifikasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.
- 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan oleh DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

7. Evaluasi Rancangan Perda Pajak dan Retribusi

- a. Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri.
- b. Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
- c. Evaluasi rancangan Perda Kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.
 - Rancangan Perda Kabupaten /kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten /kota dan Walikota/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada prinsipnya, pungutan Daerah dapat dilaksanakan apabila sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota telah mengatur kewenangan Daerah secara enumeratif, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pada prinsipnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Dalam kaitannya dengan Raperda, maka landasan filosofis harus mencerminkan:

1. Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan landasan filosofis Raperda, karena pengaturan retribusi Daerah dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu melaksanakan pembangunan Daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.
2. Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berkaitan dengan kepentingan untuk mengatur menggali sumber pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan dan potensi yang dimiliki, untuk terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara, diatur dengan undang-undang”. Frase “diatur dengan undang-undang” menunjukkan adanya politik hukum pembatasan kekuasaan Pemerintah dalam pengenaan pungutan yang bersifat memaksa, baik berupa pajak maupun non pajak, dalam hal ini retribusi.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan- pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yangdituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yanghidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yangtertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknyadi tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Dalam hal ini, landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu kondisi faktual adanya pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan secara nasional, sehingga harusdilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah yang lama, serta harmonisasi dengan potensi Daerah yang dimiliki.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Rancangan Peraturan Daerah dan hukum positif, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain.

Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Dalam hal ini, landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU Darurat Nomor 9 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang PembentukanPerangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 - 2033

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Raperda tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tebing Tinggi, dengan mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan responsivitas. Disamping itu, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dituntut untuk ramah investasi, sehingga nyaris tidak ada peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi yang baru di luar jenis retribusi daerah yang diatur secara enumeratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

B. Arah Pengaturan

Pengaturan penyelenggaraan retribusi dalam (Rancangan) Peraturan Daerah adalah dalam kerangka mendukung kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui pemungutan retribusi agar Daerah memiliki kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Pentingnya posisi keuangan Daerah merupakan hal yang sangat vital bagi Daerah, sehingga kepada Daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang memadai agar Daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Namun demikian terdapat restriksi dalam pelaksanaannya, yaitu retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran Pemerintah Daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Raperda

1. Judul

Judul Raperda ini yaitu : “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, karena Raperda ini pada intinya mengatur mengenai jaminan kepastian dan ketertiban hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

2. Konsiderans

Konsiderans Peraturan Daerah memuat pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. Untuk itu, bunyi rumusan untuk konsideran menimbang adalah :

- a. Bahwa pajak daerah dan bahwa retribusi daerah adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kelancaran, ketertiban serta kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi Daerah di Kota Tebing Tinggi perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian apabila terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Daerah, maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Terdapat restriksi dalam pencantuman dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi (lihat Lampiran II B.4 angka 39, 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Dengan demikian, maka dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang Undang Darurat Nomor 9 Drt Tahun 1956 tanggal 25 Maret 2003, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
- m. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- n. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 - 2033.

4. Ketentuan Umum

Dalam praktik di Indonesia, “definition clause” atau “interpretation clause” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “preamble” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “definition clause” atau “interpretation clause” yang dikenal di berbagai negara.

Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau BAB.

Ketentuan umum dalam Raperda meliputi :

- a. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi.

- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tebing Tinggi atau satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah.
- h. Badan adalah sekumpulan orang dani atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- i. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- j. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pernbayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- l. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemartfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- m. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- n. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- o. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- p. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan penungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- r. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- s. Masa Pajak ialah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender
- t. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- u. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

- menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- v. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
 - w. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah, berisi keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang
 - x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 - y. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 - z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 - aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 - bb. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

5. Batang Tubuh

a. Jenis Pajak Daerah

1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2),
 - b. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
 - c. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - d. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
 - e. Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 - f. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
 - g. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
 - h. Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang meliputi:
 1. perindahan hak karena:
 - jual beli;
 - tukar-menukar;
 - hibah;
 - hibah wasiat;
 - waris;
 - pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - penunjukan pembeli dalam lelang;

- pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - penggabungan usaha;
 - peleburan usaha;
 - pemekaran usaha; atau
 - hadiah; dan
2. pemberian hak baru karena:
- kelanjutan pelepasan hak; atau
 - di luar pelepasan hak.
- b. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- c. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); (Makanan dan/ atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan)
- a. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)
 - Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
- b. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
- Makanan dan/ atau Minuman;
 - Tenaga Listrik;
 - Jasa Perhotelan;

- Jasa Parkir; dan
 - Jasa Kesenian dan Hiburan.
- c. Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- d. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

4) Pajak Reklame

- a. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 0/0 (dua puluh lima persen).
- b. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame yang meliputi:
- Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
 - Reklame kain;
 - Reklame melekat/ stiker;
 - Reklame selebaran;
 - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - Reklame udara;
 - Reklame apung;
 - Reklame film/ slide; dan
 - Reklame peragaan.
- c. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- d. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

5) Pajak Air Tanah (PAT),

- a. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- c. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- d. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB),
- a. Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - b. Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - asbes;
 - batu tulis;
 - batu setengah permata;
 - batu kapur;
 - batu apung;
 - batu permata;
 - bentonit;
 - dolomit;
 - feldspar,
 - garam batu (halite);
 - grafit;
 - granit/ andesit;
 - gips;
 - kalsit;
 - kaolin;
 - leusit;
 - magnesit; r.mika;
 - marmer;
 - nitrat;
 - obsidian;
 - oker;
 - pasir dan kerikil;
 - pasir kuarsa;
 - perlit;
 - fosfat;
 - talk;
 - tanah serap (fullers earth);
 - tanah diatom;
 - tanah liat;
 - tawas (alum);

- tras;
 - yarosit;
 - zeolit;
 - basal;
- c. Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- d. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- 7) Pajak Sarang Burung Walet,
- a. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/ atau pengusaha sarang Burung Walet.
 - c. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang Burung Walet.
 - d. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);

b. Objek dan Golongan Retribusi

- 1) Objek Retribusi adalah:
- Jasa Umum;
 - Jasa Usaha; dan
 - Perizinan Tertentu.

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

2) Jenis-jenis Retribusi

1. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/ atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
2. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
3. Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

1. Retribusi Jasa Umum

a) Jenis Retribusi Jasa Umum, adalah:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

b) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/ atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis Retribusi Jasa Usaha, adalah :

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat

pelelangan;

- c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan diair,
- i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perijinan Tertentu.

- a. persetujuan bangunan gedung;
Retribusi persetujuan bangunan merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh daerah.
- b. penggunaan tenaga kerja asing;
Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.
Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pernerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pernerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

3) Ketentuan Retribusi

- a. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimaa antara lain:

- 1) Objek Retribusi;
 - 2) Subjek dan Wajib Retribusi;
 - 3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan
 - 4) Tata cara penghitungan Retribusi.
- b. Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antaratingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
- c. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

4) Tata Cara Penghitungan Retribusi

1. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
3. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
4. Rumus dimaksud harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
5. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
6. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

5) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
2. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya

- penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 6. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
 7. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
 8. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
 9. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 10. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 11. Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

6) Penetapan dan Muatan yang Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah penerbitan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

7) Pemungutan Pajak dan Retribusi

1. Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara penerbitan Pajak dan Retribusi.
2. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembedaan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi
3. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi tidak dapat berlaku surut.
4. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- nama, objek, dan subjek Retribusi;
 - jenis Pajak dan Retribusi;
 - cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
 - prinsip ketentuan struktur dan tarif pajak;
 - prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - wilayah pemungutan;
 - penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
 - sanksi administratif;
 - penagihan;
 - penghapusan piutang Pajak dan Retribusi yang kedaluwarsa; dan
 - tanggal mulai berlakunya.
5. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
- Masa Pajak dan Retribusi;
 - pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam

hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau

- tata cara penghapusan piutang Pajak dan Retribusi yang kedaluwarsa.
- 6. Pengurangan dan keringanan diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- 7. Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- 8. Peraturan Daerah untuk jenis Pajak dan Retribusi harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

8) Pemungutan Pajak dan Retribusi

1. Tata Cara Pemungutan

- Pajak dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (SPPT)
- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, dan kartu langganan).
- Dalam hal Wajib Pajak dan Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Pajak dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD untuk pajak dan STRD untuk retribusi.
- Penagihan Pajak dan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

2. Pemanfaatan

- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Pajak dan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Keberatan

- Wajib Pajak dan Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKPD untuk pajak dan atau SKRD untuk retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD / SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- Keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak atau Retribusi dan pelaksanaan penagihan Pajak dan Retribusi.

4. Pengembalian Kelebihan Pembayaran

- Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, harus memberikan keputusan.
- Apabila jangka waktu telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah

lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota

5. Kadaluwarsa Penagihan

- Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- Kadaluwarsa penagihan Retribusi tertangguh jika: (1) diterbitkan Surat Teguran; atau (2) ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- Pengakuan utang Retribusi secara langsung artinya Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayarandan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
- Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- Ketentuan dimaksud adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- Apabila jangka waktu dimaksud telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

9) Pembukuan dan Pemeriksaan

1. Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
2. Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - memberikan keterangan yang diperlukan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

10) Insentif Pemungutan

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11) Penyidikan

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik dimaksud adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Wewenang Penyidik adalah:
 - *Terdapat perbedaan pengaturan mengenai kewenangan PPNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam halini, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berkedudukan sebagai lex specialis, maka Kewenangan PPNS seyogianyaberpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai grund norm pengaturan tentang kewenangan penyidikan, sebagai berikut :*
 - *menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;*
 - *melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;*
 - *menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka;*
 - *melakukan penyitaan benda dan/atau surat;*
 - *mengambil sidik jari dan memotret seseorang;*
 - *memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
 - *mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;*
 - *mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa*

tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.*

4. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

12)Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari :

1. pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain;
2. pengacuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
3. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat didalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak pidana khusus.

Dalam hal ini, rumusan norma dalam Raperda berbunyi :

“Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

13) Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk :

1. menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*);
2. menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*);
3. memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu

Dalam hal ini, rumusan norma Ketentuan Peralihan adalah :

“Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang”.

14) Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai : (1) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah; (2) nama singkat peraturan perundang-undangan; (3) status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan (4) saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Dalam Raperda ini, bunyi Ketentuan Penutup adalah sebagai berikut :

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tujuan pengundangan yaitu :

- Agar secara formal setiap orang dapat dianggap mengenali Peraturan Daerah (een ieder wordt geacht de wet te kennen);
- Agar tidak seorang pun berdalih tidak mengetahuinya (opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende);
- Agar ketidaktahuan seseorang akan Peraturan Daerah tidak memaafkannya (ignorantia iuris neminenexcusat).

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

- Penggabungan pengaturan penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menganut prinsip :
 - Tarif Pajak Daerah dengan menganut prinsip paling tinggi sehingga memberi kesempatan daerah untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat sebagai wajib pajak. Atau juga dapat dijadikan strategi tertentu seperti stimulus berjenjang sehingga pada tahun H yang ditetapkan, akan mampu mendongkrak kekuatan penerimaan Pajak Daerah sebagai komponen PAD yang menjadi parameter kemandirian keuangan daerah.

| No. | UU 28/2009 | Perda yang mengatur | Tarif Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2020 | UU 1/2022 (HKPD) | Tarif UU 1/2022 (HKPD) |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|--|---|
| | Jenis Pajak | | | | |
| 1 | Pajak Hotel * | Perda No. 1 Tahun 2020 Pasal 6 | 10% | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), meliputi objek : Jasa Perhotelan * | 10% |
| 2 | Pajak Restoran * | Perda No. 1 Tahun 2020 Pasal 10 | <ul style="list-style-type: none"> • Omset 10 juta – 60 juta (3%) • Omset 60 juta – 100 juta (5%) • Omset 100 juta – 200 juta (7%) • Omset diatas 200 juta (10%) | Jasa Makanan dan Minuman* | 10% |
| 3 | Pajak Hiburan * | Perda No. 1 Tahun 2020 Pasal 16 | <ul style="list-style-type: none"> • Bioskop (10%) • Pergelaran musik, tari, busana (15%) • Kecantikan, binaraga, demo promosi dan sejenisnya (15%) • Pameran (10%) • Diskotik, karaoke dan sejenisnya (15%) • Siklus, akrobat dan sulap (10%) | Jasa Kesenian dan hiburan* | 10% 40%-70% diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Pemain beliar dan boling (10%) • Pacuan kuda dan balap kendaraan (20%) • Permainan keterampilan/ketangkasan (20%) • Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa (25%) • Pertandingan pusat olah raga dan pusat kebugaran(20%) • Kesenian rakyat/tradisional (5%) | | |
| 4 | Pajak Parkir * | Perda No. 1 Tahun 2020 Pasal 44 | 20% | Jasa Parkir* | 10% |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan * | Perda No. 5 Tahun 2011 Pasal 32 | <ul style="list-style-type: none"> - Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% - Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% - Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% | Jasa Tenaga Listrik* | 3% industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam 1,5% dihasilkansendiri |
| 6 | Pajak Reklame * | Perda No. 5 Tahun 2011 Pasal 25 | 25% | Pajak Reklame* | 25% |
| 7 | Pajak MBLB * | Perda No. 1 Tahun 2020 Pasal 38 | 15% | Pajak MBLB* | 20% 25% khusus untuk daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah KOTA/kota otonom |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet * | Perda No. 5 Tahun 2011 Pasal 56 | 10% | Pajak Sarang Burung Walet* | 10% |
| 9 | Pajak Air Tanah * | Perda No. 5 Tahun 2011 Pasal 50 | 20% | Pajak Air Tanah* | 20% |
| 10 | BPHTB * | Perda No. 5 Tahun 2011 Pasal 62 | a. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk setiap Wajib Pajak | BPHTB* | 5% - Perubahan mendasar bahwa NPOPTKP menjadi Minimal 80.000.000. |

| | | | | | |
|----|----------|-----------------------|--|--------------|---|
| | | | <p>b. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000</p> <p>c. Tarif 5%</p> | | <p>- BPHTB terutang untuk peralihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah sejak ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk</p> |
| 11 | PBB P2 * | Perwa No13 Tahun 2021 | Berdasarkan klasifikasi Perwa No 13 Tahun 2021 | PBB P2* | 0,5% |
| | | | | Opsen PKB* | 66% / jenis pajak baru |
| | | | | Opsen BBNKB* | 66% / jenis pajak baru |

- Tarif retribusi diatur sedemikian rupa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penambahan jenis Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - b. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dimaksud antara lain :
 - Objek Retribusi;
 - Subjek dan Wajib Retribusi;
 - Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan
 - Tata cara penghitungan Retribusi.
 - c. Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Dimana Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
 - d. Tarif retribusi dengan nilai rupiah untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang dan dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
 - e. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. Dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

- f. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya (*lex superior derogat lex inferior*).
- g. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
- h. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- i. Materi muatan yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

B. Pengaturan Penyelenggaraan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah dimaksudkan agar pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan bertanggung gugat.

| No. | Perda No. 1 /2018 Kota Tebing Tinggi | Raperda PDRD Kota Tebing Tinggi |
|-------------------------------------|---|--|
| Retribusi Jasa Umum | | |
| 1 | Ret. Pelayanan kesehatan | Ret. Pelayanan Kesehatan |
| 2 | Ret. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | Ret. Pelayanan Kebersihan |
| 3 | Ret. Pelayanan Pemakaman | Ret. Pelayanan Parkir Tepi Jalan |
| 4 | Ret. Pelayanan Parkir tepi jalan* | Ret. Pelayanan Pasar |
| 5 | Ret. Pelayanan Pasar | |
| 6 | Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor | |
| 7 | Ret. Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran | |
| 8 | Ret. Penyediaan Penyedotan sedot WC | |
| 9 | Ret. Tera Ulang | |
| 10 | Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi | |
| Retribusi Jasa Usaha | | |
| 1 | Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah | Ret. Tempat khusus Parkir |
| 2 | Ret. Tempat khusus Parkir | Ret. Rumah Potong Hewan |
| 3 | Ret. Rumah Potong Hewan | Ret. Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olah raga |
| 4 | Ret. Terminal | Ret. Pemanfaatan Aset Daerah |
| Retribusi Perizinan Tertentu | | |
| 1 | Ret. IMB | Ret. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) |
| 2 | Ret. Izin tempat penjualan minuman beralkohol | Ret. Pengelolaan Pertambangan Rakyat |
| 3 | Ret. Izin Trayek | |
| 4 | Ret. Izin Usaha Perikanan | |

| No. | UU 28/2009 | Perda yang mengatur | UU 1/2022 (HKPD) |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Retribusi Jasa Umum | | | |
| 1 | Ret. Pelayanan kesehatan* | Perda No1. Tahun 2018 | Ret. Pelayanan Kesehatan* |
| 2 | Ret. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan* | Perda No1. Tahun 2018 | Ret. Pelayanan Kebersihan* |
| 3 | Ret. Pelayanan Pemakaman | Belum diatur | Tidak diatur / dihapus |
| 4 | Ret. Pelayanan Parkir tepi jalan* | Perda No1. Tahun 2018 | Ret. Pelayanan Parkir Tepi Jalan* |
| 5 | Ret. Pelayanan Pasar* | Perda No1. Tahun 2018 | Ret. Pelayanan Pasar* |
| 6 | Ret. Cetak KPT & Akta | Belum diatur | Tidak diatur / dihapus |
| 7 | Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor* | Perda No1. Tahun 2018 | Tidak diatur / dihapus |
| 8 | Ret. Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran | Perda No1. Tahun 2018 | Tidak diatur / dihapus |
| 9 | Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta* | Belum diatur | Tidak diatur / dihapus |
| 10 | Ret. Penyediaan Penyedotan sedot WC | Perda No1. Tahun 2018 | Tidak diatur / dihapus |
| 11 | Ret. Pengelolaan Limbah Cair | Belum diatur | Tidak diatur / dihapus |
| 12 | Ret. Tera Ulang* | Belum diatur | Tidak diatur / dihapus |
| 13 | Ret. Pelayanan Pendidikan | Belum diatur | Tidak diatur / dihapus |
| 14 | Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi* | Perda No1. Tahun 2018 | Tidak diatur / dihapus |
| 15 | Ret. Pengendalian Lalu Lintas | Belum diatur | Ret. Pengendalian Lalu Lintas |

| No. | UU 28/2009 | Perda yang mengatur | UU 1/2022 (HKPD) |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|
| Retribusi Jasa Usaha | | | |
| 1 | Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah* | Perda No1. Tahun 2018 | Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah* |
| 2 | Ret. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | Belum diatur | Ret. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan |
| 3 | Ret. Tempat Pelelangan | Belum diatur | Ret. Tempat Pelelangan |
| 4 | Ret. Tempat khusus Parkir* | Perda No1. Tahun 2018 | Ret. Tempat khusus Parkir* |
| 5 | Ret. Tempat Penginapan/ pesanggrahan/villa* | Belum diatur | Ret. Tempat Penginapan/ pesanggrahan/villa* |
| 6 | Ret. Rumah Potong Hewan* | Perda No1. Tahun 2018 | Ret. Rumah Potong Hewan* |
| 7 | Ret. Pelayanan Pelabuhan | Belum diatur | Ret. Pelayanan Pelabuhan |

| | | | |
|----|---|-----------------------|---|
| 8 | Ret. Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olah raga* | Belum diatur | Ret. Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olah raga* |
| 9 | Ret. Penyeberangan di Air | Belum diatur | Ret. Penyeberangan di Air |
| 10 | Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah | Belum diatur | Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah |
| 11 | Ret. Terminal | Perda No1. Tahun 2018 | Tidak diatur / dihapus |

| No. | UU 28/2009 | Perda yang mengatur | UU 1/2022 (HKPD) |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--|
| Retribusi Perizinan Tertentu | | | |
| 1 | Ret. IMB* | Perda No1. Tahun 2018 | Ret. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)* |
| 2 | Ret. Izin tempat penjualan minuman beralkohol | Perda No1. Tahun 2018 | Tidak diatur / dihapus |
| 3 | Ret. Izin Gangguan | Belum diatur | Tidak diatur / dihapus |
| 4 | Ret. Izin Trayek* | Perda No1. Tahun 2018 | Tidak diatur / dihapus |
| 5 | Ret. Izin Usaha Perikanan | Perda No1. Tahun 2018 | Tidak diatur / dihapus |
| 6 | Ret. Penggunaan Tenaga Kerja Asing* | Belum diatur | Ret. Penggunaan Tenaga Kerja Asing* |
| | | | Ret. Pengelolaan Pertambangan Rakyat / Jenis retribusi baru |

Penetapan jenis Retribusi Daerah di luar yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 harus sangat selektif, agar tidak kontra produktif dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi di Daerah.

Tabel : Kondisi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi

| Uraian | Anggaran 2017 | Realisasi 2017 | (%) | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 | (%) | Anggaran 2019 | Realisasi 2019 | (%) | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | (%) | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | (%) |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 5.630.000.000,00 | 6.244.665.584,00 | 110,92 | 6.193.500.000,00 | 5.215.208.044,00 | 84,20 | 4.701.900.000,00 | 6.173.317.128,67 | 131,29 | 6.831.975.000,00 | 6.533.415.289,75 | 95,63 | 6.377.730.252,00 | 5.159.780.755,50 | 80,90 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 5.135.000.000,00 | 6.469.998.749,00 | 126,00 | 6.821.000.000,00 | 9.055.583.073,00 | 132,76 | 8.832.000.000,00 | 9.084.050.010,00 | 102,85 | 7.072.700.000,00 | 7.811.999.130,00 | 11,45 | 1.203.210.611,00 | 5.834.296.450,00 | 57,18 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.100.000.000,00 | - | - | 2.300.000.000,00 | - | - | 1.515.000.000,00 | - | - | 3.500.000.000,00 | 956.634.299,00 | 27,33 | 2.796.951.769,00 | 1.121.812.830,61 | 40,11 |
| Lain-lain PAD yang sah | 8.553.168.000,00 | 9.080.524.832,77 | 106,17 | 10.123.906.700,00 | 9.955.327.603,10 | 95,33 | 8.702.019.919,70 | 18.576.947.440,55 | 213,48 | 1.853.576.694,00 | 9.401.885.149,94 | 86,62 | 10.226.203.009,00 | 4.096.932.283,78 | 40,06 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 20.418.168.000,00 | 21.795.189.165,77 | 106,74 | 25.438.406.700,00 | 24.226.118.720,10 | 95,23 | 23.750.919.919,70 | 33.834.314.579,22 | 142,45 | 19.258.251.694,00 | 24.703.933.868,69 | 87,42 | 20.604.095.641,00 | 16.212.822.319,89 | 54,77 |

Kondisi pertumbuhan PAD di Kota Tebing Tinggi jauh dari gambaran kemandirian keuangan daerah, ditambah dengan kecenderungan penurunan penerimaan PAD setiap tahunnya.

Sebagai salah satu bentuk upaya kemandirian keuangan daerah adalah adanya komitmen bersama seluruh stakeholder dimulai dari Kepala Daerah sampai dengan seluruh OPD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk secara bersama-sama mengoptimalkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Beberapa point penting yang dapat dilakukan antara lain :

- Optimalisasi seluruh potensi penerimaan Pajak Daerah secara maksimal atas perputaran uang dimasyarakat atau peningkatan Pajak Daerah yang berhubungan dengan bumi dan atau bangunan (PBB-P2 dan BPHTB)
- Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah khususnya Retribusi Jasa Usaha yang tidak hanya sekedar pelayanan kepada masyarakat, namun besarnya biaya operasional penyelenggaraan Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Sehingga paradigma OPD penyelenggara layanan Retribusi Jasa Usaha mampu merubah mindsetnya, tidak hanya sekedar menjalankan fungsi layanan Pemerintah, namun mampu menghasilkan keuntungan yang layak.

- c. Optimalisasi penerimaan Retribusi secara umum dapat juga disesuaikan setiap 3 tahun sekali dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Tebing Tinggi. Acuan indeks harga dan perkembangan perekonomian dapat juga mempergunakan data inflasinasional sebagai mana table dibawah ini dengan akumulasi 3 tahun atau dapat juga rata-rata dari data inflasi 3 tahun tersebut.

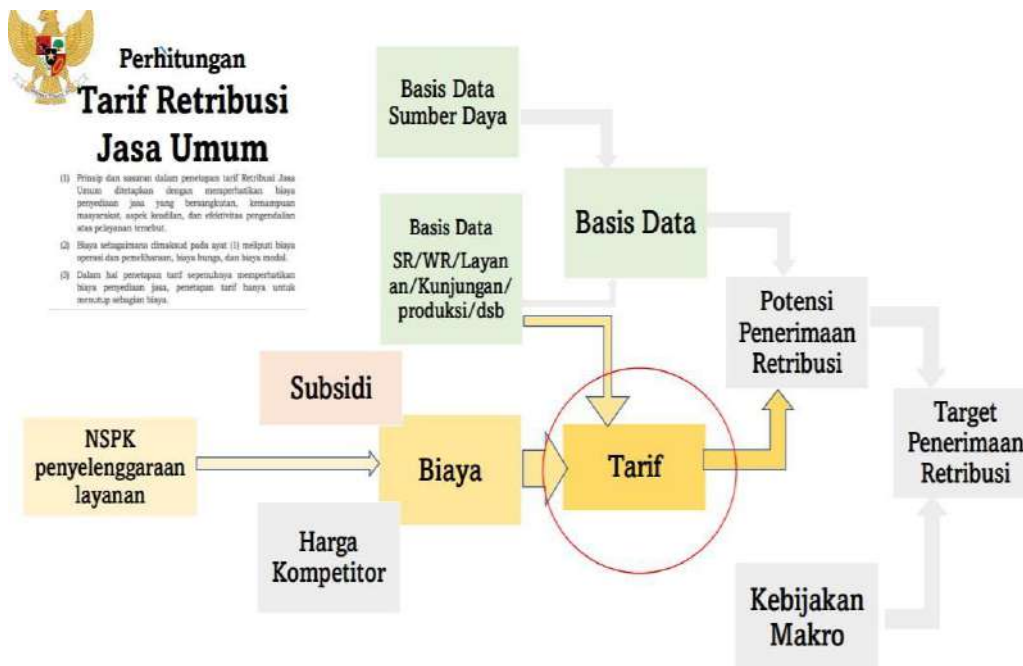
| Tahun | Target Inflasi | Inflasi Aktual(% ,yoy) |
|--------|----------------|------------------------|
| 2018 | 3,5±1% | 3,13 |
| 2019** | 3,5±1% | 2,72 |
| 2020** | 3±1% | 1,68 |
| 2021** | 3±1% | 1,87 |

Namun demikian yang tidak kalah penting juga adalah jenis-jenis bentuk kemandirian keuangan daerah lainnya dari sektor PAD non pajak daerah dan retribusi daerah, diantaranya penguatan BUMD dan PAD Lainnya Yang Sah yang harus diemban oleh OPD yang menangani dan melaksanakan program, pengkajian dan penyusunan kebijakan, serta mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan potensi investasi dan BUMD, sarana perekonomian dan produksi daerah atau menambahkan fungsi koordinasi penguatan BUMD pada OP pemangku tugas pengelolaan pendapatan daerah

C. Saran

- Pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya terikat pada asas legalitas, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diatur.
- Beberapa saran didalam upaya optimalisasi penerimaan PAD khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
 - Terhadap potensi pajak daerah dan retribusi yang belum diatur sebelumnya, maka wajib diatur didalam raperda ini
 - Terhadap tarif retribusi yang belum diatur dan memiliki potensi penerimaan, wajib diatur untuk menjangking potensi yang ada
 - Untuk jenis retribusi yang tarifnya sudah tidak relevan dengan kondisi perekonomian saat ini dan tidak sebanding dengan besarnya biaya operasional penyelenggaraan layanan, maka dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan mempertimbangkan :
 - a. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah khususnya Retribusi Jasa Usaha yang tidak hanya sekedar pelayanan kepada masyarakat, namun besarnya biaya operasional penyelenggaraan Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Sehingga paradigma OPD penyelenggara layanan Retribusi Jasa Usaha mampu merubah mindsetnya, tidak hanya sekedar menjalankan fungsi layanan Pemerintah, namun mampu menghasilkan keuntungan yang layak.
 - b. Optimalisasi penerimaan Retribusi secara umum dapat juga disesuaikan setiap 3 tahun sekali dengan mempertimbangkan indek harga dan perkembangan perekonomian di Kota Tebing Tinggi. Acuan indeks harga dan perkembangan perekonomian dapat juga mempergunakan data inflasi nasional sebagai mana table dibawah ini dengan akumulasi 3 tahun atau dapat juga rata-rata dari data inflasi 3 tahun tersebut, dengan penjelasan dan contoh dibawah ini :

Retribusi Jasa Umum :



Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan

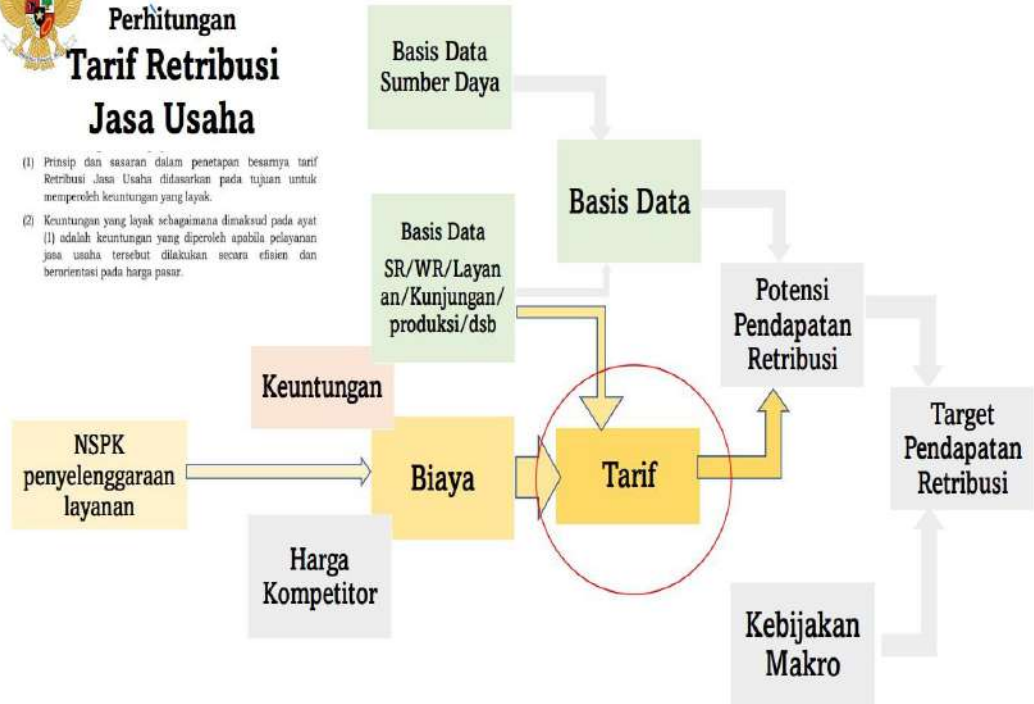
| Unsur/ Komponen | Nilai | Tahun Ke-1 | Tahun Ke-2 | Tahun Ke-3 | Tahun Ke-4 |
|--|--|--|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| B. Modal | 100.000.000 *Asumsi nilai perolehan Aset | 25.000.000 (sharing pembebanan tahunan) | 25.000.000 (sharing pembebanan tahunan) | 25.000.000 (sharing pembebanan tahunan) | 25.000.000 (sharing pembebanan tahunan) |
| B. Operasional | 3% *Asumsi kenaikan inflasi tahunan | 5.000.000 | 5.150.000 | 5.300.000 | 5.450.000 |
| Biaya Riil = B.Modal + B.Operasional | | 30.000.000 | 30.150.000 | 30.300.000 | 30.450.000 |
| Subsidi | 30% *tergantung kebijakan pemda | 9.000.000 | 9.045.000 | 9.090.000 | 9.135.000 |
| Biaya Yang Dibebankan ke WR = Biaya Riil - Subsidi | | 21.000.000 | 21.105.000 | 21.210.000 | 21.315.000 |
| Tarif per WR = Biaya setelah subsidi / Jlh WR | WR=60 orang *tergantung hasil pendataan *tergantung karakter WR tiap jenis retribusi | 350.000 per tahun | 351.750 per tahun | 353.500 per tahun | 355.250 per tahun |
| | | 29.166 per bulan | 29.312 per bulan | 29.458 per bulan | 29.604 per bulan |
| | | 972 per hari | 977 Per hari | 981 Per hari | 986 Per hari |

* Tidak termasuk retribusi layanan kesehatan dan layanan persampahan untuk sampah rumah tangga



Perhitungan Tarif Retribusi Jasa Usaha

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.



Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan

| Unsur/komponen | Nilai | Tahun Ke-1 | Tahun Ke-2 | Tahun Ke-3 | Tahun Ke-4 |
|---|---|--|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| B. Modal | 100.000.000 (nilai perolehan Aset) | 25.000.000 (sharing pembebanan tahunan) | 25.000.000 (sharing pembebanan tahunan) | 25.000.000 (sharing pembebanan tahunan) | 25.000.000 (sharing pembebanan tahunan) |
| B. Operasional | 3% *Asumsi kenaikan inflasi tahunan | 5.000.000 | 5.150.000 | 5.300.000 | 5.450.000 |
| Biaya Riil = B.Modal + B.Operasional | | 30.000.000 | 30.150.000 | 30.300.000 | 30.450.000 |
| Margin Keuntungan | 30% *tergantung kebijakan pemda | 9.000.000 | 9.045.000 | 9.090.000 | 9.135.000 |
| Biaya Yang Dibebankan ke WR = Biaya Riil + Keuntungan | | 39.000.000 | 39.195.000 | 39.390.000 | 39.585.000 |
| Tarif per WR = Biaya setelah keuntungan / Jlh WR | Jumlah WR=60 orang *tergantung hasil pendataan *tergantung karakter jenis retribusi | 650.000 per tahun | 653.250 per tahun | 656.500 per tahun | 659.750 per tahun |
| | | 54.166 per bulan | 54.437 per bulan | 54.708 per bulan | 54.979 per bulan |
| | | 1.805 per hari | 1.814 Per hari | 1.823 Per hari | 1.832 Per hari |

- Untuk retribusi yang sudah tidak diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, maka disarankan untuk diajukan pencabutan.

Tabel Saran Pengaturan Pajak Daerah :

| UU 1/2022 (HKPD) | Tarif | Saran |
|--|---|--|
| Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), meliputi objek : Jasa Perhotelan * | 10% | Ditambahkan definisi rumah kos dalam jasa akomodasi tanpa batas jumlah kamar |
| Jasa Makanan dan Minuman* | 10% | Penyediaan jasa makanan dan minuman sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana amanat UU 1 Tahun 2022, wajib didaftarkan sebagai WP |
| Jasa Kesenian dan hiburan* | 10% 40%-70% diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa | Termasuk objek wisata yang dikelola oleh badan, perorangan dan atau lembaga desa |
| Jasa Parkir* | 10% | Berlaku untuk seluruh tempat parkir diluar badan jalan / diluar aset milik pemerintah. |
| Jasa Tenaga Listrik* | 10% Khusus 3% industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam 1,5% dihasilkan sendiri | |
| Pajak Reklame* | 25% | |
| Pajak MBLB* | 20% 25% khusus untuk daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah KOTA/kota otonom | Ada opsen penambahan 25% untuk pajak propinsi yang tambahkan kedalam dari tarif Kota. $20\% + (25\% \times 20\%)$ |
| Pajak Sarang Burung Walet* | 10% | Perlu diperkuat dengan peraturan Walikota harga jual sarang burung walet |
| Pajak Air Tanah* BPHTB* | 20% 5% | Perlu dibuat peraturan Walikota tentang nilai perolehan air di Kota Tebing Tinggi |
| PBB P2* | 0,5% | |
| Opsen PKB* | 66% | |
| Opsen BBNKB* | 66% | |

Tabel Saran Retribusi Daerah :

| UU 1/2022 (HKPD) | Saran kenaikan tarif 3%/th sesuai umur perda yang mengatur sebelumnya |
|-----------------------------------|---|
| JASA UMUM | |
| Ret. Pelayanan Kesehatan* | Tarif disesuaikan beban biaya operasional layanan kesehatan |
| Ret. Pelayanan Kebersihan* | Optimalisasi layanan dan peningkatan tarif retribusi persampahan kantor / lembaga |
| Ret. Pelayanan Parkir Tepi Jalan* | Untuk diatur sebagai bentuk layanan ketertiban parkir tepi jalan umum |
| Ret. Pelayanan Pasar* | Evaluasi layanan sarana prasana pendukung kegiatan pasar yg perlu ditingkatkan tarifnya (MCK) |
| Ret. Pengendalian Lalu Lintas | Menunggu juknis PP karena jarang terjadi di daerah |

I. RETRIBUSI JASA UMUM

a. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

| JENIS PELAYANAN | USULAN TARIF BARU | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|
| | JASA PEL. BERSAMA | JASA SARANA | TOTAL BIAYA |
| A. Pelayanan Rawat Jalan | | | |
| 1. Rawat Jalan Umum | | | |
| a. Konsul Medis | 4.900,- | 3.000,- | 7.900,- |
| b. Tindakan Dasar Perawatan (T,N,P,R, Pengukuran TB dan BB). | 7.000,- | - | 7.000,- |
| c. Tindakan Medis Ringan | | | |
| - Jahit Luka/x | | | |
| * 1 s/d 5 jahitan | 7.000,- | 6.000,- | 13.000,- |
| * 6 s/d 10 jahitan | 12.600,- | 7.200,- | 19.800,- |
| * >10 jahitan | 18.200,- | 8.400,- | 26.600,- |
| - Pasang Cateter | 14.000,- | 6.000,- | 20.000,- |
| - Pasang Infus | 10.500,- | 9.000,- | 19.500,- |
| d. Tindakan Medis Khusus | | | |
| - Sirkumsisi | 63.000,- | 36.000,- | 99.000,- |
| - Eksplorasi Benda Asing | 21.000,- | 6.000,- | 27.000,- |
| - Insisi Abses | 21.000,- | 6.000,- | 27.000,- |
| - Operasi Ringan | 42.000,- | 36.000,- | 78.000,- |
| e. Tindakan Perawatan Lanjutan | | | |
| - Ganti Balut/Perban | 14.000,- | - | 14.000,- |
| - Af Hecting | 7.000,- | - | 7.000,- |
| - Irigasi Telinga | 18.200,- | 2.400,- | 20.600,- |
| f. Injeksi | 4.200,- | 2.000,- | 6.200,- |
| g. Pelayanan Khusus | | | |
| - Surat Keterangan Sehat | 10.500,- | 2.500,- | 13.000,- |
| - Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin | 10.500,- | 2.500,- | 13.000,- |
| - Surat Keterangan Sakit | 4.900,- | 2.500,- | 7.400,- |
| 2. Rawat Jalan Kebidanan | | | |
| a. Tindakan Kebidanan Umum | | | |
| - Pemeriksaan Kehamilan | 9.100,- | 2.700,- | 11.800,- |
| b. Tindakan Kebidanan Khusus | | | |
| - Pasang IUD | 42.000,- | 6.000,- | 48.000,- |
| - Pasang Implant | 28.000,- | 8.000,- | 36.000,- |
| - Lepas Implant | 42.000,- | 3.000,- | 45.000,- |
| - Persalinan Normal di | 770.000,- | 12.000,- | 782.000,- |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Puskesmas | | | |
| - Tindik Telinga | 21.000,- | 2.000,- | 23.000,- |
| - EKG | 28.000,- | 5.000,- | 33.000,- |
| c. Injeksi | 4.200,- | - | 4.200,- |
| d. Pelayanan Khusus | | | |
| - Surat Keterangan Cuti Hamil/Melahirkan | 10.500,- | 2.500,- | 13.000,- |
| 3. Rawat Jalan Gigi | | | |
| a. Konsul Medis | 5.600,- | 2.400,- | 8.000,- |
| b. Tindakan Khusus | | | |
| - Pencabutan Gigi Sulung Gigi | 9.800,- | 2.600,- | 12.400,- |
| - Pencabutan Gigi Tetap Gigi | 5.600,- | 3.200,- | 8.800,- |
| - Tumpatan Sementara /Gigi | 16.800,- | 2.600,- | 19.400,- |
| - Tumpatan Amalgam Filing Gigi | 19.600,- | 3.200,- | 22.800,- |
| - Perawatan Syaraf | 16.800,- | 2.600,- | 19.400,- |
| - Perawatan Jaringan Periodental | 12.600,- | 3.200,- | 15.800,- |
| - Scalling/ Kunjungan | 61.600,- | 7.200,- | 68.800,- |
| - Insisi Abses | 19.600,- | 7.200,- | 26.800,- |
| c. Injeksi | 4.200,- | - | 4.200,- |
| 4. Laboratorium | | | |
| a. Hematologi | | | |
| - Golongan Darah + kartu | 8.400,- | 4.800,- | 13.200,- |
| - HB | 18.200,- | 2.400,- | 20.600,- |
| b. Kimia Klinik | | | |
| Asam Urat | 15.900,- | 21.600,- | 37.500,- |
| Billirubin Total | 15.900,- | 21.600,- | 37.500,- |
| Billirubin Direk | 15.900,- | 21.600,- | 37.500,- |
| Billirubin Indirek | 15.900,- | 21.600,- | 37.500,- |
| Kolesterol | 15.900,- | 21.600,- | 37.500,- |
| Creatinin | 15.900,- | 21.600,- | 37.500,- |
| Glukosa | 11.700,- | 10.800,- | 22.500,- |
| Glukosa 2x (+ puasa) | 15.900,- | 21.600,- | 37.500,- |
| HDL Kolesterol | 15.000,- | 22.500,- | 37.500,- |
| LDL Kolesterol | 15.000,- | 22.500,- | 37.500,- |
| SGOT | 15.900,- | 21.600,- | 37.500,- |
| SGPT | 15.000,- | 22.500,- | 37.500,- |
| Trigliserida | 15.900,- | 21.600,- | 37.500,- |
| Urea | 15.900,- | 21.600,- | 37.500,- |
| Cholinesterase | 15.000,- | 22.500,- | 37.500,- |
| Protein Total | 26.700,- | 10.800,- | 37.500,- |
| Albumin | 26.700,- | 10.800,- | 37.500,- |
| c. Pemeriksaan Urine Rutin | | | |

| | | | |
|--|-----------|----------|-----------|
| Protein | 2.800,- | 3.600,- | 6.400,- |
| Glukosa | 2.800,- | 3.600,- | 6.400,- |
| Specifyk Gravity (BJ) | 2.800,- | 3.600,- | 6.400,- |
| Bilirubin | 5.600,- | 7.200,- | 12.800,- |
| Sedimen Urine | 5.600,- | 7.200,- | 12.800,- |
| d. Mikrobiologi | | | |
| - BTA (Basil Tahan Asam) | 12.600,- | 7.200,- | 19.800,- |
| - Pemeriksaan Faeces (Tinja) | 11.200,- | 8.400,- | 19.600,- |
| e. Sherologi | | | |
| Test Kehamilan (HGC) | 25.200,- | 14.400,- | 39.600,- |
| f. Parasitologi | | | |
| Pemeriksaan Telur Kecacingan | 21.000,- | 12.000,- | 33.000,- |
| Pemeriksaan jamur kulit | 16.800,- | 3.600,- | 20.400,- |
| B. Pelayanan Unit Gawat Darurat | | | |
| a. Konsul Dokter | 5.600,- | 2.400,- | 8.000,- |
| b. Tindakan Medis Lanjutan | | | |
| - Jahit Luka/x | 1.400,- | 6.000,- | 7.400,- |
| 1. 1 – 5 | 7.000,- | 6.000,- | 13.000,- |
| 2. 6 – 10 | 12.600,- | 7.200,- | 19.800,- |
| 3. > 10 | 18.200,- | 8.400,- | 26.600,- |
| - Pasar Cateter | 14.000,- | 6.000,- | 20.000,- |
| - Pasang Infus | 105.000,- | 9.000,- | 114.000,- |
| - Pasang NGT | 42.000,- | 12.000,- | 54.000,- |
| - Resusitasi | 42.000,- | 12.000,- | 54.000,- |
| c. Tindakan Medis Khusus | | | |
| - Sirkumsisi | 63.000,- | 36.000,- | 99.000,- |
| - Ekplorasi Benda Asing | 21.000,- | 6.000,- | 27.000,- |
| - Insisi Abses | 21.000,- | 6.000,- | 27.000,- |
| d. Tindakan Perawatan Khusus | | | |
| - Hukna | - | 12.000,- | 12.000,- |
| - Irigasi Telinga | 28.000,- | 6.000,- | 34.000,- |
| - Irigasi Mata | 31.500,- | 9.000,- | 40.500,- |
| - Pemberian O2 / Ltr | - | 1.200,- | 1.200,- |
| C. Pelayanan Rawat Inap | | | |
| a. Tarif Ruangan | - | 24.000,- | 24.000,- |
| b. Visite Dokter | 8.400,- | - | 8.400,- |
| c. Tindakan Medik Cyto | 14.000,- | - | 14.000,- |
| d. Tindakan Medis Lanjutan | | | |
| - Pasang NGT | 35.000,- | 12.000,- | 47.000,- |
| - Resusitasi | 35.000,- | 12.000,- | 47.000,- |
| - Pasang Cateter | 14.000,- | 6.000,- | 20.000,- |
| - Pasang Infus | 10.500,- | 9.000,- | 19.500,- |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| e. Tindakan Perawatan Dasar | 8.400,- | - | 8.400,- |
| f. Makan Pasien perhari | - | 54.000,- | 54.000,- |
| D. Pemeriksaan Fisika/Kimia Air Sederhana | | | |
| 1. Bakteriologi (E-Coli) | 70.000,- | 60.000,- | 130.000,- |
| 2. Kimia Air | 70.000,- | 60.000,- | 130.000,- |
| E. Tarif KSO Institusi Pendidikan dengan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi | | | |
| 1. Institusi Pendidikan Pemerintah | | | |
| a. Kerjasama yang baru | 1.400.000,- | 1.800.000,- | 3.200.000,- |
| b. Perpanjangan Kerjasama | 1.120.000,- | 1.440.000,- | 2.560.000,- |
| 2. Institusi Pendidikan Swasta | | | |
| (1) Kerjasama yang baru | 1.680.000,- | 2.160.000,- | 3.840.000,- |
| (2) Perpanjangan Kerjasama | 1.400.000,- | 1.800.000,- | 3.200.000,- |

2. Tarif Retribusi Pelayanan kesehatan di RSUD. Kumpulan Pane

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|---------------------------------------|--------------|----------------|--------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Darah rutin | 51.000 | 21.000 | 72.000 |
| 2 | Darah lengkap dan morfologidarah tepi | 53.000 | 22.000 | 75.000 |
| 3 | LED | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 4 | Urin lengkap | 41.000 | 17.000 | 58.000 |
| 5 | Feses rutin | 36.000 | 16.000 | 52.000 |
| 6 | Golongan darah A/B/O | 10.500 | 4.500 | 15.000 |
| 7 | Golongan darah rhesus | 18.000 | 8.000 | 26.000 |
| 8 | Bleeding time | 10.500 | 4.500 | 15.000 |
| 9 | Clotting time | 10.500 | 4.500 | 15.000 |
| 10 | Billirubin total | 36.000 | 15.000 | 51.000 |
| 11 | Bilirubin direct | 36.000 | 15.000 | 51.000 |
| 12 | SGOT | 40.000 | 17.000 | 57.000 |
| 13 | SGPT | 40.000 | 17.000 | 57.000 |
| 14 | Alkali fosfatase | 34.000 | 14.000 | 48.000 |
| 15 | Ureum | 41.000 | 17.000 | 58.000 |
| 16 | Creatinin | 40.000 | 17.000 | 57.000 |
| 17 | Asam urat | 39.000 | 17.000 | 56.000 |
| 18 | Kolestrol total | 39.000 | 17.000 | 56.000 |
| 19 | Trigliserida | 38.000 | 16.000 | 35.000 |
| 20 | HDL Kolesterol | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 21 | LDL Kolesterol | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 22 | KGD sewaktu | 39.000 | 16.000 | 55.000 |
| 23 | KGD puasa | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| 24 | KGD 2 jam puasa | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| 25 | Albumin | 34.000 | 15.000 | 49.000 |

| | | | | |
|----|---------------------------|---------|--------|---------|
| 26 | Total protein | 33.000 | 15.000 | 48.000 |
| 27 | Globulin | 17.500 | 7.500 | 25.000 |
| 28 | Widal | 56.000 | 24.000 | 80.000 |
| 29 | Anti Dengue (IgG dan IgM) | 129.000 | 55.000 | 184.000 |
| 30 | ASTO | 37.000 | 16.000 | 53.000 |
| 31 | Reumatoid faktor | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| 32 | HbsAg | 45.000 | 19.000 | 64.000 |
| 33 | Anti HBs | 37.000 | 16.000 | 53.000 |
| 34 | Anti HCV | 87.500 | 37.500 | 125.000 |
| 35 | HCV | 58.000 | 24.000 | 82.000 |
| 36 | BTA Tes | 17.500 | 7.500 | 25.000 |

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|--------------------|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 37 | Plano test | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
| 38 | Malaria | 39.000 | 17.000 | 56.000 |
| 39 | HIV | 65.000 | 28.000 | 86.000 |
| 40 | NS-1 | 126.000 | 54.000 | 180.000 |
| 41 | CA-125 | 245.000 | 105.000 | 350.000 |
| 42 | Elektrolit | 87.500 | 37.500 | 125.000 |
| 43 | CRP | 255.000 | 109.000 | 364.000 |
| 44 | TPHA Kuantitatif | 91.000 | 39.000 | 130.000 |
| 45 | RDT-Ag | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 46 | RT-PCR | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| 47 | T3 | 279.000 | 119.000 | 398.000 |
| 48 | T4 | 253.000 | 108.000 | 361.000 |
| 49 | TSH | 252.000 | 108.000 | 160.000 |
| 50 | TROPONIN-1 | 212.700 | 142.300 | 355.000 |
| 51 | CKMB | 195.000 | 131.000 | 326.000 |
| 52 | AFP | 167.000 | 111.000 | 278.000 |
| 53 | CEA | 226.000 | 124.000 | 350.000 |
| 54 | HbA1c | 261.000 | 112.000 | 373.000 |
| 55 | Mikroalbumin | 135.000 | 89.000 | 224.000 |
| 56 | Nab | 316.000 | 84.000 | 400.000 |
| 57 | D-Dimer | 265.000 | 185.000 | 450.000 |
| 58 | Procalcitonin | 350.000 | 235.000 | 585.000 |
| 59 | Interleukin | 330.000 | 212.000 | 542.000 |
| 60 | CRP Kuantitatif | 153.000 | 27.000 | 180.000 |
| 61 | Hs-CRP | 129.000 | 86.000 | 215.000 |
| 62 | Ferritin | 230.000 | 35.000 | 265.000 |
| 63 | Vitamin D | 307.000 | 123.000 | 430.000 |
| 64 | Glukosa (Analyzer) | 46.000 | 19.000 | 65.000 |
| 65 | Glukosa stik | 20.000 | 9.000 | 29.000 |
| 66 | KOH | 120.000 | 52.000 | 172.000 |
| 67 | Masa pembekuan | 33.000 | 15.000 | 48.000 |
| 68 | Masa pendarahan | 33.000 | 15.000 | 48.000 |

| | | | | |
|----|----------------|---------|---------|---------|
| 69 | Mikrofilaria | 52.000 | 23.000 | 75.000 |
| 70 | P. Gram | 54.000 | 24.000 | 78.000 |
| 71 | Shiphilis | 58.000 | 25.000 | 83.000 |
| 72 | Malaria slide | 47.000 | 21.000 | 68.000 |
| 73 | Diff count | 47.000 | 21.000 | 68.000 |
| 74 | IT ratio | 48.000 | 21.000 | 69.000 |
| 75 | Analisa cairan | 229.000 | 98.000 | 327.000 |
| 76 | Betahcgc | 293.000 | 125.000 | 418.000 |
| 77 | Morbus hansen | 184.000 | 80.000 | 264.000 |
| 78 | Tubex | 147.000 | 63.000 | 210.000 |

TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

| NO | URAIAN | TARIF USULAN | | |
|-------------------------------------|---|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| I. Pemeriksaan Tanpa Kontras | | | | |
| 1 | Thorax | 108.000 | 46.000 | 154.000 |
| 2 | BNO | 182.000 | 78.000 | 260.000 |
| 3 | Pelvic | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 4 | Abdomen 2 posisi | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 5 | Abdomen 3 posisi | 277.000 | 119.000 | 397.000 |
| 6 | Digiti AP Lateral | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 7 | Manus AP Lateral | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 8 | Wrist Joint AP Lateral | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 9 | Antebrachi AP Lateral | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 10 | Humerus AP Lateral | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 11 | Shoulder AP Lateral | 182.000 | 78.000 | 260.000 |
| 12 | Scapula AP | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 13 | Clavicula | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 14 | Elbow Joint AP Lateral | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 15 | Ankle Joint AP Lateral | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 16 | Pedis AP Lateral | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 17 | Cruris AP Lateral | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 18 | Knee Joint AP Lateral | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 19 | Femur AP Lateral | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 20 | Hip Joint AP Lateral | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 21 | Baby Gram | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 22 | Mandibula | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 23 | TMJ 4 posisi (Tempere-Mandibulator-Joint) | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 24 | Mastoid | 183.000 | 78.000 | 261.000 |
| 25 | Sinus 2 Posisi (waters+lateral) | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 26 | Nasal | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 27 | Orbita | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 28 | Survei Tulang | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 29 | Thorax Top Lordotic | 70.000 | 30.000 | 100.000 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 30 | Thorax Lateral Decubitus | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 31 | Abdomen Decubitus | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 32 | Olecranon Proscuss PAAxial | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 33 | Shoulder Joint Axial | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 34 | Clavicula Axial | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 35 | Calcaneus AP+Axial +Lateral | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 36 | Cervical AP | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 37 | Cervical Lateral | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 38 | Cervical Oblique | 84.000 | 36.000 | 120.000 |
| 39 | Cervico VertebraeThoracalis AP | 84.000 | 36.000 | 120.000 |
| 40 | Cervico VertebraeThoracalis Lat | 84.000 | 36.000 | 120.000 |
| 41 | Vertebrae Thoracalis AP | 84.000 | 36.000 | 120.000 |
| 42 | Vertebrae ThoracalisLateral | 84.000 | 36.000 | 120.000 |
| 43 | Vertebrae ThoracoLumbalis AP | 84.000 | 36.000 | 120.000 |
| 44 | Vertebrae ThoracoLumbalis Lateral | 84.000 | 36.000 | 120.000 |
| 45 | Vertebrae Lumbal AP | 126.000 | 54.000 | 180.000 |
| 46 | Vertebrae Lumbal Lateral | 126.000 | 54.000 | 180.000 |
| 47 | Vertabrae Lumbo SacralAP | 126.000 | 54.000 | 180.000 |
| 48 | Vertabrae Lumbo SacralLateral | 126.000 | 54.000 | 180.000 |
| 49 | Sacrum AP | 126.000 | 54.000 | 180.000 |
| 50 | Sacrum Lateral | 126.000 | 54.000 | 180.000 |
| 51 | Coegcygeus AP | 84.000 | 36.000 | 120.000 |
| 52 | Coegcygeus Lateral | 84.000 | 36.000 | 120.000 |
| 53 | Schedel AP | 126.000 | 54.000 | 180.000 |
| 54 | Schedel Lateral | 126.000 | 54.000 | 180.000 |
| 55 | Sella Turcica Lateral | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 56 | Facial Bone AP | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 57 | Nasal Lateral | 84.000 | 36.000 | 120.000 |
| 58 | Dental 1 Organ | 49.000 | 21.000 | 70.000 |
| 59 | Panoramic | 161.000 | 69.000 | 230.000 |
| 60 | Mamografi 2 posisi | 560.000 | 240.000 | 800.000 |
| 61 | Mamografi 3 posisi | 665.000 | 285.000 | 950.000 |
| 62 | Cranium/Schedel waters | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 63 | Cruris | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 64 | Spn Ap/L | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| 65 | Thoracolumbal | 135.000 | 58.000 | 193.000 |
| II. Pemeriksaan dengan kontras | | | | |
| 1 | Oesofagus | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
| 2 | OMD | 360.000 | 240.000 | 600.000 |
| 3 | Follow Through | 360.000 | 240.000 | 600.000 |
| 4 | Colon in Loop (BariumEnema) | 360.000 | 240.000 | 600.000 |
| 5 | Lopografi | 360.000 | 240.000 | 600.000 |
| 6 | BNO / IVP | 450.000 | 300.000 | 750.000 |
| 7 | Cystografi | 360.000 | 240.000 | 600.000 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 8 | Uretre-Cystografi | 360.000 | 240.000 | 600.000 |
| 9 | Uretrografi | 360.000 | 240.000 | 600.000 |
| 10 | Fistulografi | 360.000 | 240.000 | 600.000 |
| 11 | RPG (RetrogradeProlografi) | 240.000 | 160.000 | 400.000 |
| 12 | ERCP | 600.000 | 400.000 | 1.000.000 |
| 13 | HSG | 480.000 | 320.000 | 800.000 |
| 14 | Sialografi | 240.000 | 160.000 | 400,000 |
| 15 | APG | 240.000 | 160.000 | 400.000 |
| 16 | Myelografi | 240.000 | 160.000 | 400,000 |
| 17 | Appendix | 360.000 | 240.000 | 600,000 |
| III. Pemeriksaan CT-Scan Tanpa Kontras | | | | |
| 1 | Kepala (Skull) | 1.255.000 | 538.000 | 1.793.000 |
| 2 | Orbita | 480.000 | 320.000 | 800.000 |
| 3 | Sella Turcica | 480.000 | 320.000 | 800.000 |
| 4 | Mastoid | 480.000 | 320.000 | 800.000 |
| 5 | Facial bone (Tulang-tulang wajah) | 480.000 | 320.000 | 800.000 |
| 6 | Mandibula (rawangbawah) | 480.000 | 320.000 | 800.000 |
| 7 | Maxila (rahang atas) | 480.000 | 320.000 | 800.000 |
| 8 | Cervical | 660.000 | 440.000 | 1.100.000 |
| 9 | Thoracal | 660.000 | 440.000 | 1.100.000 |
| 10 | Lumbal | 660.000 | 440.000 | 1.100.000 |
| 11 | Thorax | 1.255.000 | 538.000 | 1.793.000 |
| 12 | Abdomen Upper + Lower | 1.255.000 | 538.000 | 1.793.000 |
| 13 | Pelvis | 570.000 | 380.000 | 950.000 |
| 14 | Ekstremitas atas/perorgan | 450.000 | 300.000 | 750.000 |
| 15 | Ekstremitas bawah/perorgan | 450.000 | 300.000 | 750.000 |
| 16 | Nasopharynx | 570.000 | 380.000 | 950.000 |
| 17 | Larynx | 570.000 | 380.000 | 950.000 |
| 18 | Upper Abdomen | 480.000 | 320.000 | 800.000 |
| 19 | Lower Abdomen | 540.000 | 360.000 | 900.000 |
| 20 | Sinnus Paranasal | 540.000 | 360.000 | 900.000 |
| IV. Pemeriksaan CT-Scandengan Kontras | | | | |
| 1 | Kepala (Skull) | 1.443.000 | 618.000 | 2.061.000 |
| 2 | Orbita | 960.000 | 640.000 | 1.600.000 |
| 3 | Sella Turcica | 960.000 | 640.000 | 1.600.000 |
| 4 | Mastoid | 960.000 | 640.000 | 1.600.000 |
| 5 | Facial bone (Tulang-tulang wajah) | 960.000 | 640.000 | 1.600.000 |
| 6 | Mandibula (rawangbawah) | 960.000 | 640.000 | 1.600.000 |
| 7 | Maxila (rahang atas) | 960.000 | 640.000 | 1.600.000 |
| 8 | Cervical | 1.140.000 | 760.000 | 1.900.000 |
| 9 | Thoracal | 1.140.000 | 760.000 | 1.900.000 |
| 10 | Lumbal | 1.140.000 | 760.000 | 1.900.000 |
| 11 | Thorax | 1.573.000 | 674.000 | 2.247.000 |
| 12 | Abdomen Upper + Lower | 1.573.000 | 674.000 | 2.247.000 |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 13 | Pelvis | 1.140.000 | 760.000 | 1.900.000 |
| 14 | Ekstremitas atas/perorgan | 780.000 | 520.000 | 1.300.000 |
| 15 | Ekstremitas bawah/perorgan | 780.000 | 520.000 | 1.300.000 |
| 16 | Nasopharynx | 960.000 | 640.000 | 1.600.000 |
| 17 | Larynx | 960.000 | 640.000 | 1.600.000 |
| 18 | Leher | 960.000 | 640.000 | 1.600.000 |
| 19 | Upper Abdomen | 960.000 | 640.000 | 1.600.000 |
| 20 | Lower Abdomen | 960.000 | 640.000 | 1.600.000 |
| 21 | Sinnus Paranasal | 960.000 | 640.000 | 1.600.000 |
| V. Pemeriksaan CT-Scan kontras dengan injektor | | | | |
| 1 | CT Head Angiografi | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 2 | CT Abdomen Angiografi | 1.620.000 | 1.080.000 | 2.700.000 |
| 3 | CT Colonoscopy | 1.740.000 | 1.160.000 | 2.900.000 |
| 4 | CT Abdomen 2 phase | 1.620.000 | 1.080.000 | 2.700.000 |
| 5 | CT Abdomen 3 phase | 1.740.000 | 1.160.000 | 2.900.000 |
| 6 | CT Thorax denganinjektor | 1.620.000 | 1.080.000 | 2.700.000 |
| 7 | CT Bronchoscopy | 1.620.000 | 1.080.000 | 2.700.000 |
| 8 | CT Thorax nadul | 1.620.000 | 1.080.000 | 2.700.000 |
| 9 | Kepala (skull) | 1.140.000 | 760.000 | 1.900.000 |
| 10 | Orbita | 1.140.000 | 760.000 | 1.900.000 |
| 11 | Sella Turcica | 1.140.000 | 760.000 | 1.900.000 |
| 12 | Mastoid | 1.140.000 | 760.000 | 1.900.000 |
| 13 | Cervical | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 14 | Thoracal | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 15 | Lumbal | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 16 | Abdomen upper + lower | 1.620.000 | 1.080.000 | 2.700.000 |
| 17 | Nasopharynx | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 18 | Larynx | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 19 | Upper Abdomen | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 20 | Lower Abdomen | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 21 | Sinus Paranasal | 1.140.000 | 760.000 | 1.900.000 |
| 22 | Soft Tissu regio skeletal | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| VI. Pemeriksaan USG | | | | |
| 1 | USG Upper Abdomen | 380.000 | 163.000 | 543.000 |
| 2 | USG Lower Abdomen | 380.000 | 163.000 | 543.000 |
| 3 | USG Upper + LowerAbdomen | 240.000 | 160.000 | 400,000 |
| 4 | USG Thorax | 180.000 | 120.000 | 300.000 |
| 5 | USG Ekstrimitas | 240.000 | 160.000 | 400.000 |
| 6 | USG Soft Tissue | 380.000 | 163.000 | 543.000 |
| 7 | USG Tractus Urinarius | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| 8 | USG Appendix | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| 9 | USG Thyroid | 380.000 | 163.000 | 543.000 |
| 10 | USG Mammae Kanan +Kiri | 240.000 | 160.000 | 400.000 |
| 11 | USG Testis | 380.000 | 163.000 | 543.000 |

| | | | | |
|----|-------------|---------|---------|---------|
| 12 | USG Dopler | 262.000 | 112.000 | 374.000 |
| 13 | USG Prostat | 380.000 | 163.000 | 543.000 |

Keterangan : Biaya Cyto (diluar jam kerja/hari libur umum) ditambah Rp. 100.000,- untuk bagian Radiologi

TARIF POLIKLINIK PENYAKIT ANAK

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Pleural Pungsi | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| 2 | Lumbal Pungsi | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| 3 | Test Mantoux | 91.000 | 39.000 | 130.000 |
| 4 | Tindik | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 5 | Vaksin / Imunisasi Wajib(PPI) | 112.000 | 48.000 | 160.000 |
| 6 | Vaksin/Imunisasi Anjuran(Non PPI) | | | |
| | a. Vaksin Hepatitis B | 112.000 | 48.000 | 160.000 |
| | b. Vaksin Hepatitis A | 112.000 | 48.000 | 160.000 |
| | c. Vaksin Varicela | 112.000 | 48.000 | 160.000 |
| | d. Vaksin MMR | 112.000 | 48.000 | 160.000 |
| | e. Vaksin DpaT | 112.000 | 48.000 | 160.000 |
| | f. Vaksin Tifoid | 112.000 | 48.000 | 160.000 |
| 7 | Intubasi | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 8 | Pemasangan vena umbilical | 490.000 | 210.000 | 700.000 |
| 9 | Transfusi tukar | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| 10 | CPAP | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| 11 | Pemeriksaan bayi baru lahir | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| 12 | Pemeriksaan tumbuh kembang | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| 13 | Fototerapi | 112.000 | 48.000 | 160.000 |
| 14 | Konseling endokrin | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| 15 | Surat Keterangan | 30.000 | 12.000 | 42.000 |
| 16 | Rectal toucher | 90.000 | 38.000 | 128.000 |
| 17 | Pemeriksaan Kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 18 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 19 | Pasang nebulizer | 53.000 | 23.000 | 76.000 |

TARIF POLIKLINIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|-----------------------|--------------|--------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA LAYANAN | TARIF |
| 1 | Pemeriksaan Ibu Hamil | 30.000 | 70.000 | 100.000 |
| 2 | Vaginal Swab | 105.000 | 45.000 | 150.000 |

| | | | | |
|----|--|---------|---------|-----------|
| 3 | Pengambilan Paps Smear | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 4 | VT (Vaginal Touche) | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 5 | Tamponade | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 6 | Pasang IUD / Pasang Spiral | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 7 | Angkat IUD / Buka Spiral | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 8 | Pasang KB Susuk | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 9 | Angkat KB susuk | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 10 | KB Suntik | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 11 | Pasang Ring | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 12 | Angkat Ring | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 13 | Biopsi Endometrium (Kuret Bertingkat) | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 14 | Pejahitan luka perineum atau vagina di bawah 5 jahitan | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 15 | Pejahitan luka perineum atau vagina di atas 5 jahitan | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| 16 | Kontrol Post Operasi | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 17 | Kontrol Pasca Melahirkan | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 18 | Extirpasi (Polyp cervix,condiloma, myoma geburt) | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 19 | Cauter Condiloma | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| 20 | KTG | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 21 | USG Dopler (2 dimensi) obgyn | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 22 | USG Dopler (3 dimensi) obgyn | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| 23 | Kolposkopi | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| 24 | Krio terapi | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 25 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 26 | Surat Keterangan | 30.000 | 12.000 | 42.000 |
| 27 | Senam hamil | 145.000 | 62.000 | 207.000 |
| 28 | Ganti verban besar | 97.000 | 41.000 | 138.000 |
| 29 | Ganti verban sedang | 66.000 | 28.000 | 94.000 |
| 30 | Gangi verban kecil | 50.000 | 21.000 | 71.000 |
| 31 | Inspekulo | 106.000 | 45.000 | 151.000 |
| 32 | Lepas AKDR | 40.000 | 17.000 | 57.000 |
| 33 | Lepas kateter | 36.000 | 15.000 | 51.000 |
| 34 | Pasang Implan | 265.000 | 113.000 | 378.000 |
| 35 | Lepas Implan | 106.000 | 45.000 | 151.000 |
| 36 | Pasang kateter | 92.000 | 39.000 | 131.000 |
| 37 | Pemasangan pessarium | 117.000 | 50.000 | 167.000 |
| 38 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 39 | Perawatan luka jahitan | 101.000 | 43.000 | 144.000 |
| 40 | Perawatan luka kotor tanpahecting | 238.000 | 102.000 | 340.000 |

TARIF POLIKLINIK BEDAH

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Angkat jahitan (1-5 jahitan) | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 2 | Angkat jahitan (5-10 jahitan) | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| 3 | Angkat jahitan (> 10 jahitan) | 52.500 | 22.500 | 75.000 |
| 4 | Pasang folley cateter | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 5 | Pelepasan Folley cateter | 35.000 | 15.000 | 50.000 |

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 6 | Bougsinasi | 45.500 | 19.500 | 65.000 |
| 7 | Pemasangan bidai/ spalk Pendek | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 8 | Pemasangan bidai/ spalk sedang | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 9 | Pemasangan bidai/ spalk Panjang | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| 10 | Nail Traksi (Pencabutan kuku) | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| 11 | Pembersihan luka dan tindakan Hecting < 5jahitan | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| 12 | Pembersihan luka dan tindakan Hecting 5 s/d 10 jahitan | 280.000 | 120.000 | 400.000 |
| 13 | Pembersihan luka dan tindakan hecting >= 10 jahitan | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 14 | Biopsi surgical pada jaringan bawahkulit | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 15 | Sircumsisi | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 16 | Eksisi kecil (lesi < 2 cm) | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 17 | Eksisi sedang (lesi 2-5 cm) | 420.000 | 180.000 | 600.000 |
| 18 | Eksisi sedang (> 5 cm) | 490.000 | 210.000 | 700.000 |
| 19 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 20 | Bedah minor | 185.000 | 80.000 | 265.000 |
| 21 | Ganti verban besar | 97.000 | 41.000 | 138.000 |
| 22 | Ganti verban sedang | 66.000 | 28.000 | 94.000 |
| 23 | Ganti verban kecil | 50.000 | 21.000 | 72.000 |
| 24 | Lepas kateter | 36.000 | 15.000 | 51.000 |
| 25 | Pasang kateter | 92.000 | 39.000 | 131.000 |
| 26 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 27 | Perawatan luka jahitan | 101.000 | 43.000 | 144.000 |
| 28 | Perawatan luka kotor tanpa hecting | 238.000 | 102.000 | 340.000 |

TARIF POLIKLINIK THT

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|---------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA LAYANAN | TARIF |
| 1 | Test berbisik / Penala | 33.000 | 14.000 | 47.000 |
| 2 | Siegel Test | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| 3 | Caustik Tenggorokan | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 4 | Caustik Hidung | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 5 | Caustik Telinga | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 6 | Ekstraksi cerumen | 56.000 | 24.000 | 80.000 |
| 7 | Audiogram | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 8 | C. Alineum Tenggorokan | 56.000 | 24.000 | 80.000 |
| 9 | C. Alineum Hidung | 56.000 | 24.000 | 80.000 |
| 10 | C. Alineum Telinga dgn lokalanastesis | 56.000 | 24.000 | 80.000 |
| 11 | Kalori Test | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 12 | Buka jahitan | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 13 | Kateter Tuba Eustachius | 280.000 | 120.000 | 400.000 |
| 14 | Parasentase | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 15 | Swab Nasal | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 16 | Swab Throat | 35.000 | 15.000 | 50.000 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| 17 | Swab Telinga | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 18 | Check-Up THT | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 19 | Insisi Abses Peritonsili | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 20 | Insisi Abses Retroauricular | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 21 | Irigasi / Cuci / Hidung | 56.000 | 24.000 | 80.000 |
| 22 | Nasoendoskopy | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 23 | Nasoendoskopy + Biopsi | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 24 | Laringoskopy | 55.000 | 23.000 | 78.000 |
| 25 | Tampon Hidung | 30.000 | 12.000 | 42.000 |
| 26 | Endoscopy telinga | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 27 | Mikroskop Telinga | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 28 | Pasang NGT dengan Endoskopi | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 29 | Rinolaringoskopi | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 30 | Biopsi Laring per Endoskopi | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 31 | Audiometri Nada Murni | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 32 | Timpanometri | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 33 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 34 | Pemeriksaan endoskopi | 24.000 | 10.000 | 34.000 |
| 35 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 36 | Tampon telinga | 44.000 | 19.000 | 63.000 |
| 37 | Perawatan luka jahitan | 101.000 | 43.000 | 144.000 |
| 38 | Perawatan luka kotor tanpa hecting | 238.000 | 102.000 | 340.000 |
| 39 | Irigasi telinga | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| 40 | Kompres telinga | 15.000 | 6.000 | 21.000 |
| 41 | Ekstraksi korpus alenium hidung | 72.000 | 30.000 | 102.000 |
| 42 | Ekstraksi korpus alenium telinga | 72.000 | 30.000 | 102.000 |
| 43 | Ekstraksi korpus alenium tenggorokan | 66.000 | 28.000 | 94.000 |

TARIF POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|--|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Kecil | | | |
| | a. Elektrodesikasi lesi < 5 mm | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | b. Ekstraksi Komedo | 112.000 | 48.000 | 160.000 |
| | c. Kuretase | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | d. Insisi | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | e. Biopsi | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | f. Pemeriksaan BTA Kusta | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| | g. Uji Tusuk (Pri Test) | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| | h. Peeling | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| | i. Uji Tempel (Patch Test) | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| | j. Injeksi Triamcinolon ID | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| | k. Tuberkulin Test | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 2 | Sedang | | | |
| | a. Elektro Desikasi Sedang | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | b. Bedah Sayat (Shaving) | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | c. Kuretase dan Elektrodesikasi | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | d. Eksisi lesi 5 mm – 2 cm | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | e. Ekstirpasi | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | f. Ekstraksi | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | g. Elektrodesikasi Lesi Multiple | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | h. Sirkumsisi | | | |
| | i. Cryosugery | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 3 | Prosedur Pada Penis(Pemeriksaan Sekret Uretra) | 294.000 | 126.000 | 420.000 |
| 4 | Prosedur Kecil Ginekologi(Pemeriksaan Sekret) | 294.000 | 126.000 | 420.000 |
| 5 | Perawatan Luka | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 6 | Diaskopi/kerokan kulit | 106.000 | 45.000 | 151.000 |
| 7 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 8 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 9 | Perawatan luka jahitan | 101.000 | 43.000 | 144.000 |
| 10 | Perawatan luka kotor tanpahecting | 238.000 | 102.000 | 340.000 |

TARIF POLIKLINIK PENYAKIT JIWA

| NO | JENIS PELAYANAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
|----|---|-------------|----------------|---------|
| 1 | Pemeriksaan Kesehatan jiwadewasa | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 2 | Pemeriksaan kesehatan jiwa anakdan remaja | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| 3 | Pemeriksaan Surat KeteranganBebas Narkoba | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 4 | Pelayanan : | | | |
| | a. Far Farmakoterapi | 28.000 | 12.000 | 40.000 |
| | b. Psikoterapi | 36.000 | 16.000 | 52.000 |
| | *. Psikoterapi Individu (CBT) | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| | *. Psikoterapi Suportif | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | *. Psikoterapi Psikodinamik | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| | *. Psikoterapi MotivasionalInterview Terapi (MET) | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| | *. Psikoterapi Kelompok/keluarga | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| 5 | Test Kepribadian MMPI Dewasa | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| 6 | Test Kepribadian MMPI Anak &Remaja | 245.000 | 105.000 | 350.000 |
| 7 | Scala clinical-90 | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 8 | Tindakan Injeksi | | | |
| | Zypexa 10 mg | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
| | Diazepam | 30.000 | 100.000 | 130.000 |
| | DellaDryl | 20.000 | 90.000 | 120.000 |
| | Halloperidol | 35.000 | 100.000 | 135.000 |
| | Sikzonoat | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| | Haldol Decanoat | 110.000 | 100.000 | 210.000 |
| 9 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 10 | Konseling | 44.000 | 104.000 | 148.000 |
| 11 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 12 | Surat keterangan | 30.000 | 12.000 | 42.000 |

TARIF POLIKLINIK PARU

| No | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|----------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Thoraea Sistesis (Kumbah Pleura) | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| 2 | Pemasangan WSD | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| 3 | Bronkoskopi | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| 4 | Bronkoskopi + Biopsi | 1.225.000 | 525.000 | 1.750.000 |
| 5 | Bronkoskopi + Brusling | 1.225.000 | 525.000 | 1.750.000 |
| 6 | Bronkoskopi + Brusling + photo | 1.225.000 | 525.000 | 1.750.000 |
| 7 | Biopsi Pleura | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| 8 | TTLB | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| 9 | Spirometri | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 10 | Nebulizer | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 11 | Mantouxtest | 105.000 | 45.000 | 150.000 |

| | | | | |
|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| 12 | Torakoskopi | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 13 | Pleurodesis | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| 14 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 15 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 16 | Surat keterangan | 30.000 | 12.000 | 42.000 |

TARIF POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|--|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Premedikasi | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 2 | Ekstraksi Gigi : | | | |
| | Ekstraksi Gigi Susu/Chlor Etyl | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| | Ekstraksi Gigi Susu/Injeksi | 49.000 | 26.000 | 75.000 |
| | Ekstraksi Gigi dengan InfiltrasiAnastesi | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| | Ekstraksi Gigi dengan BlokAnastesi | 105.000 | 45.00 | 150.000 |
| | Gigi Mobile/Goyang | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| | Gigi anterior/radix | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| | Gigi premolar dan molar | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | Gigi Molar 3 Atas | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| | Gigi Molar 3 bawah | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| | Ekstraksi Gigi dengan Separasi(dengan bur) | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| | Pengobatan Dry Socket | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 3 | Konservasi/Penambalan Gigi | | | |
| | Tambalan Sementara | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| | Tambalan Amalgam/Silikat | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| | Komposit Kavitas Kecil | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| | Komposit Kapasitas Besar | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | GIC + Komposit | 122.000 | 53.000 | 175.000 |
| | Bongkar Tambalan | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| | Pembersihan Karies/Grinding | 52.000 | 23.000 | 75.000 |
| | Inlay/Onlay | 420.000 | 180.000 | 600.000 |
| | Inlay/Onlay Porcelain | 910.000 | 390.000 | 1.300.000 |
| | All Metal Crown | 560.000 | 240.000 | 800.000 |
| | Porcelain Fused to Metal Crown | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| | Stift Jacket Crown | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| | Bridge Metal Crown/unit | 875.000 | 375.000 | 1.250.000 |
| | Bridge Porcelain Crown/unit | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| 4 | Perawatan Saluran Akar : | | | |
| | Buka atap pulpa dengan injeksi | 52.000 | 23.000 | 75.000 |
| | Buka atap pulpa tanpa injeksi | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| | Preparasi saluran akar 1 | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| | Preparasi saluran akar 2 | 56.000 | 24.000 | 80.000 |
| | Preparasi saluran akar 3 | 87.000 | 38.000 | 125.000 |
| | Sterilisasi saluran akar/visite | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| | Pengisian saluran akar 1 | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| | Pengisian saluran akar 2 | 56.000 | 24.000 | 80.000 |
| | Pengisian saluran akar 3 | 87.000 | 38.000 | 125.000 |
| 5 | Periodonti : | | | |
| | Scaling/Rahang | 52.000 | 23.000 | 75.000 |
| | Kuretase | 70.000 | 30.000 | 100.000 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|---------|-----------|
| | Valplastic Flexible Denture | 910.000 | 390.000 | 1.300.000 |
| | Tambahan per 1 Gigi Valplast | 110.000 | 40.000 | 150.000 |
| | Metal Frame | 875.000 | 375.000 | 1.250.000 |
| | Tambahan per 1 Gigi MF | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 6 | Pemasangan Protosa | | | |
| | Protosa lepas sebagian acrilyc 1 gigi/rahang | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| | Tambalan 1 gigi/rahang | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| | Rebasing potesa penuh/rahang | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| | Reparasi protosa sebagian | 245.000 | 105.000 | 350.000 |
| | Mahkota/jacket crown acrilyc | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| | Mahkota/jacket crown porcelain | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| | Protosa penuh/rahang | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| | Bridge acrilyc | 420.000 | 180.000 | 600.000 |
| I | Tindakan Operasi Sederhana | | | |
| | a. Kontrol dan pembersihan luka | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| | b. Buka jahitan | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| | c. Drainase abses | | | |
| | #. Treperasi | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| | #. Insisi | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| | d. Buka wiring | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| II | Tindakan Operasi Kecil | | | |
| | a. Alveolectomy/Segmen/Rahang | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| | b. Frenectomy/Operculectomi | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| | c. Epulis / Fibroma | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| | d. Enuklase Kista Kecil | 280.000 | 120.000 | 400.000 |
| | e. Apecresectie | 315.000 | 135.000 | 450.000 |
| | f. Reposisi luksasi mandibula | 315.000 | 135.000 | 450.000 |
| | g. Gingivektomi | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| III | Tindakan Operasi Sedang | | | |
| | a. Odontectomi | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| | b. Marsupialisasi kista | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| | c. Wiring/Splinting | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| | d. Rekontruksi jaringan lunak | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| | e. Reimplantasi gigi avulsi | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 8 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 9 | Curatage | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 10 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 11 | Eksisi epulis | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 12 | Ekstisparsi mucocela | 494.000 | 211.000 | 705.000 |
| 13 | Ekstraksi | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 14 | Exodonti | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 15 | Follow up care post op | 325.000 | 139.000 | 464.000 |
| 16 | Incisi abses | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 17 | Incisi biopsi | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 18 | Incersi obturator | 1.793.000 | 768.000 | 2.561.000 |
| 19 | Lepas arch bar | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 20 | Lepas intermaksilar fixation | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 21 | Odontektomi gigi geraham bungsu | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 22 | Overculektomi | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 23 | Pasang arch bar | 595.000 | 255.000 | 850.000 |
| 24 | Pembedahan gigi | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 25 | Pemeliharaan saluran akar | 343.000 | 147.000 | 490.000 |
| 26 | Penambalan tetap | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 27 | Perawatan luka jahitan | 101.000 | 43.000 | 144.000 |
| 28 | Refiksasi wire | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 29 | Rontgen gigi | 393.000 | 168.000 | 561.000 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|---------|---------|---------|
| 30 | Scaling dan curatage | 393.000 | 168.000 | 561.000 |
| 31 | Tindakan hecting luka kecil | 169.000 | 72.000 | 241.000 |
| 32 | Trepanasi | 393.000 | 168.000 | 561.000 |

TARIF POLIKLINIK SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|--|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Pemeriksaan intra oral kamera | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 2 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 3 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 4 | Spooling dan sterilisasi area gigi dan rongga mulut | 52.500 | 22.500 | 75.000 |
| 5 | Cetak rahang/model study pre operasi | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 6 | Tindakan perawatan perdarahan dengan tampon | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 7 | Occlusal adjusment per rahang | 280.000 | 120.000 | 400.000 |
| 8 | Aff jahitan (ringan, sedang, berat) | 245.000 | 105.000 | 350.000 |
| 9 | Aff obturator/dental wiring/IMW dengan lokal anastesi | 280.000 | 120.000 | 400.000 |
| 10 | Aff IDW-IMW memakai Arch Bar per rahang dengan lokal anastesi | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 11 | Perawatan nyeri dengan blok anastesi | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 12 | Perawatan luka (ganti verban) kompleks | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 13 | Perawatan luka (ganti verban) ringan | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 14 | Penjahitan mukosa bibir (1-5) | 560.000 | 240.000 | 800.000 |
| 15 | Cabut gigi susu dengan injeksi kecil | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 16 | Cabut gigi susu tanpa injeksi kecil | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 17 | Debridement ringan dengan penjahitan | 280.000 | 120.000 | 400.000 |
| 18 | Perawatan Dry socket | 280.000 | 120.000 | 400.000 |
| 19 | Trepanasi gigi dan gusi | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 20 | Reposisi luksasi mandibula | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 21 | Insisi abses intra oral per rahang | 560.000 | 240.000 | 800.000 |
| 22 | Penjahitan lidah (1-5) | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| 23 | Frenektomi | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 24 | Cabut gigi permanen dengantindakan ringan (penyulit/sistemik)-akar tunggal | 280.000 | 120.000 | 400.000 |
| 25 | Cabut gigi dengan tindakan sedang (penyulit/sistemik) | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 26 | Cabut gigi dengan tindakan berat (penyulit/sistemik) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 27 | Debrident luas dengan penjahitan | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| 28 | Eksisi jaringan lunak (lidah,gingiva, bibir) < 2 cm | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| 29 | Insisi abses ekstra oral per rahang | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| 30 | Ekstirpasi mucocela dengan anastesi lokal per rahang | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| 31 | Excisi/epulis per rahang | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| 32 | Operkulektomi | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| 33 | Eksposure gigi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 34 | Fibroma gusi per rahang ringan-sedang | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 35 | Cabut gigi mesioden / simpleodontoma | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 36 | Fistulektomi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 37 | Odontektomi geraham kategoriringan dengan anastesi lokal | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 38 | Odontektomi geraham kategorisedang dengan anastesi lokal | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| 39 | Odontektomi geraham dankaninus terpendam kategori berat dengan anastesi lokal | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 40 | Biopsi (insisi) dengan lokalanastesi perrahang (diluar Patologi Anatomi) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 41 | Biopsi (eksisi) tumor jinak jaringan keras pada tulang > 2 cm | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 42 | Ekstirpasi fibroma lidah dengan anastesi lokal | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 43 | Ekstirpasi fibroma bibir dengan anastesi lokal per rahang | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 44 | Ekstirpasi/enukleasi kista odontogenik sederhana dengan anastesi lokal per rahang | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 45 | Fibroma gusi per rahang ringan-besar | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 46 | Alveolektomi per regio | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 47 | Apeks reseksi per gigi/anterior (Apikoektomi) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 48 | Apeks reseksi per gigi/posterior (Apikoektomi) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 49 | Bedah ankilglosia | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 50 | Bedah oroantral fistula dengan anastesi lokal | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 51 | Splinting Interdental wiring gigiper rahang (Softwire) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 52 | Splinting Interdental wiring gigiper rahang (Archbar) | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| 53 | Vestibuloplasti (sulkus bukalis extension atau deepening) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 54 | Operasi tumor jinak dengan lokalanastesi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 55 | Insisi pleghmon dasar mulut | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 56 | Reduksi tertutup fraktur (Closed Reduction) atau dislokasi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 57 | Ekstirpasi batu saluran kelenjar (marsupialisasi) per saluran | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 58 | Replanatasi/transplantasi per gigi | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |

TARIF POLIKLINIK MATA

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|-------------------------|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Autorefraktometer | 7.000 | 3.000 | 10.000 |
| 2 | Anel Test | 350.000 | 150.000 | 50.000 |
| 3 | Ganti Verban | 17.500 | 7.500 | 25.000 |
| 4 | Pengambilan Benda Asing | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 5 | Buka Jahitan | 17.500 | 7.500 | 25.000 |
| 6 | USG Mata | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 7 | Biometri | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 8 | Buta Warna | 52.500 | 22.500 | 75.000 |
| 9 | Pemeriksaan Air Mata | 24.500 | 10.500 | 35.000 |
| 10 | OCT Makula | 2.100.000 | 900.000 | 300.000 |
| 11 | OCT Papil | 2.100.000 | 900.000 | 300.000 |
| 12 | Eviserasi | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 13 | E nukleasi | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| 14 | Jahit Kelopak Mata | 2.100.000 | 900.000 | 3.000.000 |
| 15 | Jahit Konjungtiva Bulbi | 2.100.000 | 900.000 | 3.000.000 |
| 16 | Jahit Sclera | 2.100.000 | 900.000 | 3.000.000 |
| 17 | Jahit Cornea | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| 18 | YAG Laser | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| 19 | Laser Retina | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 20 | Injeksi Avastin | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 21 | Injeksi Vancomisin | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 22 | Infus Manitol | 420.000 | 180.000 | 600.000 |
| 23 | Fakoemulsifikasi | 4.200.000 | 1.800.000 | 6.000.000 |
| 24 | Pterygium | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| 25 | Chalazion | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| 26 | Incisi Abses | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| 27 | Parasintesis | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| 28 | Ekstirpasi Granuloma | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| 29 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 30 | Pemeriksaan fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 31 | Funduscopy | 83.000 | 35.000 | 118.000 |
| 32 | Pemeriksaan fisus | 83.000 | 35.000 | 118.000 |
| 33 | Slit lamp | 83.000 | 35.000 | 118.000 |
| 34 | Tonometri | 83.000 | 35.000 | 118.000 |
| 35 | Schimer's test | 88.000 | 37.000 | 125.000 |
| 36 | Irigasi mata | 85.000 | 36.000 | 121.000 |
| 37 | Epilasi | 103.000 | 44.000 | 147.000 |
| 38 | Ekstraksi corpus alienum | 85.000 | 36.000 | 121.000 |
| 39 | Fluorescent test | 87.000 | 38.000 | 125.000 |
| 40 | Probing puctum lacrimal | 108.000 | 46.000 | 154.000 |
| 41 | Spoeling kornea & konjungtiva | 146.000 | 62.000 | 208.000 |
| 42 | Injeksi subkonjungtiva | 146.000 | 62.000 | 208.000 |
| 43 | Insisi hordeulum | 161.000 | 69.000 | 230.000 |

TARIF POLIKLINIK NEUROLOGI

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|--|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Lumbal pungsi | 448.000 | 192.000 | 640.000 |
| 2 | Funduscopy | 84.000 | 36.000 | 120.000 |
| 3 | Trans Cranial Doppler (TCD) | 560.000 | 240.000 | 800.000 |
| 4 | EEG | 400.000 | 170.000 | 570.000 |
| 5 | EMG | 560.000 | 240.000 | 800.000 |
| 6 | Injeksi Intraartikular Elbow(Tenn/Gol) | 385.000 | 165.000 | 550.000 |
| 7 | Injeksi Intraartikular Knee | 385.000 | 165.000 | 550.000 |
| 8 | Injeksi Intraartikular Manus (CTS/DQ/GTS/IP) | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| 9 | Injeksi Intraartikular Pedis(PL/IP/Peritd) | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| 10 | Injeksi Intraartikular Shoulder | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| 11 | Injeksi Intraartikular SpineDengan Guiding USG | | | |
| | *. Non kelas | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| | *. Kelas III, II, I dan VIP | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| 12 | Injeksi pes anserin bursitisdengan guiding USG | | | |

| | | | | |
|----|--|-----------|---------|-----------|
| | *. Non kelas | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| | *. Kelas III, II, I dan VIP | 959.000 | 411.000 | 1.370.000 |
| 13 | Injeksi Plantar Facitis dengan Guiding USG | | | |
| | *. Non kelas | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| | *. Kelas III, II, I dan VIP | 721.000 | 309.000 | 1.030.000 |
| 14 | Injeksi Piriformis Syndrome dengan guiding USG | | | |
| | *. Non kelas | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| | *. Kelas III, II, I dan VIP | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| 15 | Injeksi Triger Finger dengan Guiding USG | | | |
| | *. Non kelas | 385.000 | 165.000 | 550.000 |
| | *. Kelas III, II, I dan VIP | 385.000 | 165.000 | 550.000 |
| 16 | Injeksi subacromion dengan USG guiding | | | |
| | *. Non kelas | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| | *. Kelas III, II, I dan VIP | 1.295.000 | 555.000 | 1.850.000 |
| 17 | Injeksi Rotator Cuff Syndrome dengan USG Guiding | 1.295.000 | 555.000 | 1.850.000 |
| 18 | Injeksi Dequervein syndrome dengan guiding USG | | | |
| | *. Non kelas | 385.000 | 165.000 | 550.000 |
| | *. Kelas III, II, I dan VIP | 903.000 | 387.000 | 1.290.000 |
| 19 | Injeksi Supratela Bursitis dengan guiding USG | | | |
| | *. Non kelas | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| | *. Kelas III, II, I dan VIP | 721.000 | 309.000 | 1.030.000 |
| 20 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 21 | EEG | 400.000 | 170.000 | 570.000 |
| 22 | Surat keterangan | 30.000 | 12.000 | 42.000 |
| 23 | Pemeriksaan kekuatan otot | 36.000 | 15.000 | 51.000 |
| 24 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |

TARIF POLIKLINIK JANTUNG

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|---------------------------|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Echocardiografi | 104.300 | 44.700 | 149.000 |
| 2 | Treadmil | 245.000 | 105.000 | 350.000 |
| 3 | USG Dopler (jantung) | 280.000 | 120.00 | 400.000 |
| 4 | Cardioversi | 147.000 | 63.000 | 210.000 |
| 5 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 6 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 7 | Surat keterangan | 30.000 | 12.000 | 42.000 |
| 8 | Pasang EKG | 119.700 | 51.300 | 171.000 |

TARIF POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|----------------------|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Pungsi cairan asites | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 2 | Pungsi cairan pleura | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 3 | Pungsi cairan sendi | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 4 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |

| | | | | |
|---|---------------------------|--------|--------|---------|
| 5 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 6 | Rectal touce | 90.000 | 38.000 | 128.000 |
| 7 | Surat keterangan | 30.00 | 12.000 | 42.000 |

TARIF REHABILITASI MEDIK

| No | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|---|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Latihan Fisik dengan Alat | 38.000 | 17.000 | 55.000 |
| 2 | Okupasi Terapi | 49.000 | 21.000 | 70.000 |
| 3 | Terapi Wicara | 56.000 | 24000 | 80.000 |
| 4 | Massage / Vibrator | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 5 | Latihan Gerak Aktif danPasif Movement | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 6 | Chest Fisioterapy | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| 7 | Stimulasi motorik | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| 8 | Stimulasi sensorik | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| 9 | Short Wave Diathermi(SWD) | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 10 | Micro Wave Diathermi(MWD) | 66.000 | 28.000 | 94.000 |
| 11 | Faradisasi dengan alat | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 12 | Traksi Lumbal / Cervical | 56.000 | 24.000 | 80.000 |
| 13 | Ultra Sound Terapi (UST) | 38.000 | 17.000 | 55.000 |
| 14 | Hydro Terapi | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 15 | Nebulaizer | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| 16 | Infra Red (IR) | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 17 | Ultra Violet (UV) | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 18 | Tens | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| 19 | Crio Terapi | 66.000 | 28.000 | 94.000 |
| 20 | Latihan menelan | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 21 | Manual lympe drainagevaskular | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 22 | Manual therapy | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 23 | Ostegatre | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
| 24 | Stimulasi otomotor | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
| 25 | Terapi latihan anak | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 26 | Laser Terapi | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 27 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 28 | Latihan ROM/LGS/Peregangan/DSRPanggul | 66.000 | 28.000 | 94.000 |
| 29 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 30 | Latihan resistif/penguatan | 97.000 | 41.000 | 138.000 |
| 31 | Latihan mobilisasi/ ambulasi & keseimbangan | | | |
| 32 | Massage bayi dan lokal | 100.000 | 42.000 | 142.000 |
| 33 | Latihan koordinasi danmotorik kasar | 66.000 | 28.000 | 94.000 |
| 34 | Sepeda statis | 97.000 | 42.000 | 139.000 |
| 35 | Shoulder will | 97.000 | 42.000 | 139.000 |
| 36 | Ultra Sound Diathermy | 66.000 | 28.000 | 94.000 |

TARIF PELAYANAN MEDICAL CHEK UP (MCU)

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|---------------------------|--------------|----------------|--------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 2 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 3 | Surat keterangan | 30.000 | 12.000 | 42.000 |

TARIF PELAYANAN POLIKLINIK BEDAH SYARAF

| No | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|-----------------------------------|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Tindakan Medis non operatif | | | |
| | a. Uff hecting, uff drain | | | |
| | *. Kecil | 56.000 | 24.000 | 80.000 |
| | *. Sedang | 112.000 | 48.000 | 160.000 |
| | *. Besar (aspirasi haematom) | 224.000 | 96.000 | 320.000 |
| | *. Khusus(aspirasihaematom) | 455.000 | 195.000 | 650.000 |
| 2 | Ganti verban besar | 97.000 | 41.000 | 138.000 |
| 3 | Ganti verban sedang | 66.000 | 28.000 | 94.000 |
| 4 | Ganti verban kecil | 51.000 | 21.000 | 72.000 |
| 5 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 6 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 7 | Perawatan luka jahitan | 101.000 | 43.000 | 144.000 |
| 8 | Perawatan luka kotor tanpahecting | 238.000 | 102.000 | 340.000 |

TARIF PELAYANAN VCT

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|------------------|--------------|----------------|--------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 2 | Surat keterangan | 30.000 | 12.000 | 42.000 |

TARIF PELAYANAN KB

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|------------------|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 2 | Lepas AKDR (IUD) | 40.000 | 17.000 | 57.000 |
| 3 | Lepas implan | 106.000 | 46.000 | 152.000 |
| 4 | Pasang implan | 265.000 | 114.000 | 379.000 |
| 5 | Pasang IUD | 206.000 | 88.000 | 294.000 |
| 6 | Tubektomi | 520.000 | 222.000 | 742.000 |

TARIF DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|---|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | EKG | 120.000 | 51.000 | 171.000 |
| 2 | a. Endoscopic Ultra Sound(EUS) | 773.500 | 331.500 | 1.105.000 |
| | b. EUS + FNA | 910.000 | 390.000 | 1.300.000 |
| 3 | Biopsi Hati/Pungsi, AspirasiAbscess Hati/Acites | 273.000 | 117.000 | 390.000 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 4 | Kolonoskopi dengan Polipektomi | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 5 | Endoskopi saluran cerna bagian atas (Esophago - Gastro – Duonescopi) tanpa Biopsi | 318.500 | 136.500 | 455.000 |
| 6 | Endoskopi saluran cerna bagian bawah | 431.900 | 185.100 | 617.000 |
| 7 | Biopsi melalui Endoskopi SCatas | 402.500 | 172.500 | 575.000 |
| 8 | ERCP | | | |
| | a.ERCP Spchincterotomy | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| | b.ERCP + Stent | 3.150.00 | 1.350.000 | 4.500.000 |
| | c.ERCP + Pengeluaran BatuSal. Empedu | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 9 | Biopsi melalui Kolonoskopi | 546.000 | 234.000 | 780.000 |
| 10 | Endoskopi saluran cerna dengan Skleroterapi Varises Esofagus | 546.000 | 234.000 | 780.000 |
| 11 | Endoskopi saluran cerna dengan Ligasi Varises Esofagus | 568.400 | 243.600 | 812.000 |
| 12 | Endoskopi pengeluaran benda asing | 691.600 | 296.400 | 988.000 |
| 13 | Pengambilan cairan dalam lambung (lumbal lambung) | 80.500 | 34.500 | 115.000 |
| 14 | Aspirasi Abses Hati | 105.000 | 45.000 | 150.000 |
| 15 | Aspirasi Plural Fungsi | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 16 | Aspirasi Ascites | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 17 | Paraceutesis Ascites (Large Volume) | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| 18 | Treadmill Test | 227.500 | 97.500 | 325.000 |
| 19 | Eko Kardiografi | 273.000 | 117.000 | 390.000 |
| 20 | Suction | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| 21 | Holter Monitor | 420.000 | 180.000 | 600.000 |
| 22 | Monitor EKG | 105.000 | 45.000 | 150.000 |

TARIF PSIKOLOGIS

| NO | U R A I A N | TARIF USULAN | | |
|----|------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Konseling | 44.000 | 104.000 | 148.000 |
| 2 | Test intelegensi anak | 170.000 | 72.000 | 242.000 |
| 3 | Test intelegensi dan kepribadian | 170.000 | 72.000 | 242.000 |
| 4 | Test kesiapan sekolah | 170.000 | 72.000 | 242.000 |
| 5 | Test minat bakat pemilihan jurusan | 254.000 | 109.000 | 363.000 |
| 6 | Test tumbuh kembang anak | 170.000 | 72.000 | 242.000 |
| 7 | Surat keterangan | 30.000 | 12.000 | 42.000 |

TARIF PEMULASARAN JENAZAH

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|--------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Pemulasaran jenazah covid | 2.776.000 | 1.189.000 | 3.965.000 |
| 2 | Pemulasaran jenazah kecelakaan | 730.000 | 313.000 | 1.043.000 |

| | | | | |
|----|---|---------|---------|-----------|
| 3 | Pemulasaran jenazah orang matihanyut | 768.000 | 329.000 | 1.097.000 |
| 4 | Pengawetan dengan formalin | 916.000 | 393.000 | 1.309.000 |
| 5 | Perawatan jenazah | 191.000 | 81.000 | 272.000 |
| 6 | Surat keterangan kematian | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 7 | Konseling Visum jenazah | 420.000 | 180.000 | 600.000 |
| 8 | Pemeriksaan orang hidup (visum)per spesialistik | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 9 | Surat keterangan kematian untuk asuransi | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 10 | Visum Jenazah | 175.000 | 75.000 | 250.000 |

PELAYANAN PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|---|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Iuran wajib /bulanan | 136.500 | 58.500 | 195.000 |
| 2 | Pemusnahan sampah medis/ m ³ | 318.500 | 136.500 | 455.000 |
| 3 | Pengelolaan Limbah Medis/ kg | 35.000 | 15.000 | 50.000 |

TARIF UNIT TRANSFUSI DARAH

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|--|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Whole Blood (WB) per 250cc/bag | 245.000 | 105.000 | 350.000 |
| 2 | Packet Red Cell | 262.500 | 112.500 | 375.000 |
| 3 | Pencucian Darah (WashPRC) | 490.000 | 210.000 | 700,000 |
| 4 | Trombosit Concentrate | 280.000 | 120.000 | 400.000 |
| 5 | Fresh Frozen Plasma | 560.000 | 240.000 | 800.000 |
| 6 | Crayo Precipitate | 630.000 | 270.000 | 900,000 |
| 7 | Biaya Donor Pengganti | 140.000 | 60.000 | 200.000 |
| 8 | Anamnase calon donor | 37.000 | 16.000 | 53.000 |
| 9 | Ambil sampel darah | 27.000 | 12.000 | 39.000 |
| 10 | Periksa golongan darahpasein | 18.000 | 7.000 | 25.000 |
| 11 | Periksa hemoglobin, golongan darah calon donor | 38.000 | 16.000 | 54.000 |
| 12 | Periksa tekanan darah calondonor | 38.000 | 16.000 | 54.000 |
| 13 | Screening darah donor | 86.000 | 36.000 | 122.000 |
| 14 | Crossmatch | 86.000 | 36.000 | 122.000 |
| 15 | Pencatatan | 37.000 | 16.000 | 53.000 |

Keterangan : Jasa Sarana dalam tarif tersebut diatas belum termasuk biaya service darah (screening test) sebesar Rp. 120.000 per kantong darah (250 cc)

TARIF HAEMODIALISA

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Tindakan Haemodialisa | 546.000 | 234.000 | 780,000 |
| 2 | Pemasangan Cimino | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 3 | Double Lumen | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 4 | Pemeriksaan fisik | 16.000 | 7.000 | 23.000 |
| 5 | Desinfektan mesin hd | 128.000 | 55.000 | 183.000 |
| 6 | Desinfektan chemical mesinhemodialisa | 1.179.000 | 505.000 | 1.684.000 |
| 7 | Pungsi akses vaskuler venafemoralis | 27.000 | 11.000 | 38.000 |
| 8 | Pasang catheter double lumen | 828.000 | 355.000 | 1.183.000 |
| 9 | Ambil Sampel Darah | 22.000 | 10.000 | 32.000 |
| 10 | Pasang tranfusi | 119.000 | 51.000 | 170.000 |
| 11 | Perawatan luka tanpa jahitan | 33.000 | 14.000 | 47.000 |
| 12 | Lepas catheter double lumen | 33.000 | 14.000 | 47.000 |
| 13 | Injeksi IV, IM, SC | 8.500 | 3.500 | 12.000 |
| 14 | Perawatan catheter doublelumen | 54.000 | 23.000 | 77.000 |
| 15 | Buka AV fistula | 20.000 | 8.000 | 28.000 |
| 16 | Dialyzer reprosesing | 16.000 | 7.000 | 23.000 |

TARIF GAS MEDIS

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|---------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Oksigen Dewasa/Strip | 7.000 | 3.000 | 10,000 |
| 2 | Oksigen Anak/Strip | 4.200 | 1.800 | 6,000 |
| 3 | Oksigen Bayi (Perinato)/Strip | 3.500 | 1.500 | 5,000 |
| 4 | Oksigen Perinato dengan HeadBox/Strip | 7.000 | 3.000 | 10,000 |
| 5 | Oksigen dengan Ventilator/Strip | 9.100 | 3.900 | 13,000 |
| 6 | CO2/Liter | 105 | 45 | 150 |
| 7 | N2O/Liter | 315 | 140 | 450 |
| 8 | O2/Tabung 6p | 126.000 | 54.000 | 180.000 |
| 9 | O2/Tabung 2m ³ | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| 10 | O2/Tabung 1m ³ | 21.000 | 9.000 | 30.000 |

TARIF FARMASI

| NO | URAIAN | TARIF RETRIBUSI | | |
|----|------------|-----------------|----------------|-------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Harga Obat | 110% | 15% | 125% |

TARIF TINDAKAN PERSALINAN

| NO | URAIAN | TARIF USULAN | | |
|----|---|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Partus Normal | 364.000 | 156.000 | 520.000 |
| 2 | Ekstraksi Vacum | 682.500 | 292.500 | 975.000 |
| 3 | Manual Plasenta | 182.000 | 78.000 | 260.000 |
| 4 | Kurretase | 273.000 | 117.000 | 390.000 |
| 5 | Partus spontan + manualplasenta | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 6 | Manual aid | 1.225.000 | 525.000 | 1.750.000 |
| 7 | Manual aid pasien partusluar | 1.225.000 | 525.000 | 1.750.000 |
| 8 | Penanganan PPH pasienpartus luar | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| 9 | Pengangkatan kista | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| 10 | Kontap Post Partum | 840.000 | 360.000 | 1.200.000 |
| 11 | Kontap Laparoscopi | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| 12 | Laparoscopi diagnostik | 1.050.000 | 450.000 | 1.500.000 |
| 13 | Konisasi Cervix | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| 14 | Eksplorasi Haematon Pulpa | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| 15 | Colporaphy | 2.100.000 | 900.000 | 3.000.000 |
| 16 | Repair ruptus perineal /repair vagina | 2.100.000 | 900.000 | 3.000.000 |
| 17 | Extirpasi polyp cervix, condiloma, myoma geburt besar | 2.100.000 | 900.000 | 3.000.000 |
| 18 | Myomectomi tanpapenyulit | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| 19 | Ketektomi/SOD/SOS/ BSOtanpa penyulit | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| 20 | SC tanpa penyulit | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| 21 | Laparatomi ligasihypogastrica | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| 22 | Total abdominal hysterectomi dengan atau tanpa salpingo oph | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 23 | Trans vaginal hysterectomi(TNH) | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 24 | Kistektomi/SOD/SOS/ BSOdengan penyulit | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 25 | Hysterectomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 26 | Operasi porro | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 27 | Operasi Reposisi InversioUteri | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 28 | Laparatomi atas indikasiKET | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 29 | Hysteroroscopy | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 30 | Fistularaphy | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 31 | Vaginoplasty | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 32 | Laparoscopi operatif | 5.600.000 | 2.400.000 | 8.000.000 |
| 33 | Radikal Hysterectomi a/ica. cervix | 5.600.000 | 2.400.000 | 8.000.000 |
| 34 | Radikal Operasi a/i ca.ovarium | 5.600.000 | 2.400.000 | 8.000.000 |
| 35 | Radikal Vulvectomi a/i ca.vulva | 5.600.000 | 2.400.000 | 8.000.000 |

TARIF TINDAKAN BEDAH

| NO | URAIAN | TARIF USULAN | | |
|----------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| I | OPERASI KECIL | | | |
| | 1. ANAK | | | |
| | a. Hernia tanpa penyulit | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| | b. Hydrokel | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| | c. Appendictomy tanpapenyulit | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| | 2. DIGESTIF | | | |

| | | | |
|---|-----------|---------|-----------|
| a. Apendektomi tanpapenyulit | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| b. Fistulektomi | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| c. Hemoroidektomi | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| d. Hernioraphy tanpapenyukit | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| e. Peritoneal drainase | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| f. Gastrostomy feeding | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| 3. GIGI & MULUT | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| a. Enucleatie Kista | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| b. Excochiliasi | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| c. Extirpasi Tumor | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| d. Marsupialisasi Ranula | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| e. Odontectomy lebihdari 2 elemen | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| f. Reshaping untukTorus/Tumor | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| g. Suquestratomy | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| 4.KEBIDANAN/OBYGN | | | |
| a. Eksisi/Konisasi | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| b. LaparatomiPercobaan | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| c. Sirkulase | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| 5. MATA | | | |
| a. Foto Koagulasi | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| b. ICCE/ECCE (tidaktermasuk IOL) | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| 6. ONKOLOGY | | | |
| a. Biopsi insisi denganNarkose | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| b. Eksisi denganNarkose | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| c. Eksisi tumor jinak payudara (ec. FAM) | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| 7. ORTHOPEDI | 1.750.000 | 750.000 | |
| a. Removal implant (angkat plat/screw) | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| b. Dibredement FrakturTerbuka | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| c. Fiksasi ExternaSederhana | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| d. Fiksasi InternaTerbuka | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| e. Ganglion Poplitea | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| 8. PLASTIK | | | |
| a. Fraktur SederhanaOs Nasal | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| b. Kelainan Jari/Ekstremitas (Polidaktili, sindatili contruction hanf) sederhana | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| c. Labioplasti_Unilateral | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| d. Repair fistel urethrapasca uretroplasti | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| e. Repair luka robek sederhana pada wajah | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| f. Terapi Sklerosing | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| 9. SARAF | | | |
| a. Biopsi Saraf Kutaneus / Otot | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| b. Blok Saraf Tepi | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| c. Pungsi Cairan Otak | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| 10.THT | | | |
| a. Extirpasi Polip | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| b. Kaak Spoeling | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| c. Tonsilektomi | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| d. Turbinektomi | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| 11.UROLOGY | | | |
| a. Biopsi Prostat | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| b. Biopsi Testis | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|
| | c. Meatonomi | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| | d. Sirkumsisi dengan Phymosis | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| | e. Sistoskopi | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| I | OPERASI SEDANG | | | |
| | 1. ANAK | | | |
| | a. Hernia denganpenyulit | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | b. Hypospadi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | 2. DIGESTIF | 2.450.000 | 1.050.000 | |
| | a. Apendektomi Perforasiper Laparatomy | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | b. Hernia dengan penyulit (inkarserata, recurrent, strangulata,dll) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | c. Laparatomy adhesiolisis sederhana | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | 3. GIGI & MULUT | | | |
| | a. Blok Resectie | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | b. Extirpatie PlungingRanula | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | c. Fraktur RahangSimple | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | d. Reposisi Fixatie(Compucate) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | 4.KEBIDANAN/OBGYN | | | |
| | a. Adenolisis | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | b. Exflorasi Vagina | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | c. Hystrectomy Partial | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | d. Kehamilan EktopikTerganggu (KET) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | e. Kistektomi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | f. Kolpodeksis | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | g. Manchester Fortegil | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | h. Myomectomy | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | i. Repair Fistel | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | j. Salpingofortektomi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | k. Seksio Sasaria | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | 5. MATA | | | |
| | a. Argon Laser/Kenon | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | b. Congenital FornixPlastik | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | c. Cyclodia Termi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | d. Koreksi Extropion/Entropion | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | e. Rekanalisasi Ruptura /Transkanal | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | f. Symblypharon | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 6. ONKOLOGY | | | | |
| a. Caldwell LucAnthrostomi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |
| b. Eksisi Kelenjar LiurSubmandibula | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |
| c. Eksisi /kista Tiroglosus | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |
| d. Mastektomi Subkutaneus | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |
| e. Potong Flap | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |
| f. Segmentektomi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |
| g. Tracheostomi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |
| 7.ORTOPEDI | | | | |
| a. Amputasi jari | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |
| b. Disartikulasi jari | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |
| c. Fiksasi Internal yangKompleks (tidak termasuk alat) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |
| d. Repair stump | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |
| 8.PLASTIK | | | | |
| a. Debridement pada luka bakar | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |
| b. Fiksasi internal Fraktur Rahang Sederhana (tidak termasuk alat) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |
| c. Release Kontraktur sederhana | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 | |

| | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | d. Labioplasti Bilateral | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | e. Operasi Mikrotia | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | f. Palatoplasti | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | g. Repair Luka Kompleks pada Wajah | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | h. Repair Tendon Jari | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | i. Skingrafting yang tidak luas | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | j. Debridement pada lukabakar | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | k. Fiksasi internal Fraktur Rahang Sederhana (tidak termasuk alat) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | l. Release Kontraktur sederhana | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | m. Labioplasti Bilateral | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | n. Operasi Mikrotia | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | o. Palatoplasti | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | p. Repair Luka Kompleks pada Wajah | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | q. Repair Tendon Jari | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | r. Skingrafting yang tidak luas | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | 9.THT | | | |
| | a. Altrostomi/Cald WellLuc (CWL) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | b. Bronchoscopy Rigid | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | c. Eksplorasi Abses Parafaringeal | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | d. Eksplorasi Kista Branchial | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | e. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglossus | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | f. Eksplorasi Kista Tiroit | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | g. Ethmoidektomi (Intranasal) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | h. Pemasangan Pipa Shepard | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | i. Pemasangan Tube | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | j. Regional Flap | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | k. Septum Reseksi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | l. Tonsilo Adenoidectomi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | m. Tracheostomi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | 10.UROLOGY | | | |
| | a. Orchidektomi Subkapsuler | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | b. Spermatocoele | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | c. Open Renal Biopsi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | d. Ureterolysis | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | e. Ureterostomi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | f. Drainage Periureter | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | g. Torsio Testis | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | h. Koreksi Priapismus | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | i. Vasografi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | j. Penektomi | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | k. Eksisi Chodee | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | l. Vesicolithotomi (Sectio Alta) | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | m. Vericocele / Palomo | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | 11.VASKULER | | | |
| | a. Cimino | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | b. Penyakit Pembuluh Darah Perifer/pemasangan CDL | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| III | OPERASI BESAR | | | |
| | 1. ANAK | | | |
| | a. Anoplasty pada Atheresia Ani | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| | b. Colostomy/ileostomy | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| | 2. DIGESTIF | | | |
| | a. Eksplorasi Koledokus | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| | b. Herniatomi Bilateral | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| c. Kolesistektomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| d. Laparatomi Eksplorasi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| e. Reseksi Anastomosis | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| f. Transeksi Esofagus | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| g. Colostomy/ileostomy | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 3. GIGI DAN MULUT | | | |
| a. Athroplasty | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| b. Freaktur Rahang Multiple/Kompleks | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| c. Orthognatie Surgery | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| d. Resectie Rahang | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 4.KEBIDANAN/OBGYN | | | |
| a. Hystrectomy Total | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| b. Laparatomi VC | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| c. Operasi Perineum | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| d. Operasi Tumor JinakOvarium | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| e. Reseksi Adeniosis | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| f. Salpingo Ophorectomy | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 5.MATA | | | |
| a. Anterior / PoteriorSklerotomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| b. Cyclodialysa | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| c. Extraksi Linear | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| d. Goniotomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| e. Keratoplastie Lamelar | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| f. Strasbismus | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| g. Trabekulektomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| h. Tridenelisis | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| i. Tumor Ganas / Adnesaluas dengan rekontruksi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 6.ONKOLOGY | | | |
| a. Amputasi Eksisi KistaBranchiogenik | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| b. Eksisi Mamma Aberran | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| c. Memiglosektomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| d. Isthobektomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| e. Mandibulektomi/marginalis | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| f. Masilektomi Partialis | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| g. Mastektomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| h. Eksisi KGB axilla/inguinal | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 7.ORTHOPEDI | | | |
| a. CTEV | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| b. Open Reduksi Fraktur /Dislokasi Lama | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| c. Amputasi tulangpanjang | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 8.PLASTIK | | | |
| a. Eksisi HemangionaKompleks | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| b. Fraktur Maksila/Zygoma | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| c. Kontraktur Kompleks | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| d. LabiopalatoplastiBilateral | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| e. Rekontruksi Defek/Kelainan Tubuh | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| f. Salvaging OperasiMikro | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| g. Skringrafting yang luas | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| h. Uretroplasti | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 9.THT | | | |
| a. AngiofibromaNasofaring | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| b. Dekompresia Fasialis | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| c. Fare Head Flap | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| d. Faringotomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| e. Laringo Fisur/Eksplorasi Laring | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| f. Mastoidektomi Radikal | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| g. Myringoplasty | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| h. Neurektomi SarafVidian | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| i. Parotidektomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| j. Pharyngeal Flap | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| k. Pronto Etmoidektomi(Ekstranasal) | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| l. Rinotomi Lateralis | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 10.UROLOGY | | | |
| a. Divertikulektomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| b. Enukleasi Kista Ginjal | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| c. Fistula Eterovesika | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| d. Internal Urethrotomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| e. Litrotipsi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| f. Nefropexie | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| g. Nefrostomi Open | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| h. Operasi Peyronie | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| i. Orcidektomi LigasiTinggi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| j. Orchidopexi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| k. ProstatektomiRetropubik | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| l. Psoas Hiscth / Boari Flap | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| m. Pyelolithomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| n. Pyeloplasty | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| o. Rekontruksi Blassemeck | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| p. Rekontruksi Vesika | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| q. Open prostatectomy | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| r. Reparasi Fistula VesikoVaginal | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| s. Reseksi partial vesika | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| t. Reseksi urachus | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| u. Sistoplasti reduksi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| v. Uretero Sigmoidostomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| w. Uretero Ureterostomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| x. Uretero cutaneostomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| y. Ureterolithotomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| z. Urethrektomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 11.VASKULER | | | |
| a. Simpatektomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| b. Splenektomi | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| c. Tumor Pembuluh Darah | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| d. Graf Vena membuat AVistula | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| IV OPERASI KHUSUS | | | |
| 1. ANAK | | | |
| a. Atresia Esofagus | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| b. Dunamel | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| c. PSA | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| d. Splenekomi Partial | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| 2. DIGESTIF | | | |
| a. Gastrectomi (Billroth 1 & 2) | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| b. Koledoko Jejenostomi | 4.550.000 | 1.950.000 | 6.500.000 |
| c. Laparaskopik Kolesistektomi | 4.550.000 | 1.950.000 | 6.500.000 |
| d. Mega Kolon Hirchprung | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| e. Miles Operation | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| f. Pankreaktektomi | 4.550.000 | 1.950.000 | 6.500.000 |
| g. Reseksi EsofagusInterposisi Colon | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| h. Reseksi Hepar | 4.550.000 | 1.950.000 | 6.500.000 |
| i. Splenektom | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| 3.KEBIDANAN/OBGYN | | | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| a. Debulking | 4.550.000 | 1.950.000 | 6.500.000 |
| b. Histrectomy Radikal | 5.460.000 | 2.340.000 | 7.800.000 |
| c. Laparoscopy Operatif | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| d. Operasi Tumor Ganas Ovarium | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| e. Surgical Staging | 4.550.000 | 1.950.000 | 6.500.000 |
| f. Vulvektomi | 5.460.000 | 2.340.000 | 7.800.000 |
| 4.MATA | | | |
| a. Albatio Retina | 2.100.000 | 900.000 | 3.000.000 |
| b. Dekompresi | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| c. Fraktur Tripodo / Multipel | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| d. Orbitotomi Lateral | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| e. Rekontruksi Kelopak Berat | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| f. Rekontruksi Orbita Congenital | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| g. Orbitotomi Lateral | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| h. Rekontruksi Kelopak Berat | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| i. Rekontruksi Orbita Congenital | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| j. Rekontruksi Saket Berat | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| k. Tripel Prodeser Keratiplastidengan Glaukoma | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| l. Virtrektomi | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| 5.ONKOLOGI | | | |
| a. Deseksi Kelenjar Inguinal | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| b. Diseksi Leher RadikalModifikasi / Fungsional | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| c. Eksisi Luas Radikal +Rekontruksi | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| d. Glosektomi Totalis | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| e. Hemiglosektomi + RND | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| f. Hemipelvektomi | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| g. Maksilektomi Totalis | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| h. Mandibulektomi Partialisdengan Rekontruksi | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| i. Mandibulektomi Totalis | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| j. Mastektomi Radikal | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| k. Parotidektomi Radikal +Mandibulektomi | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| l. Pembedahan Forequater | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| 6.THT | | | |
| a. Fungsional Endoscopy SinusSurgery (FESS) | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| b. Glosektomi Total | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| c. Laringektomi | | | 3.900.000 |
| d. Myocutaneous Flap / PectoralMayor | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| e. Radical Neck Desection | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| f. Stapedektomi | 2.730.000 | 1.170.000 | 3.900.000 |
| g. Temporal Bone Resection | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| h. Timpano Plastik | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| 7.UROLOGY | | | |
| a. Adrenalektomi Abdominotorakal | 6.370.000 | 2.730.000 | 9.100.000 |
| b. Bladder Neck Incision | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| c. Deseksi KGB Pelvis | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| d. Divertikulektomi Vesika | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| e. Epididimovasostomi | 6.370.000 | 2.730.000 | 9.100.000 |
| f. Explorasi Testis MikroSurgery | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| g. Extended Pyelolithektomi (Gilverne) | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| h. Horseshoe KidneyKoreksi | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| i. Ileal Condoit (Bricker) | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| j. LimfadenektomiIleoingual | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| k. LimfadenektomiRetroperitoneal | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| l. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet) | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| m. Mikrosurgeri LigasiVena Sprematika | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| n. Nefroktomi Partial | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| | o. Netro Ureterektomi | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| | p. Nefrostomi Percutan | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| | q. Percutaneous Nephrolithostrispy(PCNL) | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| | r. Radical Cystektomi | 6.370.000 | 2.730.000 | 9.100.000 |
| | s. Radical Nefroktomi | 6.370.000 | 2.730.000 | 9.100.000 |
| | t. Radical Prostatektomi | 6.370.000 | 2.730.000 | 9.100.000 |
| | u. Rekontruksi Renovaskular | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| | v. Repair Vesico VaginaFistel Complex | 6.370.000 | 2.730.000 | 9.100.000 |
| | w. RPNLD | 6.370.000 | 2.730.000 | 9.100.000 |
| | x. TUR Prostat | | | 5.200.000 |
| | y. TUR Tumor Buli-buli | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| | z. UreteroneoCystosthomi | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| | 8.VASKULAR | | | |
| | a. Aneurisma Aorta | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| | b. Arteri Carotis | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| | c. Arteri Renalis Stenosis | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| | d. Grafting pada ArterialInsufisiensi | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| | e. Operasi Vaskuler yangmemerlukan Tehnik Operasi Khusus | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| | f. Shunting : | | | |
| | 1) Femoralis | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| | 2) Poplitea / Tibialis | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| | 3) Splenorenal | 3.640.000 | 1.560.000 | 5.200.000 |
| 1 | Antiseptik pada kulit | 88.000 | 38.000 | 126.000 |
| 2 | Menutup luka operasi | 52.500 | 22.500 | 75.000 |
| 4 | Memasang kateter | 108.500 | 46.500 | 155.000 |
| 5 | Membalut luka | 73.500 | 31.500 | 105.000 |
| 6 | Memasang infus | 75.000 | 32.000 | 107.000 |
| 7 | Memasang monitor | 40.000 | 17.000 | 57.000 |
| 8 | Memasang NGT | 87.500 | 37.500 | 125.000 |
| 9 | Memasang oksigen | 80.000 | 34.000 | 114.000 |
| 10 | Memfiksasi drain | 38.500 | 16.500 | 55.000 |
| 11 | Memonitor kondisihaemodynamic dan memantau cairan tubuhselama pembedahan | 61.000 | 26.000 | 87.000 |
| 12 | Injeksi IV/ IM/ SC | 63.000 | 27.000 | 90.000 |
| 13 | Desinfeksi instrument | 356.000 | 152.000 | 108.000 |
| 14 | Section Caesaria | 5.098.000 | 2.185.000 | 7.283.000 |
| 15 | Curettage of uterus | 4.782.000 | 2.050.000 | 6.832.000 |
| 16 | Laparotomy exploration | 5.338.000 | 2.288.000 | 7.626.000 |
| 17 | Amputation of finger | 4.619.000 | 1.980.000 | 6.599.000 |
| 18 | Appendectomy | 5.350.000 | 2.293.000 | 7.643.000 |
| 19 | Laparotomy | 4.991.000 | 2.139.000 | 7.130.000 |
| 20 | Complex Debridement withsedation | 4.518.000 | 1.936.000 | 6.454.000 |
| 21 | Herniotomy/ hernioraphy | 5.281.000 | 2.263.000 | 7.544.000 |
| 23 | Prostatectomy | 4.342.000 | 1.861.000 | 6.203.000 |
| 24 | Mastectomy | 3.954.000 | 1.695.000 | 5.649.000 |
| 25 | Abscess incision sedation | 4.345.000 | 1.862.000 | 6.207.000 |
| 26 | Lymphadenotectomy | 4.254.000 | 1.823.000 | 6.077.000 |
| 27 | Oophorectomy | 4.567.000 | 1.957.000 | 6.524.000 |
| 28 | Thoracocintesis | 4.344.000 | 1.862.000 | 6.206.000 |
| 29 | Circumsition with sedation | 4.547.000 | 1.949.000 | 6.496.000 |
| 30 | Excision of anus | 4.915.000 | 2.106.000 | 7.021.000 |
| 31 | Excision of soft tissue | 4.444.000 | 1.905.000 | 6.349.000 |
| 32 | Secondary hecting | 4.319.000 | 1.851.000 | 6.170.000 |
| 33 | Extraction of foreign bodywith sedation | 4.559.000 | 1.954.000 | 6.513.000 |
| 34 | Pasang CVP kateter | 4.599.000 | 1.971.000 | 6.570.000 |

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 35 | Hemorrhoidectomy | 5.281.000 | 2.263.000 | 7.544.000 |
| 36 | Repair of peripheralvascular/ nerve | 4.946.000 | 2.220.000 | 7.166.000 |
| 37 | rostatectomy | 5.038.000 | 2.160.000 | 7.198.000 |
| 38 | Repair of tendon | 4.600.000 | 1.970.000 | 6.570.000 |
| 39 | Water sealed drainage(WSD) procedure | 4.547.000 | 1.949.000 | 6.496.000 |
| 40 | Biopsy Without Excision | 390,000 | 263,000 | 653,000 |
| 41 | Catheter With mandrijn | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
| 42 | Circumsition WithoutSedation | 195,000 | 129,000 | 324,000 |
| 43 | Eksisi Tumor kecil < 5 cm | 390,000 | 263,000 | 653,000 |
| 44 | Extirpation of Small Benigtumor | 390,000 | 263,000 | 650,000 |
| 45 | Extraction of Foreign Bodywithout Sedation | 163,000 | 108,000 | 271,000 |
| 46 | Extraction of Nails WithLocal Anestesian | 203,000 | 135,000 | 338,000 |
| 47 | Fine Niddle AspirationBiopsy (FNAB) | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
| 48 | Incision of Abscess /hematoma without Sedation | 195,000 | 130,000 | 325,000 |
| 49 | Infiltrasi Haemangiom | 150,000 | 100,000 | 250,000 |
| 50 | Infiltrasi varices 1 tungkai/kecil | 230,000 | 153,000 | 383,000 |
| 51 | Simple Procedure ofDental & Mouth | 139,000 | 92,000 | 231,000 |
| 52 | Simple Necrotomy /debridement kecil | 357,000 | 238,000 | 595,000 |
| 53 | Splint Replacement | 122,000 | 81,000 | 203,000 |
| 54 | Temporomandibular Joint(TMJ) Reposition | 147,780 | 98,520 | 246,300 |
| 55 | Vasectomy | 394,000 | 262,000 | 656,000 |
| 56 | Venasection | 195,000 | 129,000 | 324,000 |
| 57 | Superficial Infection &Drainage of Fingers | 194,000 | 130,000 | 324,000 |
| 58 | Extraction Foreign Bodyof The Eye | 44,000 | 30,000 | 74,000 |
| 59 | Dermabration | 150,000 | 101,000 | 251,000 |
| 60 | Extirpation of Millium | 394,000 | 262,000 | 656,000 |
| 61 | Bougination | 804,000 | 535,000 | 1,339,000 |
| 62 | Antrostomy Wash-Out (AWO) without sedation | 393,000 | 263,000 | 656,000 |
| 63 | Biopsy Incision WithSedation | 1,050,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 64 | Circumsition WithSedation | 850,000 | 567,000 | 1,417,000 |
| 65 | Complex DebridementWith Sedation | 1,122,000 | 747,000 | 1,869,000 |
| 66 | Curretage With Sedation | 793,000 | 529,000 | 1,322,000 |
| 67 | Cymino | 850,000 | 567,000 | 1,417,000 |
| 68 | Cystoscopy | 806,000 | 538,000 | 1,344,000 |
| 69 | Excision of Benign Tumor > 5 cm | 1,187,000 | 792,000 | 1,979,000 |
| 70 | Extirpation Benign Tumorof Breast | 1,049,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 71 | Extirpation LymphaticWith Sedation | 1,049,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 12 | Extraction of Nails WithSedation | 1.049.000 | 699.000 | 1.729.000 |
| 73 | Fistulectomy Anal | 1.049.000 | 699.000 | 1.729.000 |
| 74 | Incision Hordeolum/Chalazion / Pterigium | 180,000 | 120,000 | 300,000 |
| 75 | Labioplasty incomplit /Simple | 862,000 | 575,000 | 1,437,000 |
| 76 | Laparoscopy Diagnostic | 806,000 | 538,000 | 1,344,000 |
| 77 | Lobuloplasty | 206,000 | 138,000 | 344,000 |
| 78 | Nasal Packing for Epistaxis | 173,000 | 115,000 | 288,000 |
| 79 | Procedure of Dental & Mouthwithout Sedation | 195,000 | 129,000 | 324,000 |
| 80 | Superficial Infection &Drainage of Fingers | 195,000 | 129,000 | 324,000 |
| 81 | Extraction Foreign Body ofThe Eye | 45,000 | 29,000 | 74,000 |
| 82 | Dermabration | 150,000 | 101,000 | 251,000 |
| 83 | Extirpation of Millium | 394,000 | 262,000 | 656,000 |
| 84 | Bougination | 803,000 | 536,000 | 1,339,000 |
| 85 | Antrostomy Wash-Out (AWO) without sedation | 394,000 | 262,000 | 656,000 |
| 86 | Biopsy Incision With Sedation | 1,050,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 87 | Circumsition With Sedation | 850,000 | 567,000 | 1,417,000 |
| 88 | Complex Debridement WithSedation | 1,122,000 | 747,000 | 1,869,000 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 89 | Curretage With Sedation | 792,000 | 530,000 | 1,322,000 |
| 90 | Cymino | 850,000 | 567,000 | 1,417,000 |
| 91 | Cystoscopy | 806,000 | 538,000 | 1,344,000 |
| 92 | Excision of Benign Tumor >5 cm | 1,187,000 | 792,000 | 1,979,000 |
| 93 | Extirpation Benign Tumor of Breast | 1,050,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 94 | Extirpation Lymphatic With Sedation | 1,050,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 95 | Extraction of Nails With Sedation | 1,050,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 96 | Fistulectomy Anal | 1,050,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 97 | Incision Hordeolum /Chalazion / Pterigium | 180,000 | 120,000 | 300,000 |
| 98 | Labioplasty incomplit /Simple | 863,000 | 574,000 | 1,437,000 |
| 99 | Laparoscopy Diagnostic | 806,000 | 538,000 | 1,344,000 |
| 100 | Lobuloplasty | 207,000 | 137,000 | 344,000 |
| 101 | Nasal Packing for Epistaxis | 173,000 | 115,000 | 288,000 |
| 102 | Procedure of Dental & Mouth without Sedation | 195,000 | 129,000 | 324,000 |
| 103 | Superficial Infection & Drainage of Fingers | 195,000 | 129,000 | 324,000 |
| 104 | Extraction Foreign Body of The Eye | 45,000 | 29,000 | 74,000 |
| 105 | Dermabration | 151,000 | 100,000 | 251,000 |
| 106 | Extirpation of Millium | 393,000 | 263,000 | 656,000 |
| 107 | Bougination | 803,000 | 536,000 | 1,339,000 |
| 108 | Antrostomy Wash-Out (AWO) without sedation | 394,000 | 262,000 | 656,000 |
| 109 | Biopsy Incision With Sedation | 1,050,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 110 | Circumsition With Sedation | 851,000 | 566,000 | 1,417,000 |
| 111 | Complex Debridement With Sedation | 1,122,000 | 747,000 | 1,869,000 |
| 112 | Curretage With Sedation | 793,000 | 529,000 | 1,322,000 |
| 113 | Cymino | 850,000 | 567,000 | 1,417,000 |
| 114 | Cystoscopy | 807,000 | 537,000 | 1,344,000 |
| 115 | Excision of Benign Tumor > 5 cm | 1,187,000 | 792,000 | 1,979,000 |
| 116 | Extirpation Benign Tumor of Breast | 1,049,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 117 | Extirpation Lymphatic With Sedation | 1,049,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 118 | Extraction of Nails With Sedation | 1,049,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 119 | Fistulectomy Anal | 1,049,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 120 | Incision Hordeolum/Chalazion / Pterigium | 180,000 | 120,000 | 300,000 |
| 121 | Labioplasty incomplit /Simple | 862,000 | 570,000 | 1,437,000 |
| 122 | Laparoscopy Diagnostic | 807,000 | 537,000 | 1,344,000 |
| 123 | Lobuloplasty | 207,000 | 137,000 | 344,000 |
| 124 | Nasal Packing for Epistaxis | 173,000 | 115,000 | 288,000 |
| 125 | Procedure of Dental & Mouth without Sedation | 194,000 | 130,000 | 324,000 |
| 126 | Repair of Colostomy | 1,627,000 | 1,085,000 | 2,712,000 |
| 127 | Simple Extirpation for Cosmetic Surgery | 1,050,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 128 | Water Sealed Drainage (WSD) Procedure | 851,000 | 566,000 | 1,417,000 |
| 129 | Abdominoplasty | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 130 | Adenoidectomy | 806,000 | 538,000 | 1,344,000 |
| 131 | Adhesiolysis | 3,039,000 | 2,026,000 | 5,065,000 |
| 132 | Amputation | 3,039,000 | 2,026,000 | 5,065,000 |
| 133 | Ankle, Various Lesions, Repair Of Ligaments | 1,827,000 | 1,217,000 | 3,044,000 |
| 134 | Antrostomy Wash-Out (AWO) with sedation | 816,000 | 544,000 | 1,360,000 |
| 135 | Appendectomy | 1,965,000 | 1,309,000 | 3,274,000 |
| 136 | Arthrodesis | 3,039,000 | 2,026,000 | 5,065,000 |
| 137 | Arthroscopy | 3,039,000 | 2,026,000 | 5,065,000 |
| 138 | Blepharoplasty | 862,000 | 575,000 | 1,437,000 |
| 139 | Breast Surgery | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 140 | Bursitis Excision | 3,039,000 | 2,026,300 | 5,065,000 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 141 | Caldwell-Luc Surgery | 862,000 | 574,000 | 1,437,000 |
| 142 | Cataract / ECCE + IOL | 3,029,000 | 2,019,000 | 5,047,000 |
| 143 | Cataract by Phacoemulstion | 3,603,000 | 2,402,000 | 6,005,000 |
| 144 | Cholecystectomy | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 145 | Contracture Release | 1,826,000 | 1,218,000 | 3,044,000 |
| 146 | Curretage With Sedation | 2,645,00 | 1,764,000 | 4,409,000 |
| 147 | Decompresion of FacialisNerve | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 148 | Dental Extraction with Complications | 2,702,000 | 1,801,000 | 4,503,000 |
| 149 | Disection of Axilla | 1,050,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 150 | Ear Reconstruction | 1,050,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 151 | Excision of SubmandibularTumor | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 152 | Excision of ThyroglossusDuct Cyst | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 153 | Extirpation / Wide Excision for Plastic /Cosmetic Surgery | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 154 | Extirpation of Ear Tumor | 1,050,000 | 699,000 | 1,749,000 |
| 155 | Extirpation of Wide Tumor | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 156 | Extraction of ExternalCholesteatom | 862,000 | 575,000 | 1,437,000 |
| 157 | Extraction of Foreign Body With Sedation | 862,000 | 575,000 | 1,437,000 |
| 158 | Fistulectomy/RepairFistula | 1,627,000 | 1,085,000 | 2,712,000 |
| 159 | Functional Endoscopic SinusSurgery (FESS) | 2,669,000 | 1,778,000 | 4,447,000 |
| 160 | Gastrectomy | 3,039,000 | 2,026,000 | 5,065,000 |
| 161 | Gips Ortopedic Surgery | 2,695,000 | 1,797,000 | 4,492,000 |
| 162 | Hemicolectomy | 3,039,000 | 2,026,000 | 5,065,000 |
| 163 | Hemorrhoidectomy | 1,889,000 | 1,258,000 | 3,147,000 |
| 164 | Herniotomy | 1,889,000 | 1,258,000 | 3,147,000 |
| 165 | Hypospadias Reconstruction | 1,683,000 | 1,122,000 | 2,805,000 |
| 166 | Hysterectomy | 1,965,000 | 1,309,000 | 3,274,000 |
| 167 | Incision of Abscess/Hematom in the Face | 850,000 | 567,000 | 1,417,000 |
| 168 | Incision of DeepNeckAbscess | 850,000 | 567,000 | 1,417,000 |
| 169 | Labio-Palatoplasty | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 170 | Labioplasty | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 171 | Laparoscopic Surgery | 2,669,000 | 1,778,000 | 4,447,000 |
| 172 | Laparotomy | 3,599,000 | 2,398,000 | 5,997,000 |
| 173 | Laryngectomy | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 174 | Le-Fort Procedures | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 175 | Lobuloplasty | 851,000 | 566,000 | 1,417,000 |
| 176 | Local Flap | 851,000 | 566,000 | 1.417.000 |
| 177 | Manipulation & Reduction ofDislocation | 2,695,000 | 1,797,000 | 4,492,000 |
| 178 | Mastectomy | 3,039,000 | 2,026,000 | 5,065,000 |
| 179 | Mastoidectomy+Tympapanoplasty | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 180 | Mastoidectomy. | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 181 | Maxilofacial Reconstruction | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 182 | Microlaryngoscopy | 806,000 | 538,000 | 1,344,000 |
| 183 | Myringoplasty | 2,658,000 | 1,772,000 | 4,430,000 |
| 184 | Nasal /SeptumReconstruction | 2,658,000 | 1,772,000 | 4,430,000 |
| 185 | Nefrectomy | 3,039,000 | 2,026,000 | 5,065,000 |
| 186 | Nefrolithotomi | 1,964,000 | 1,310,000 | 3,274,000 |
| 187 | Nefrostomy | 1,964,000 | 1,310,000 | 3,274,000 |
| 188 | Oesofagus Surgery | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 189 | Oesophagoscopy | 807,000 | 537,000 | 1,344,000 |
| 190 | Orchidectomy | 1,964,000 | 1,310,000 | 3,274,000 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|------------|
| 191 | Osteotomy/Sequestrectomy | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 192 | Parotidectomy | 2.901.000 | 1.934.000 | 4.835.000 |
| 193 | Partial Glossectomy | 2.901.000 | 1.934.000 | 4.835.000 |
| 194 | Plat / K-Wire Replacement | 2.901.000 | 1.934.000 | 4.835.000 |
| 195 | Plates & Screws Removal | 2,702,000 | 1,801,000 | 4,503,000 |
| 196 | Polypectomy | 2,658,000 | 1,772,000 | 4,430,000 |
| 197 | Procedure of Dental & Mouth with Sedation | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 198 | Procedure of Urolithiasis | 1,964,000 | 1,309,000 | 3,273,000 |
| 199 | Repair of Ablatio Retina | 393,000 | 262,000 | 655,000 |
| 200 | Repair of Periferal Vascular/ Nerve | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 201 | Repair of PreauricularFistula | 850,000 | 566,000 | 1,416,000 |
| 202 | Repair of Tendon | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 203 | Repair of Torsio Testis | 1,964,000 | 1,309,000 | 3,273,000 |
| 204 | Repair of Urethra Fistula | 1,964,000 | 1,309,000 | 3,273,000 |
| 205 | Reposition of NasalFracture | 2,702,000 | 1,801,000 | 4,503,000 |
| 206 | Resection of Lever | 3,039,000 | 2,026,000 | 5,065,000 |
| 207 | Resection of Mandibule forplastic surgery | 3,039,000 | 2,026,000 | 5,065,000 |
| 208 | Reseksi vertikumduodenum | 3,039,000 | 2,026,000 | 5,065,000 |
| 209 | Rhinotomy Lateral | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 210 | RND (RadicalNeckDesection) | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 211 | Sectio Caesaria | 2,105,000 | 1,403,000 | 3,508,000 |
| 212 | Septoplasty | 2,702,000 | 1,801,000 | 4,503,000 |
| 213 | Sigmoidectomy | 3,039,000 | 2,026,000 | 5,065,000 |
| 214 | Stripping varices with Injection | 2,658,000 | 1,772,000 | 4,430,000 |
| 215 | Thoracotomy | 2,714,000 | 1,809,000 | 4,523,000 |
| 216 | Thyroidectomy/Lobectomy / Strumectomy | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 217 | Tonsilectomy+Adenoidectomy | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 218 | Tonsillectomy | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 219 | Tracheostomy | 2,714,000 | 1,809,000 | 4,523,000 |
| 220 | Turbinectomy /Conchoplasty /Conchotomy | 862,000 | 574,000 | 1,436,000 |
| 221 | Tympanoplasty | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| 222 | Ureteroscopy Litotrypsi | 1,964,000 | 1,310,000 | 3,274,000 |
| 223 | Vaginoplasty | 1,826,000 | 1,218,000 | 3,044,000 |
| 224 | Vesicolithotomy/Lithotrypsi | 1,964,000 | 1,310,000 | 3,274,000 |
| 225 | Wide Excision ofMaxillofacial +Reconstruction | 3,039,000 | 2,026,000 | 5,065,000 |
| 226 | Wide Skin Grafting | 2,901,000 | 1,934,000 | 4,835,000 |
| | Tindakan Medis Operasi | | | |
| | a. Tindakan Kecil | 1.470.000 | 630.000 | 2.100.000 |
| | *. Over hecting | | | |
| | *. Over drain | | | |
| | *. Biopsi otot | | | |
| | *. Fungsi ventrikalbayi | | | |
| | b. Tindakan Sedang | 2.940.000 | 1.260.000 | 4.200.000 |
| | *. Over EVD | | | |
| | *. Cervical traction | | | |
| | c. Tindakan Besar | 8.330.000 | 3.570.000 | 11.900.000 |
| | *. Extra ventrikulerdrainage | | | |
| | *. Lumbal drainage | | | |
| | *. Skull tumorExtirpation | | | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|------------|-----------|------------|
| | *. Bure hole Dekompresi | | | |
| | *. Bure hole Drainage | | | |
| | *. Burr hole & punksi ventrikel | | | |
| | *. Simpatectomy | | | |
| | *. Reseksi lipomacranium | | | |
| | a. Tindakan Khusus | 14.700.000 | 6.300.000 | 21.000.000 |
| | *. Ligasi carotis | | | |
| | *. Craniotomy skull Tumor | | | |
| | *. Reseksi/ rekontruksi anterior | | | |
| | *. Rekontruksifraktur depresi | | | |
| | *. Punksi abses/tumor | | | |
| | *. Remove shunt | | | |
| | *. Cranioplasty | | | |
| | *. Burrhole explorasi | | | |
| | *. VP shunt | | | |
| | *. Reparasi shunt | | | |
| | *. Reseksi/ rekontruksi Postenor | | | |
| | *. Craniotomy evakuasi | | | |
| | *. Craniectomy evakuasi | | | |
| | *. Foramen magnum decompression | | | |

Keterangan : Biaya Cyto (diluar jam kerja/hari libur umum) di tambah 25% dari Jasa Pelayanan

TARIF POLIKLINIK GIZI

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|----------------------|--------------|----------------|--------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Konsultasi | 12.000 | 30.000 | 42.000 |
| 2 | Konseling rawat inap | 12.000 | 30.000 | 42.000 |

TARIF EMBASOR (KARTU IDENTITAS PASIEN)

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|-----------------|--------------|----------------|-------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Embador | 5.000 | - | 5.000 |

Keterangan :

*. Kartu Identitas Pasien (Embador) hanya dibayar 1 (satu) kali untuk pasien umum dan Askes, berlaku untuk Pasien Jamkesmas

*. Apabila Kartu Identitas hilang harus membayar lagi sesuai tarif yang berlaku.

TARIF DARURAT MEDIS

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|---|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Perawatan darurat medis(Konsultasi medis) | 6.000 | 9.000 | 15.000 |
| 2 | Darurat Medis dengan Observasi > 1 Jam | 12.000 | 28.000 | 40.000 |
| 3 | One Day Care | 30.000 | 70.000 | 100.000 |

Keterangan :

*. Belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai

*. Tarif pemeriksaan penunjang di IGD disamakan dengan tarif pemeriksaan pada instalasi yang terkait.

TARIF RAWAT INAP

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|-------------------|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Kelas III/hari | 145.000 | 61.000 | 206.000 |
| 2 | Kelas II/hari | 221.000 | 94.000 | 315.000 |
| 3 | Kelas I / hari | 287.000 | 122.000 | 409.000 |
| 5 | VIP/hari | 358.000 | 153.000 | 511.000 |
| 6 | Perinatologi/hari | 726.000 | 310.000 | 1.036.000 |
| 7 | HCU/hari | 857.000 | 367.000 | 1.224.000 |
| 8 | ICU/hari | 1.015.000 | 435.000 | 1.450.000 |
| 9 | Isolasi/hari | 287.000 | 122.000 | 409.000 |

TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

| NO | URAIAN | TARIF USULAN | | |
|----------|------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| A | Pemeriksaan Histopatologi | | | |
| 1 | Jaringan besar | 525.000 | 225.000 | 750.000 |
| 2 | Jaringan sedang | 394.000 | 168.000 | 562.000 |
| 3 | Jaringan kecil | 306.000 | 131.000 | 437.000 |
| 4 | Kuret | 175.000 | 75.000 | 250.000 |
| 5 | Surgical stuing | 437.000 | 188.000 | 625.000 |
| 6 | Frozen section | 305.000 | 132.000 | 437.000 |
| B | Pemeriksaan Sitologi | | | |
| 1 | Paps smear | 135.000 | 59.000 | 194.000 |
| 2 | Sitologi cairan/pleura | 135.000 | 59.000 | 194.000 |
| 3 | Sputum 1 kali | 43.000 | 19.000 | 62.000 |
| 4 | Sputum 3 kali serial | 130.000 | 57.000 | 187.000 |
| C | Pengambilan dan pemeriksaan | | | |
| 1 | Biopsi aspirasi | 393.000 | 169.000 | 562.000 |
| 2 | Biopsi aspirasi cito | 437.000 | 188.000 | 625.000 |
| 3 | IHC (Imonohisto Chemistry)per item | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| D | Bank Darah | | | |
| 1 | Fresh frozen plasma | 290.000 | 129.000 | 419.000 |
| 2 | Packed red cell | 290.000 | 129.000 | 419.000 |
| 3 | Cross match | 8.700 | 3.800 | 12.500 |
| 4 | Golongan darah | 8.700 | 3.800 | 12.500 |

TARIF PEMERIKSAAN/PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA/SURAT KETERANGAN

| NO | URAIAN | TARIF USULAN | | |
|-----|---|--------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| I | Pemeriksaan Kesehatan | | | |
| | 1.Surat KeteranganPemeriksaan Kesehatan Umum | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| | 2. Surat KeteranganPemeriksaan KesehatanDokter oleh PengujiTersendiri | 29.000 | 12.000 | 42.000 |
| II | Surat Keterangan | | | |
| | 1. Surat Tanda Dirawat | 10.500 | 4.500 | 15,000 |
| | 2. Surat Keterangan Lahir | 10.500 | 4.500 | 15,000 |
| | 3. Surat Keterangan Meninggal | 10.500 | 4.500 | 15,000 |
| | 4. Surat Keterangan Hamil / Bersalin | 10.500 | 4.500 | 15,000 |
| | 5. Surat Keterangan Lain-lain | 10.500 | 4.500 | 15,000 |
| III | Surat Keterangan Visum | | | |
| | 1. Untuk Kepentingan Hukum | 35.000 | 15.000 | 50,000 |
| | 2. Untuk Kepentingan Asuransi | 35.000 | 15.000 | 50,000 |
| IV | Pemeriksaan Test Narkoba (pak | 178.500 | 76.500 | 255.000 |
| V | Biaya Rekam Medis | | | |
| | 1.Pasien Dirawat 1 s/d 3 Hari | 7.000 | 3.000 | 10.000 |
| | 2.Pasien Dirawat 4 s/d 7 Hari | 10.500 | 4.500 | 15.000 |
| | 3.Pasien Dirawat 8 s/d 30 Hari | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| VI | Surat Telah Melaksanakan Pene | 150.000 | 50.000 | 200.000 |

PEMAKAIAN AULA/RUANG PERTEMUAN, STUDI BANDING

| NO | URAIAN | TARIF USULAN | | |
|----|---------------|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Sewa/hari | 500.000 | - | 500.000 |
| 2 | Studi Banding | 1.500.000 | - | 1.500.000 |

TINDAKAN RUANG RAWAT KHUSUS/ANASTESI

| NO | URAIAN | TARIF USULAN | | |
|----|---|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | CVP | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| 2 | Pemasangan ventilator | 300.000 | 1.700.000 | 2.000.000 |
| 3 | Visite dokter pada pasienmemakai ventilator | 78.000 | 182.000 | 260.000 |
| 4. | Melakukan DC Shock | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 |

TARIF AMBULANS

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI | | |
|----|------------------|-----------------|----------------|-------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Ambulance per Km | 6.000 | 2.000 | 8.000 |

TARIF KSO INSTITUSI PENDIDIKAN

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF USULAN | | |
|----|---------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Institusi Pendidikan Pemerintah | | | |
| | d. Kerjasama yang baru | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| | e. Perpanjangankerjasama | 2.100.000 | 900.000 | 3.000.000 |
| 2 | Institusi Pendidikan Swasta | | | |
| | a. Kerjasama yang baru | 2.800.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| | b. Perpanjangankerjasama | 2.450.000 | 1.050.000 | 3.500.000 |
| 3 | Biaya praktek per orang/hari | | | |
| | b. SMK/sejenis | 3.000 | 7.000 | 10.000 |
| | c. D-III/D-IV/S-1 | 14.000 | 6.000 | 20.000 |

TARIF RAWAT INAP

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI | | |
|----|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Konsultasi | 78.000 | 182.000 | 260.000 |
| 2 | Konseling | 57.000 | 134.000 | 191.000 |
| 3 | Ambil Sampel Darah | 56.000 | 24.000 | 80.000 |
| 4 | Buka Tampon | 183.400 | 78.600 | 262.000 |
| 5 | Cooling Spooling | 325.500 | 139.500 | 465.000 |
| 6 | Cukur/Vebridng | 115.500 | 49.500 | 165.000 |
| 7 | Ekstubasi | 116.000 | 49.000 | 165.000 |
| 8 | Inspekulo | 453.000 | 194.000 | 647.000 |
| 9 | Instubasi Endotracheral | 147.000 | 63.000 | 210.000 |
| 10 | Klisma | 238.000 | 102.000 | 340.000 |
| 11 | Lepas Infus | 79.000 | 34.000 | 113.000 |
| 12 | Melakukan Aspirasi (EfusiPluera) | 280.000 | 120.000 | 400.000 |
| 13 | Melakukan Fungsi (cairanAscites) | 348.000 | 148.000 | 496.000 |
| 14 | Memandikan Bayi | 122.500 | 51.500 | 175.000 |
| 15 | Memandikan Pasien | 111.650 | 47.850 | 159.500 |
| 16 | Merawat Tali Pusat | 122.500 | 52.500 | 175.000 |
| 17 | Pasang Bed Side Monitor | 76.650 | 32.850 | 109.500 |
| 18 | Pasang Infant Warmer | 114.800 | 49.200 | 164.000 |
| 19 | Pasang Laken | 87.850 | 37.650 | 125.500 |
| 20 | Pasang OGT | 234.500 | 100.500 | 335.000 |
| 21 | Pasang Pampers | 80.500 | 34.500 | 115.000 |
| 22 | Pasang Phototerapy | 171.500 | 73.500 | 245.000 |
| 23 | Pasang SpO2 | 85.400 | 36.600 | 122.000 |
| 24 | Pasang Syring Pump | 159.600 | 68.400 | 228.000 |
| 25 | Pemasangan CVP | 1.399.300 | 599.700 | 1.999.000 |
| 26 | Personal Hygiene | 325.500 | 139.500 | 465.000 |
| 27 | Resusitasi Anak | 978.600 | 419.400 | 1.398.000 |
| 28 | Resusitasi Neonatus | 345.100 | 147.900 | 493.000 |
| 29 | Skin test antibiotic | 119.700 | 51.300 | 171.000 |
| 30 | Tindakan RJP | 243.600 | 104.400 | 348.000 |
| 31 | Vulva Hygiene/PenisHygiene | 74.900 | 32.100 | 107.000 |
| 32 | Suction | 101.000 | 43.000 | 144.000 |
| 33 | Vacum ekstraksi | 3.623.000 | 1.552.000 | 5.175.000 |
| 34 | Pemasangan ventilator | 68.000 | 29.000 | 97.000 |
| 35 | Perawatan WSD | 107.000 | 46.000 | 153.000 |
| 36 | Periksa hamil | 226.000 | 97.000 | 323.000 |
| 37 | Periksa VT | 114.000 | 48.000 | 162.000 |
| 38 | Pasang transfusi | 154.000 | 66.000 | 220.000 |
| 39 | Pasang suction | 145.000 | 62.000 | 207.000 |
| 40 | Pasang oksigen | 57.000 | 24.000 | 81.000 |
| 41 | Pasang NGT | 238.000 | 102.000 | 340.000 |

| | | | | |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 42 | Pasang nebulizer | 144.000 | 61.000 | 205.000 |
| 43 | Pasang kateter | 184.000 | 79.000 | 263.000 |
| 44 | Pasang kateter umbilikal | 777.000 | 333.000 | 1.110.000 |
| 45 | Pasang CPAP | 179.000 | 76.000 | 255.000 |
| 46 | Pasang EKG | 209.000 | 89.000 | 298.000 |
| 47 | Pasang double lumen | 1.047.000 | 448.000 | 1.495.000 |
| 48 | Partus spontan | 3.525.000 | 1.510.000 | 5.035.000 |
| 49 | Manual plasenta | 3.425.000 | 1.467.000 | 4.892.000 |
| 50 | Lepas kateter | 82.000 | 35.000 | 117.000 |
| 51 | Intubasi endotracheal | 146.000 | 62.000 | 208.000 |
| 52 | Inspekulo | 452.000 | 194.000 | 646.000 |
| 53 | Injeksi IV/IM/SC | 65.000 | 28.000 | 93.000 |
| 54 | Hecting perinium | 1.239.000 | 531.000 | 1.770.000 |
| 55 | Ganti verban besar | 180.000 | 77.000 | 257.000 |
| 56 | Ganti verban sedang | 122.000 | 52.000 | 174.000 |
| 57 | Ganti verban kecil | 121.000 | 51.000 | 172.000. |

TARIF PELAYANAN IGD

| No | URAIAN | TARIF RETRIBUSI | | |
|----|--|-----------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Cukur/Vebridng | 41.300 | 17.700 | 59.000 |
| 2 | Ekstirpasi Kuku | 389.900 | 167.100 | 557.000 |
| 3 | Infus Anak | 150.500 | 64.500 | 215.000 |
| 4 | Injeksi IV/IM/SC | 42.700 | 18.300 | 61.000 |
| 5 | Intubasi Endotracheal | 210.000 | 90.000 | 300.000 |
| 6 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| 7 | Lepas Infus | 44.800 | 19.200 | 64.000 |
| 8 | Pemeriksaan kondisi fisik | 16.000 | 38.000 | 54.000 |
| 9 | Pasang EKG | 141.400 | 60.600 | 202.000 |
| 10 | Pasang Infus | 93.100 | 39.900 | 133.000 |
| 11 | Pasang Infus Bayi | 150,500 | 64.500 | 215.000 |
| 12 | Pasang Kateter | 92.400 | 39.600 | 132.000 |
| 13 | Pasang NGT | 128.100 | 54.900 | 183.000 |
| 14 | Pasang Oksigen | 44.100 | 18.900 | 63.000 |
| 15 | Pasang Spalk | 333.900 | 143.100 | 477.000 |
| 16 | Pasang Syring Pump | 99.400 | 42.600 | 142.000 |
| 17 | Pasang Verban Elastis | 106.400 | 45.600 | 152.000 |
| 18 | Pemeriksaan Kadar Gula Darah | 67.200 | 28.800 | 96.000 |
| 19 | Perawatan Luka Bakar Ukuran Besar | 886.900 | 380.100 | 1.267.000 |
| 20 | Perawatan Luka Bakar Ukuran Kecil | 659.400 | 282.600 | 942.000 |
| 21 | Perawatan Luka Bakar Ukuran Sedang | 886.900 | 380.100 | 1.267.000 |
| 22 | Perawatan Luka Kotor Tanpa Hecting Besar Sedang, Kecil | 238.000 | 102.000 | 340.000 |
| 23 | Resusitasi Jantung Paru DC Shock | 1.269.800 | 544.200 | 1.814.000 |
| 24 | Skin test Antibiotik | 56.000 | 24.000 | 80.000 |
| 25 | Suction Sekret | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| 26 | Tindakan Hecting luka Besar | 508.200 | 217.800 | 726.000 |

| | | | | |
|----|------------------------------|---------|---------|---------|
| 27 | Tindakan Hecting luka Kecil | 170.100 | 72.900 | 243.000 |
| 28 | Tindakan Hecting luka Sedang | 340.200 | 145.800 | 486.000 |
| 29 | Tindakan RJP | 126.000 | 54.000 | 180.000 |
| 30 | Vulva Hygiene/Penis Hygiene | 65.100 | 27.900 | 93.000 |

TARIF PELAYANAN IGD COVID

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI | | |
|----|------------------------|-----------------|----------------|---------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Injeksi IV/IM/SC | 30.100 | 12.900 | 43.000 |
| 2 | Lepas Infus | 31.500 | 13.500 | 45.000 |
| 3 | Lepas Kateter | 25.200 | 10.800 | 36.000 |
| 4 | Pasang Bed SideMonitor | 30.800 | 13.200 | 44.000 |
| 5 | Pasang EKG | 99.400 | 42.600 | 142.000 |
| 6 | Pasang Infus | 65.800 | 28.200 | 94.000 |
| 7 | Pasang Kateter | 64.400 | 27.600 | 92.000 |
| 8 | Pasang Laken | 30.800 | 13.200 | 44.000 |
| 9 | Pasang NGT | 89.600 | 38.400 | 128.000 |
| 10 | Pasang Oksigen | 30.800 | 13.200 | 44.000 |
| 11 | Pasang Syring Pump | 70.000 | 30.000 | 100.000 |
| 12 | Skin test Antibiotik | 39.200 | 16.800 | 56.000 |
| 13 | Tindakan RJP | 88.200 | 37.800 | 126.000 |

TARIF PELAYANAN IGD PONEK

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI | | |
|----|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Buka Tampon | 49.000 | 21.000 | 70.000 |
| 2 | Cukur/Vebridung | 28.700 | 12.300 | 41.000 |
| 3 | Hecting Perineum | 373.800 | 160.200 | 534.000 |
| 4 | Injeksi IV/IM/SC | 30.100 | 12.900 | 43.000 |
| 5 | Inspekulo | 74.200 | 31.800 | 106.000 |
| 6 | Konsultasi | 18.000 | 42.000 | 54.000 |
| 7 | Lepas Infus | 31.500 | 13.500 | 45.000 |
| 8 | Lepas Kateter | 25.900 | 11.100 | 37.000 |
| 9 | Manual Plasenta | 1.079.400 | 462.400 | 1.542.000 |
| 10 | Memandikan Bayi | 50.400 | 21.600 | 72.000 |
| 11 | Merawat Tali Pusat | 30.800 | 13.200 | 44.000 |
| 12 | Partus Spontan | 1.149.400 | 492.600 | 1.642.000 |
| 13 | Pasang Bed SideMonitor | 30.800 | 13.200 | 44.000 |
| 14 | Pasang Infus | 65.800 | 28.200 | 94.000 |
| 15 | Pasang Kateter | 64.400 | 27.600 | 92.000 |
| 16 | Pasang Nebulizer | 37.800 | 16.200 | 54.000 |
| 17 | Pasang NGT | 89.600 | 38.400 | 128.000 |
| 18 | Pasang Oksigen | 30.800 | 13.200 | 44.000 |
| 19 | Pasang Pampers | 25.200 | 10.800 | 36.000 |
| 20 | Pasang Tranfusi | 50.400 | 21.600 | 72.000 |
| 21 | Periksa Hamil | 49.000 | 21.000 | 70.000 |
| 22 | Periksa VT | 25.200 | 10.800 | 36.000 |
| 23 | Vakum ekstraksi | 1.218.000 | 522.000 | 1.740.000 |
| 24 | Vulva Hygiene/Penis Hygiene | 45.500 | 19.500 | 65.000 |

TARIF PELAYANAN VK

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI | | |
|----|----------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Buka Tampon | 49.000 | 21.000 | 70.000 |
| 2 | Cukur/Vebridng | 28.700 | 12.300 | 41.000 |
| 3 | Hecting Perineum | 373.800 | 160.200 | 534.000 |
| 4 | Injeksi IV/IM/SC | 30.100 | 12.900 | 43.000 |
| 5 | Inspekulo | 74.200 | 31.800 | 106.000 |
| 6 | Konsultasi | 29.400 | 12.600 | 42.000 |
| 7 | Lepas Infus | 31.500 | 13.500 | 45.000 |
| 8 | Lepas Kateter | 25.900 | 11.100 | 37.000 |
| 9 | Manual Plasenta | 1.079.400 | 462.400 | 1.542.000 |
| 10 | Memandikan Bayi | 50.400 | 21.600 | 72.000 |
| 11 | Merawat Tali Pusat | 30.800 | 13.200 | 44.000 |
| 12 | Partus Spontan | 1.149.400 | 492.600 | 1.642.000 |
| 13 | Pasang Bed SideMonitor | 30.800 | 13.200 | 44.000 |
| 14 | Pasang Infus | 65.800 | 28.200 | 94.000 |
| 15 | Pasang Kateter | 64.400 | 27.600 | 92.000 |
| 16 | Pasang Nebulizer | 37.800 | 16.200 | 54.000 |
| 17 | Pasang NGT | 89.600 | 38.400 | 128.000 |
| 18 | Pasang Oksigen | 30.800 | 13.200 | 44.000 |
| 19 | Pasang Pampers | 25.200 | 10.800 | 36.000 |
| 20 | Pasang Tranfusi | 50.400 | 21.600 | 72.000 |
| 21 | Periksa Hamil | 49.000 | 21.000 | 70.000 |
| 22 | Periksa VT | 25.200 | 10.800 | 36.000 |
| 23 | Vakum ekstraksi | 1.218.000 | 522.000 | 1.740.000 |
| 24 | Vulva Hygiene/PenisHygiene | 45.500 | 19.500 | 65.000 |

TARIF INTALASI FARMASI

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI | | |
|----|--|-----------------|----------------|--------|
| | | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
| 1 | Individual prescribing racikan pulveres/kapsul | 700 | 1.000 | 1.700 |
| 2 | Individual presribing non racikan (tiap item obat (R/) | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| 3 | Visite/konsultasi (tiapkunjungan/pasien) | 8.000 | 20.000 | 28.000 |
| 4 | Konseling/pasien khusus atas permintaan sendiri(tiap kunjungan/pasien) | 8.000 | 20.000 | 28.000 |

b. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

| NO. | OBJEK RETRIBUSI | USULAN TARIF BARU |
|-----------|--|--------------------|
| 1. | RUMAH TEMPAT TINGGAL: | |
| | 1. Rumah Mewah | Rp. 7.500,-/bulan |
| | 2. Rumah Sederhana | Rp. 3.000,-/bulan |
| | 3. Rumah Sangat Sederhana | Rp. 2.000,-/bulan |
| | 4. Rumah Kos-Kosan (Per kamar) | Rp. 2.000,-/bulan |
| | 5. Rumah PNS | |
| | PNS Gol I – II | Rp. 3.000,-/bulan |
| | PNS Gol III | Rp. 4.000,-/bulan |
| | PNS Gol IV | Rp. 5.000,-/bulan |
| | 6. Perumahan TNI, Polri, Kejaksaan dan Perumahan BUMN Lainnya. | Rp. 3.000,-/bulan |
| 2. | PERDAGANGAN/BISNIS/KOMERSIAL: | |
| | a. Supermarket/Mal | Rp.100.000,-/bulan |
| | b. Minimarket | Rp. 60.000,-/bulan |
| | c. Rumah Toko (Ruko) | Rp. 30.000,-/bulan |
| | d. Rumah Makan/Restoran | Rp. 30.000,-/bulan |
| | e. Hotel/Losmen/Penginapan | Rp. 30.000,-/bulan |
| | f. Warung/Rumah Makan Kecil | Rp. 10.000,-/bulan |
| | g. Kedai Sampah | Rp. 10.000,-/bulan |
| | h. Kios | Rp. 5.000,-/bulan |
| | i. Stand | Rp. 5.000,-/bulan |
| | j. Pedagang Musiman | Rp. 3.000,-/hari |
| 3. | PERKANTORAN/SEKOLAH/SOSIAL: | |
| | a. Kantor Pemerintah/Swasta | Rp. 15.000,-/bulan |
| | b. Sekolah (SD,SMP, SMA) Negeri/Swasta | Rp. 15.000,-/bulan |
| | c. Sekolah Tinggi/Universitas | Rp. 15.000,-/bulan |
| | d. Rumah Sakit | Rp. 30.000,-/bulan |
| | e. Poliklinik | Rp. 5.000,-/bulan |
| | f. Puskesmas | Rp. 2.000,-/bulan |
| 4. | INDUSTRI/PERBENGKELAN/PERGUDANGAN: | |
| | a. Industri Besar | Rp. 30.000,-/bulan |
| | b. Industri Menengah | Rp. 20.000,-/bulan |
| | c.Industri Kecil | Rp. 10.000,-/bulan |
| | d. Bengkel Besar | Rp. 30.000,-/bulan |
| | e. Bengkel Menengah | Rp. 15.000,-/bulan |

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| f. | Bengkel Kecil | Rp. 10.000,-/bulan |
| g. | Perbengkelan | |
| | - Bengkel roda empat (4) ke atas | Rp. 30.000,-/bulan |
| | - Bengkel roda dua (2) dan tiga (3) | Rp. 15.000,-/bulan |
| h. | Penyimpanan Mobil | Rp. 15.000,-/bulan |
| i. | Gudang Besar | Rp. 15.000,-/bulan |
| j. | Gudang Kecil | Rp. 10.000,-/bulan |
| LAIN – LAIN : | | |
| a. | Stasiun Kereta Api | Rp. 30.000,-/bulan |
| b. | Stasiun Bus | |
| | - Terminal Bus | Rp. 30.000,-/bulan |
| | - Loket Bus | Rp. 15.000,-/bulan |

c. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

| JENIS PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM | USULAN TARIF BARU |
|---|---------------------------|
| 1. Kendaraan bermotor roda dua | Rp. 1.000.-/sekali parkir |
| 2. Kendaraan bermotor roda empat | Rp. 2.000.-/sekali parkir |
| 3. Kendaraan bermotor roda enam ke atas | Rp 6.500.-/sekali parkir |

| TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KHUSUS JALAN TERTENTU (JL. SUDIRMAN, JL. AHMAD YANI, JL. K. TANDEAN DAN JL. SUPRAPTO) | |
|---|---------------------------|
| JENIS PELAYANAN PARKIR TEPIJALAN UMUM | USULAN TARIF BARU |
| 1. Kendaraan bermotor roda dua | Rp. 1.000.-/sekali parkir |
| 2. Kendaraan bermotor roda empat | Rp. 3.000.-/sekali parkir |
| 3. Kendaraan bermotor roda enam ke atas | Rp 10.000.-/sekali parkir |

d. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

| NO. | OBJEK RETRIBUSI/JENIS TEMPAT | USULAN TARIFBARU |
|-------------|--|-----------------------------|
| I. | DENGAN CARA MENGGUNAKAN, KIOS DAN STAND PASAR DAERAH | |
| 1. | KIOS : | |
| | a. Retribusi Pemakaian Bangunan | Rp. 50.000,- /bulan |
| | b. Retribusi Kebersihan | Rp. 15.000,- /bulan |
| | c. Retribusi Jaga Malam | Rp. 10.000,- /bulan |
| | T o t a l | Rp. 75.000,- /bulan |
| 2. | STAND : | |
| | a. Retribusi Pemakaian Bangunan | Rp. 40.000,- /bulan |
| | b. Retribusi Kebersihan | Rp. 15.000,- /bulan |
| | c. Retribusi Jaga Malam | Rp. 10.000,- /bulan |
| | T o t a l | Rp. 65.000,- /bulan |
| 3. | Pemakaian Ruang Terbuka di Pasar | Rp. 25.000,-/m ² |
| II. | DENGAN CARA MENGGUNAKAN PELATARAN DAN KERETA BERJAJA DALAM WILAYAH KOTA TEBING TINGGI | |
| | a. Penjualan dengan menggunakan pelataran dan kereta berjaja | Rp. 2.000,-/hari |
| | b. Retribusi Kebersihan | Rp. 1.000,-/hari |
| III. | DENGAN CARA LESEHAN ATAU MENGGUNAKAN PELATARAN DI PASAR DAERAH | |
| | a. Jenis : sayuran, buah-buahan, jamu gendong dan sejenis, ikan kering, lauk-pauk (tahu dan lain sebagainya) alat-alat dapur, umbi-umbian, bumbu, ikan basah, daging, sandang, makanan dan minuman | Rp. 2.000,-/hari |
| | b. Retribusi Kebersihan | Rp. 1.000,-/hari |
| IV. | DENGAN CARA LESEHAN DALAM WILAYAH KOTA TEBING TINGGI | |
| | a. Jenis : sayuran, buah-buahan, dan sejenis, ikan basah, ikan kering, lauk-pauk, alat-alat dapur, umbi-umbian, bumbu, daging, sandang, makanan dan minuman, mainan anak-anak. | Rp. 2.000,-/hari |
| | b. Retribusi Kebersihan | Rp. 1.000,-/hari |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| V. | PADA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU (KHUSUS) DALAM WILAYAH KOTA TEBING TINGGI | |
| | a. Penjualan dengan memakai mobil, becak bermotor, sepeda motor/sepeda, per unit | Rp. 2.000,-/hari |
| | b. Retribusi Kebersihan | Rp. 1.000,-/hari |
| VI. | KAMAR MANDI, WC/TOILET DALAM PASAR DAERAH | |
| | a. Mandi | Rp. 3.000,-/org |
| | b. Hajad besar | Rp. 2.000,-/org |
| | c. Hajad Kecil | Rp. 1.000,-/org |
| UU 1/2022 (HKPD) | Saran kenaikan tarif 3%/th sesuai umur perda yang mengatur sebelumnya | |
| RETRIBUSI JASA USAHA | | |

II. RETRIBUSI JASA USAHA

a. Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

| JENIS PARKIR BERLANGGANAN | | USULAN TARIF BARU |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Kendaraan bermotor roda dua | Rp. 1.000.-/sekali parkir |
| 2. | Kendaraan bermotor roda empat | Rp. 3.000.-/sekali parkir |
| 3. | Kendaraan bermotor roda enam ke atas | Rp. 10.000.-/sekali parkir |

b. Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan

| NO. | OBJEK RETRIBUSI | USULAN TARIF BARU |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Pemotongan Kerbau/Sapi/Kuda (Hewan Besar) | |
| | a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan | Rp. 15.000,-/ekor |
| | b. Pemotongan | Rp. 45.000,-/ekor |
| | c. Pemeriksaan Daging | Rp. 45.000,-/ekor |
| | Jumlah | Rp. 75.000,-/ekor |
| 2. | Pemotongan Kambing/Domba | |
| | a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan | Rp. 5.000,-/ekor |
| | b. Pemotongan | Rp. 15.000,-/ekor |
| | c. Pemeriksaan Daging | Rp. 5.000,-/ekor |
| | Jumlah | Rp. 25.000,-/ekor |
| 3. | Pemotongan Babi | |
| | a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan | Rp. 10.000,-/ekor |
| | b. Pemotongan | Rp. 30.000,-/ekor |
| | c. Pemeriksaan Daging | Rp. 10.000,-/ekor |
| | Jumlah | Rp. 50.000,-/ekor |

c. Tarif Retribusi tempat rekreasi, parawisata dan olahraga

| 1.GEDUNG OLAH RAGA (GOR) ASBER NASUTION | |
|---|--|
| Tipe Keperluan: | |
| a. Untuk kegiatan olah raga, resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum | Rp. 1.500.000,-/hari (untuk pemakaian hari pertama) Hari Kedua dan seterusnya Rp.500.000,-/hari |
| b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi Sosial atau Politik | Rp. 500.000,-/hari (untuk pemakaian hari pertama) Hari Kedua dan seterusnya Rp. 200.000,-/hari |
| c. Dipakai Latihan | |
| 1. Bola Voli | |
| a) Induk Organisasi Olahraga: | |
| 1. Latihan | Rp. 25.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 35.000,-/jam |
| b) Sekolah/Perguruan Tinggi | |
| 1. Latihan | Rp. 0,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 0,-/jam |
| c) Masyarakat/Instansi/Umum | |
| 1. Latihan | Rp. 40.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 50.000,-/jam |
| 2. Lapangan Bola Basket | |
| a) Induk Organisasi Olahraga: | |
| 1. Latihan | Rp. 25.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 35.000,-/jam |
| b) Sekolah/Perguruan Tinggi | |
| 1. Latihan | Rp. 0,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 0,-/jam |
| c) Masyarakat/Instansi/Umum | |
| 1. Latihan | Rp. 40.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 50.000,-/jam |
| 3. Karate/Judo/Gulat/Silat dan Marching Band | |
| a) Induk Organisasi Olahraga: | |
| 1. Latihan | Rp. 20.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 25.000,-/jam |
| b) Sekolah/Perguruan Tinggi | |
| 1. Latihan | Rp. 0,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 0,-/jam |
| c) Masyarakat/Instansi/Umum: | |
| 1. Latihan | Rp. 40.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 50.000,-/jam |
| 4. Futsal (Ditambah) | |
| a) Induk Organisasi Olahraga : | |
| • Latihan pagi/sore | Rp. 25.000,-/jam |
| • Pertandingan | Rp. 35.000,-/jam |

| | |
|--|---|
| b) Sekolah / Perguruan Tinggi | |
| 5. Latihan pagi/sore | Rp. 0,-/jam |
| 6. Pertandingan | Rp. 0,-/jam |
| c) Masyarakat/Instansi/Umum | |
| 1. Latihan pagi/sore | Rp. 40.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 50.000,-/jam |
| Fasilitas Berupa Gawang dan Bola Kaki 2 (dua) buah | |
| 5 Tenis Meja (Ditambah) | |
| a) Induk Organisasi Olahraga : | |
| c. Latihan | Rp. 15.000,-/jam |
| d. Pertandingan | Rp. 20.000,-/jam |
| b) Sekolah / Perguruan Tinggi | |
| • Latihan | Rp. 0,-/jam |
| • Pertandingan | Rp. 0,-/jam |
| c) Masyarakat/Instansi/Umum | |
| 1. Latihan | Rp. 25.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 40.000,-/jam |
| 2. GEDUNG OLAHRAGA (GOR) MARRA HALIM | |
| Tipe Keperluan: | |
| a. Untuk kegiatan olah raga, resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum. | Rp. 1.500.000,-/hari (untuk pemakaian hari pertama) Hari Kedua dan seterusnya Rp.500.000,-/hari |
| b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi Sosial atau Politik | Rp. 500.000,-/hari (untuk pemakaian hari pertama) Hari Kedua dan seterusnya Rp. 200.000,-/hari |
| c. Dipakai Latihan | |
| 1. Bulu Tangkis/sepak takraw | |
| a) Induk Organisasi Olahraga: | |
| 1. Latihan | Rp. 20.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 35.000,-/jam |
| b) Sekolah/Perguruan Tinggi | |
| 1. Latihan | Rp. 0,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 0,-/jam |
| c) Masyarakat/Instansi/Umum | |
| 1. Latihan | Rp. 25.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 40.000,-/jam |
| 2. Tenis Meja | |
| a) Induk Organisasi Olahraga: | |
| 1. Latihan | Rp. 15.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 20.000,-/jam |
| b) Sekolah/Perguruan Tinggi | |
| 1. Latihan | Rp. 0,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 0,-/jam |
| c) Masyarakat/Instansi/Umum | |
| 1. Latihan | Rp. 25.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 40.000,-/jam |

| | |
|---|--------------------|
| 3. LAPANGAN TERBUKA | |
| 1. Lapangan Sepak Bola Ramlan Yatim | |
| a) Induk Organisasi Olahraga/masyarakat: | |
| 1. Latihan | Rp. 25.000,-/2 jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 50.000,-/2 jam |
| 3. Latihan siang hari | Rp. 30.000,-/2 jam |
| b) Sekolah/Perguruan Tinggi | |
| 1. Latihan | Rp. 0,-/hari |
| 2. Pertandingan | Rp. 0,-/hari |
| 3. Latihan siang hari | Rp. 0,-/hari |
| 2. Lapangan Tenis/Lapangan Keras (hard court) | |
| a) Induk Organisasi Olahraga: | |
| 1. Latihan pagi/sore | Rp. 25.000,-/2 jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 30.000,-/2 jam |
| 3. Latihan malam hari | Rp. 30.000,-/2 jam |
| b) Sekolah/Perguruan Tinggi | |
| 1. Latihan pagi/sore | Rp. 0,-/hari |
| 2. Pertandingan | Rp. 0,-/hari |
| c) Masyarakat/Instansi/Umum | |
| 1. Latihan pagi/sore | Rp. 25.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 70.000,-/jam |
| 3. Latihan siang hari | Rp. 50.000,-/jam |
| 3. Lapangan Futsal | |
| a) Induk Organisasi Olahraga: | |
| 1. Latihan pagi/sore | Rp. 25.000,-/bulan |
| 2. Pertandingan | Rp. 30.000,-/2 jam |
| b) Sekolah/Perguruan Tinggi | |
| 1. Latihan pagi/sore | Rp. 0,-/hari |
| 2. Pertandingan | Rp. 0,-/hari |
| c) Masyarakat/Instansi/Umum | |
| 1. Latihan | Rp. 35.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 50.000,-/jam |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 4. WISMA ATLET PABBSI | |
| a. Pelajar/mahasiswa | Rp. 40.000,- /kamar/hari |
| b. Atlet | Rp. 50.000,- /kamar/hari |
| c. Atlet Binaan | Rp. 0,-/kamar/hari |

| 5. GEDUNG CADIKA PRAMUKA | |
|---|--|
| Tipe Keperluan: | |
| a. Untuk kegiatan olah raga, resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum | Rp. 1.500.000,-/hari (untuk pemakaian hari pertama) Hari Kedua dan seterusnya Rp. 500.000,-/hari |
| b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi Sosial atau Politik | Rp. 500.000,-/hari (untuk pemakaian hari pertama) Hari Kedua dan seterusnya Rp. 200.000,-/hari |
| c. Dipakai Latihan | |
| 1. Lapangan Futsal Outdoor | |
| a) Induk Organisasi Olahraga: | |
| 1. Latihan | Rp. 30.000,-/bulan |
| 2. Pertandingan | Rp. 50.000,-/2 jam |
| b) Sekolah/Perguruan Tinggi | |
| 1. Latihan | Rp. 0,-/hari |
| 2. Pertandingan | Rp. 0,-/hari |
| c) Masyarakat/Instansi/Umum | |
| 1. Latihan | Rp. 40.000,-/2 jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 60.000,-/2 jam |
| 3. Latihan siang hari | Rp. 15.000,-/2 jam |
| 2. Arena Balap Sepeda Jenis BMX dan Sepatu Roda | |
| a) Induk Organisasi Olahraga: | |
| 1. Latihan | Rp. 30.000,-/bulan |
| 2. Pertandingan | Rp. 50.000,-/2 jam |
| b) Sekolah/Perguruan Tinggi | |
| 1. Latihan | Rp. 0,-/hari |
| 2. Pertandingan | Rp. 0,-/hari |
| c) Masyarakat/Instansi/Umum | |
| 1. Latihan | Rp. 40.000,-/2 jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 60.000,-/2 jam |
| 3. Latihan siang hari | Rp. 15.000,-/2 jam |
| 3. Arena Olahraga Extrim | |
| a) Induk Organisasi Olahraga: | |
| 1. Latihan | Rp. 30.000,-/bulan |
| 2. Pertandingan | Rp. 50.000,-/2 jam |
| b) Sekolah/Perguruan Tinggi | |
| 1. Latihan | Rp. 0,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 0,-/jam |
| c) Masyarakat/Instansi/Umum | |
| 1. Latihan | Rp. 40.000,-/jam |
| 2. Pertandingan | Rp. 60.000,-/jam |
| 4. Lapangan Panahan | |
| Masyarakat/Instansi/Umum | Rp. 10.000,- /orang/bulan |

d. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

| OBJEK RETRIBUSI JENIS TEMPAT/FASILITAS | USULAN TARIF BARU |
|--|---------------------------|
| A. PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG | |
| 1. GEDUNG PERTEMUAN BALAI KARTINI 1 | |
| Tipe Keperluan: | |
| a. Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum. | Rp. 1.800.000,-/hari |
| b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi, Sosial atau Politik. | Rp. 500.000,-/hari |
| 2. GEDUNG PERTEMUAN BALAI KARTINI 2 (CONVENTION CENTER) | |
| Tipe Keperluan: | |
| a. Untuk resepsi/pesta, rapat-rapat atau pertunjukan dan lain-lain yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum | |
| - Lantai II untuk pemakaian hari pertama | Rp. 12.000.000,-/hari |
| - Untuk pemakaian hari berikutnya | Rp. 8.000.000,-/hari |
| 1. Kios | Rp. 100.000,-/bulan |
| 2. Stan/Los | Rp. 75.000,-/bulan |
| 3. Ruang Terbuka | Rp. 25.000,- /meter/bulan |
| b. Untuk acara keagamaan, sosial, organisasi masyarakat, organisasi politik dan hari-hari besar keagamaan | |
| - Lantai II untuk pemakaian hari pertama | Rp. 3.500.000,-/hari |
| Untuk pemakaian hari berikutnya | Rp. 2.000.000,-/hari |
| c. Untuk acara Pemerintah Kota Tebing Tinggi, TNI dan Polri | |
| - Lantai II untuk pemakaian hari pertama | Rp. 3.500.000,-/hari |
| - Untuk pemakaian hari berikutnya | Rp. 2.000.000,-/hari |
| 3. GEDUNG Hj. SAWIYAH NASUTION | |
| Tipe Keperluan: | |
| a. Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum | Rp. 1.800.000,-/hari |
| - Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, Organisasi, Sosial atau Politik | Rp. 500.000,-/hari |
| 4. GEDUNG ISLAMIC CENTER | |
| Tipe Keperluan: | |
| a. Untuk resepsi/pesta, rapat-rapat atau pertunjukan dan lain-lain yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum, untuk pemakaian hari pertama | Rp. 7.000.000,-/hari |
| - Untuk pemakaian hari berikutnya | Rp. 4.000.000,-/hari |
| b. Untuk acara keagamaan, sosial, organisasi masyarakat, organisasi politik dan hari-hari besar keagamaan, untuk pemakaian hari pertama | Rp. 3.000.000,-/hari |
| - Untuk pemakaian hari berikutnya | Rp. 1.500.000,-/hari |

| | |
|---|----------------------|
| c. Untuk acara Pemerintah Kota Tebing Tinggi, TNI dan Polri, untuk pemakaian hari pertama | Rp. 2.000.000,-/hari |
| - Untuk pemakaian hari berikutnya | Rp. 1.000.000,-/hari |
| | |

| | |
|---|---|
| 5.RUANG TERBUKA HIJAU (TEMPAT WISATA) | |
| 1. Biaya Masuk | Rp. 5.000,-/orang |
| 2. Parkir Kendaraan | |
| 1. Kendaraan Roda Empat | Rp. 5.000,-/unit |
| 2. Kendaraan Roda Dua | Rp. 2.000,-/unit |
| 3. Sewa Pondok | Rp. 10.000,-/unit |
| 4. Sewa Bebek Air | Rp. 5.000,-/unit |
| 5. Sewa Speed Boat | Rp. 25.000,-/unit |
| 6. Biaya Flying Fox | Rp. 5.000,-/orang |
| 7. Sewa Perahu Karet | Rp. 5.000,-/unit |
| 8. Sewa Tempat Jualan | Rp. 65.000,-/bulan |
| 6.TEMPAT USAHA | |
| Pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olahraga | |
| - Di luar Gedung Olahraga | Rp. 10.000,-/hari Rp. 65.000,-/bulan |
| 7. RUMAH TOKO (RUKO): | |
| a. Pemakaian Rumah Toko milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi, besarnya retribusi sewa ruko 14 % (empat belas per seratus) setahun yang dihitung dari harga bangunan untuk tahun berjalan dikurangi penyusutan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk. | |
| b. Pemakaian Rumah Sangat Sederhana (RSS) milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi, besarnya retribusi sewa RSS | Rp. 4.000,-/hari |
| c. Pemakaian RUSUNAWA milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi | |
| 1. Besaran Tarif Hunian | |
| - Lantai I (tempat usaha/bisnis/pesta) | Rp. 1.500,-/hari |
| - Lantai I (hunian) | Rp. 4.000,-/hari |
| - Lantai II (hunian) | Rp. 3.500,-/hari |
| - Lantai III (hunian) | Rp. 3.000,-/hari |
| - Lantai IV (hunian) | Rp. 2.500,-/hari |
| - Lantai V (hunian) | Rp. 2.000,-/hari |
| 2. Besaran Tarif Air Minum | |
| - Sosial Khusus | |
| • 0 - 10 M ³ | Rp. 650,-/M ³ |
| • >10 M ³ | Rp. 1.000,-/M ³ |
| - Biaya Beban | Rp. 4.000,-/bulan |

| | |
|--|----------------------|
| 8. LAPANGAN/RUANG TERBUKA: | |
| a. Untuk kegiatan bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan berupa uang dikenakan retribusi mulai pukul 06.00 wib s/d pukul 24.00 wib | Rp. 2.000.000,-/hari |
| b. Untuk kegiatan sosial yang semata-mata tidak mengharap keuntungan seperti kegiatan keagamaan, politik dan kegiatan sosial lainnya dapat dibebaskan dari pembayaran retribusi dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk | |
| Pemakaian Lapangan/ruang terbuka milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi pada point a diatas dikenakan tarif retribusi untuk hari berikutnya | Rp. 1.000.000,-/hari |
| c. Pemakaian Lapangan/ruang terbuka/badan jalan milik Pemerintah Daerah Tebing Tinggi yang rusak akibat digunakan untuk penggalian pipa/kabel, perbaikan terhadap kerusakan tersebut adalah tanggung jawab pihak penggali yang besarnya retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk | |
| d. Pemakaian badan jalan, trotoar/parit yang digunakan untuk promosi/reklame dikenakan tarif yang diatur melalui Peraturan Wali Kota | |
| B. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT | |
| 1. Penetapan Retribusi Untuk Pemakaian Per Hari (Pukul 08.00 S/D 17.00 Wib) | |
| a. Mesin Gilas Roda Dua (Tandem Roller) Kapasitas 1 - 3 ton | |
| b. Mesin Gilas Roda Dua (Tandem Roller) Kapasitas 6 - 8 ton | Rp. 300.000,-/hari |
| c. Mesin Gilas Roda Tiga (Three Wheel Roller) Kapasitas 6 – 8 ton | Rp. 300.000,-/hari |
| d. Mesin Gilas Bergetar (Vibrator Compactor) Kapasitas 10 – 12 ton | Rp. 500.000,-/hari |
| e. Buldozer D5 | Rp. 600.000,-/hari |
| f. Pneumatic Tire Roller (PTR) | Rp. 300.000,-/hari |
| g. Excavator 320 DL | Rp. 600.000,-/hari |
| h. Backhoe Loader | Rp. 600.000,-/hari |
| i. Asphalt Sprayer | Rp. 300.000,-/hari |
| a. Stampar (Pemadat Tanah) | Rp. 200.000,-/hari |
| k. Asphalt Cutter | Rp. 200.000,-/hari |
| l. Compressor | Rp. 300.000,-/hari |
| m. Jack Hammer | Rp. 200.000,-/hari |
| n. Coore Drill (Alat Tes Aspal) | Rp. 250.000,-/hari |
| o. Dump Truck | Rp. 300.000,-/hari |

| | |
|--|----------------------|
| 2. Penetapan Retribusi Untuk Pemakaian Kelebihan Waktu | |
| a. Mesin Gilas Roda Dua (Tandem Roller) Kapasitas 1- 3 ton | Rp. 25.000,-/jam |
| b. Mesin Gilas Roda Dua (Tandem Roller) Kapasitas 6 - 8 ton | Rp. 40.000,-/jam |
| c. Mesin Gilas Roda Tiga (Three Wheel Roller) Kapasitas 6 – 8 ton | Rp. 40.000,-/jam |
| d. Mesin Gilas Bergetar (Vibrator Compactor) Kapasitas 10 – 12 ton | Rp. 80.000,-/jam |
| e. Buldozer D5 | Rp. 100.000,-/jam |
| f. Pneumatic Tire Roller (PTR) | Rp. 40.000,-/jam |
| g. Excavator 320 DL | Rp. 100.000,-/jam |
| h. Backhoe Loader | Rp. 100.000,-/jam |
| i. Asphalt Sprayer | Rp. 40.000,-/jam |
| j. Stampar | Rp. 20.000,-/jam |
| b. Asphalt Cutter | Rp. 20.000,-/jam |
| l. Compressor | Rp. 40.000,-/jam |
| m. Jack Hammer | Rp. 40.000,-/jam |
| n. Coore Drill (Alat Tes Aspal) | Rp. 30.000,-/jam |
| o. Dump Truck | Rp. 40.000,-/jam |
| 3. Water Tank Truck (Mobil Tangki Air) | Rp. 200.000,-/lintas |

| UU 1/2022 (HKPD) | Saran |
|---|--|
| Retribusi Perijinan Tertentu | |
| Ret. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)* | Penyesuaian tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 sebagai bentuk lain yang sebelumnya berupa retribusi Ijin Mendirikan Bangunan |
| Ret. Penggunaan Tenaga Kerja Asing* | Tidak ada potensi, namun demikian untuk menangkap peluang jika suatu saat terbukanya peluang investasi dan mengharuskan hadirnya tenaga kerja asing, maka perlu pengaturan yang akan dituangkan didalam Peraturan Pemerintah |

- Dalam proses pembahasan Raperda, tingkat partisipasi masyarakat harus dioptimalkan, dengan mengingat prinsip :
 - a. Adanya kewajiban publikasi yang efektif;
 - b. Adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan mudah diakses;
 - c. Adanya jaminan prosedur yang terbuka serta forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dan mengawasi proses sejak perencanaan;
 - d. Adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan Raperda;
 - e. Adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan bebas diakses oleh publik, misalnya Naskah Akademik dan Raperda;
 - f. Disediakkannya jaminan banding bagi publik apabila proses pembentukan Peraturan Daerah tidak dilakukan secara partisipatif;
 - g. Adanya pengaturan jangka waktu yang memadai untuk semua proses penyusunan, pembahasan dan diseminasi Raperda; dan
 - h. Adanya pertanggungjawaban yang jelas dan memadai bagi Pembentuk Peraturan Daerah yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi.
- Peraturan Daerah harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, agar dalam implementasinya tidak mengalami kendala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004

Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional dan Integrasi dan Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Asep Warlan, *Wewenang Daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Bandung, 2004

Ateng Syafruddin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Jakarta: Binacipta, 1984

Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1990

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Cet. Ketiga, 2004

Doli D. Siregar, Manajemen Aset : Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2004.

Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Cides, Jakarta, 1996.

H. Dasril Munir, Henry Arys Djuanda, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, YPAPI, Yogyakarta, 2004

Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1988.

M. Kuncoro dalam Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan, Prisma, No. 4, hlm. 3-17 telah mengamati masalah rendahnya pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah di 27 provinsi di Indonesia selama tahun 1984/1985-1990/1991, sehingga menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat.

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI, Yogyakarta, 2002.

Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.

Muhammad Abud Musa'ad, *Penguatan Otonomi Daerah di Balik Bayang-Bayang Ancaman Disintegrasi*, Penerbit ITB, 2002.

Murtir Jeddawi, Memacu Investasi di Era Ekonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda tentang Penanaman Modal, UII Pres, Yogyakarta, 2005

Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media, 2003.

W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

